



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM**

LAPORAN KINERJA TA 2025

**INSPEKTORAT V
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, Laporan Kinerja Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Sebagai aparat pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Laporan Kinerja Unit Kerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap Unit Kerja di lingkungan

Inspektorat Jenderal. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Internal Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan Inspektorat V, termasuk analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang telah menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum ditahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025 dan menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, 15 Januari 2026
Inspektur V,



Ir. Subaiha Kipli, M.T.
NIP 196610021991032002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat V Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan penggunaan anggaran. Laporan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta merupakan wujud akuntabilitas kinerja Inspektorat V atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029 dan perubahannya.

Inspektorat Jenderal menjalankan program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program (SP) "Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya". Sasaran Program ini akan berkontribusi dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya" (SS-06).

Pada Laporan Kinerja ini disampaikan pencapaian kinerja Inspektorat V yang diukur dengan metode pengukuran pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029. Tujuan program Inspektorat Jenderal tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi tujuan Inspektorat V yang dituangkan dalam Renstra yaitu Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Pembangunan Pekerjaan Umum Dan Perumahan dan Kegiatan *Mandatory*. Sasaran Kegiatan Inspektorat V yaitu Meningkatkan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V.

Capaian Kinerja Inspektorat V Tahun 2025 sebesar 106,73% dengan predikat **Istimewa**. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V adalah sebesar 84,08% dari target 78,78%. Pada tahun 2024, capaian kinerja Inspektorat V sebesar 111,49% dengan predikat Istimewa. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V adalah sebesar 97% dari target 87%. Inspektorat V berhasil meningkatkan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya serta mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan Renstra Inspektorat V.

Perjanjian Kinerja Awal Inspektorat V Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan target pada Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 dan anggaran pada DIPA Awal Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Pada Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) kali perubahan Perjanjian Kinerja yaitu pada Bulan Juli, September, dan Desember 2025. Revisi tersebut disebabkan antara lain terdapat perubahan pejabat yaitu Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat V, serta Perubahan DIPA Inspektorat V menjadi Rp2.328.900.000,00 (sebelum Rp2.973.006.000,00). Perubahan anggaran tersebut dikarenakan adanya pergeseran anggaran antar-KRO, antar-RO, antar-Komponen, antar-Akun dan antar-Kegiatan untuk penyesuaian anggaran kegiatan prioritas di akhir tahun 2025.

Isu strategis Inspektorat V meliputi peningkatan pemahaman Manajemen Risiko (MR) di unit binaan sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021, percepatan penyampaian dokumen tindak lanjut rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal dan TLRHP BPK RI, serta Penanganan Pengaduan.

Inspektorat V memiliki sumber daya manusia sebanyak 38 (tiga puluh delapan) pegawai, yang terdiri atas 35 (tiga puluh lima) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 (tiga) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari jumlah tersebut, terdapat Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 30 (tiga puluh) orang, yang terdiri dari 5 (lima) Auditor Ahli Madya, 11 (sebelas) Auditor Ahli Muda, 11 (sebelas) Auditor Ahli Pertama, dan 3 (tiga) Auditor Terampil.

Realisasi anggaran Inspektorat V Tahun 2025 mencapai Rp1.558.042.000,00 atau 66,90% dari pagu anggaran setelah revisi, dengan penghematan sebesar 33,10%. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp2.822.566.000,00 atau 98,89% dari pagu anggaran setelah revisi. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan anggaran, dengan penghematan penyerapan anggaran sebesar

Rp1.264.524.000,00 pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Inspektorat V berhasil memanfaatkan anggaran secara optimal untuk mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan baiknya pengelolaan penugasan pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya) serta peningkatan koordinasi Inspektorat V dengan Unit Organisasi SIBB dan Bina Konstruksi dalam kepedulian/*awareness* penerapan SPIP dan Manajemen Risiko.

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan, Inspektorat V menghadapi berbagai hambatan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan konsistensi dan akurasi data dalam pelaporan, seperti pada telaah sejawat internal dan pengawasan, yang memerlukan koordinasi lintas Unit Kerja serta pemanfaatan teknologi secara optimal. Selain itu, peningkatan jumlah pengaduan masyarakat dan kompleksitas tindak lanjut hasil pengawasan dapat menjadi kendala yang memengaruhi efisiensi proses kerja. Meski demikian, dengan strategi yang tepat dan dukungan penuh dari seluruh elemen organisasi, hambatan-hambatan tersebut dapat dikelola untuk menjaga keberlanjutan pencapaian kinerja yang optimal.

Hambatan terkait dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tantangan signifikan dalam mencapai target kinerja Inspektorat V dengan jumlah pegawai sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang serta target kinerja yang harus diselesaikan dan kompleksitas tugas yang beraneka ragam. Hal ini dapat memengaruhi kapasitas pegawai dalam menyelesaikan tugas secara efisien, terutama dalam pelaksanaan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Untuk mengatasi hambatan dalam mencapai target kinerja, beberapa solusi strategis telah diterapkan oleh Inspektorat V:

1. Koordinasi perbantuan Sumber Daya Manusia dari Unit Kerja lain;
2. Optimalisasi Teknologi Informasi;
3. Penguatan Kolaborasi dan Koordinasi dengan pihak internal dan eksternal;
4. Penyusunan Rencana Aksi.


Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Inspektorat V berhasil mencapai bahkan melampaui target kinerjanya. Hal ini menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengelola tantangan secara efektif melalui optimalisasi peran setiap pegawai, penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, serta pelaksanaan strategi kerja yang efisien. Dengan komitmen dan dedikasi seluruh pegawai, Inspektorat V mampu menjaga produktivitas kerja, memastikan tindak lanjut pengawasan berjalan sesuai rencana, dan mewujudkan target kinerja secara konsisten. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa hambatan dapat diatasi dengan perencanaan yang matang, kolaborasi yang baik, serta dukungan teknologi yang memadai.

Dalam mencapai dan meningkatkan kinerja ditahun 2026 diharapkan seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat V tetap melakukan penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal sesuai *core values* ASN BerAkhlak. Inspektorat V juga diharapkan tetap mengembangkan sistem dan prosedur serta administrasi secara digital agar pelaksanaan penugasan dapat terlaksana dengan lebih efektif.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat V pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalui tertib pelaksanaan Kendali Mutu Audit dan melaksanakan Audit Kinerja ditahun 2026;
2. Melakukan manajemen personel Auditor dalam hal penugasan pengawasan di Inspektorat V;
3. Berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal terkait kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia;
4. Meningkatkan pembinaan penerapan Manajemen Risiko pada Unit Organisasi Setjen, Itjen, BPIW, BPSDM, Bina Konstruksi.

Inspektorat V berkomitmen untuk mendukung peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang andal



dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan fokus pada pengawalan pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat, dukungan ini diwujudkan melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas, penguatan integritas, serta transformasi paradigma dalam menjalankan tugas dan fungsi. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat peran Inspektorat Jenderal dalam memastikan pembangunan infrastruktur yang berintegritas, profesional, dan berkelanjutan sesuai amanat Kementerian Pekerjaan Umum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Tugas dan Fungsi	10
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	10
1.3.1. Struktur Organisasi	10
1.3.2. Sumber Daya Manusia (SDM)	11
1.4. Sarana dan Prasarana	19
1.4.1. Aset Fisik	19
1.4.2. Teknologi Informasi	20
1.5. Isu Strategis Unit Kerja	23
1.6. Sistematika Laporan	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1. Rencana Strategis	25
2.1.1. Visi dan Misi	25
2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi	27
2.2. Program dan Kegiatan	32
2.3. Perjanjian Kinerja	34
2.2.1. Perjanjian Kinerja Awal	34
2.2.2. Perjanjian Kinerja Akhir	35
2.2.3. Kronologi Perubahan PK	35
2.4. Metode Pengukuran	36
2.5. Target Kinerja Tahun yang Dilaporkan Menurut Rencana Strategis	37
2.4.1. Reviu Capaian Target Renstra	39
2.4.2. Target Kinerja Berdasarkan Renstra	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	41
3.2. Capaian Kinerja	41
3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan	41
3.2.2. Analisis Capaian Output Kegiatan	44
3.3. Analisis Perbandingan Kinerja	47
3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya ...	48
3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra	49
3.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Lain	49
3.4. Analisis Realisasi Anggaran	50
3.4.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	50
3.4.2. Realisasi Anggaran TA 2025	53
3.4.3. Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan TA 2024	56
3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
BAB IV PENUTUP	59
4.1. Simpulan Umum	59
4.2. Faktor Pendukung Keberhasilan	60
4.3. Faktor Penyebab Kegagalan	61
4.4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Pegawai Inspektorat V	13
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan <i>Gender</i>	15
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan <i>Gender</i>	16
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan	17
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Usia, dan <i>Gender</i>	18
Tabel 1.6	Data Aset BMN di Inspektorat V	19
Tabel 2.1	Rincian Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal Tahun 2024	28
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2025 (PK Awal)	34
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Revisi ke-3 Inspektur V Tahun 2025	35
Tabel 2.4	Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan Berdasarkan Renstra	36
Tabel 2.5	Capaian Target Renstra Inspektorat V Tahun 2025–2029	39
Tabel 2.6	Target Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat V	40
Tabel 3.1	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2024	41
Tabel 3.2	Realisasi Sasaran Kegiatan Inspektorat V Tahun 2025 (Renstra dan PK)	42
Tabel 3.3	Capaian <i>Output</i> Program dan Capaian <i>Output</i> Kegiatan Tahun 2025	44
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat V Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	48
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat V Tahun 2025 dengan Target Renstra	49
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Unit Kerja yang Setara	49
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Inspektorat V Tahun 2025	54
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan TA 2024	56
Tabel 3.9	Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal TA 2025.....	11
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Inspektorat V TA 2025	11
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai Inspektorat V	13
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai Inspektorat V Berdasarkan Gender.....	14
Gambar 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis dan <i>Gender</i>	14
Gambar 1.6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	15
Gambar 1.7	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan <i>Gender</i>	15
Gambar 1.8	Jumlah Pegawai Inspektorat V Berdasarkan Jabatan.....	16
Gambar 1.9	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan <i>Gender</i>	16
Gambar 1.10	Jumlah Pegawai Inspektorat V Berdasarkan Pendidikan.....	18
Gambar 1.11	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia.....	18
Gambar 1.12	Layar Tangkap pada Sistem Informasi i-eMonitoring	20
Gambar 1.13	Layar Tangkap pada Sistem Informasi e-HRM	21
Gambar 1.14	Layar Tangkap pada Sistem Informasi e-Kinerja	21
Gambar 1.15	Layar Tangkap pada Aplikasi TNDE	21
Gambar 1.16	Layar Tangkap pada Sistem Informasi e-PTLHP	22
Gambar 1.17	Layar Tangkap pada Sistem Informasi Bravo-PU di Telepon Genggam dan <i>Website</i>	22
Gambar 1.18	Layar Tangkap pada Halaman Penyimpanan <i>One Drive</i>	23
Gambar 1.19	Dokumentasi Laporan Pengawasan pada <i>One Drive</i>	23
Gambar 1.20	Layar Tangkap penggunaan <i>Email</i> pada Aplikasi <i>Microsoft Outlook</i>	23
Gambar 2.1	Dwiperan Inspektorat Jenderal.....	26
Gambar 2.2	Kerangka Logis Inspektorat Jenderal	26
Gambar 2.3	Peta Strategi Inspektorat Jenderal	33
Gambar 2.4	Indikator Kinerja Program Unor Inspektorat Jenderal	38
Gambar 2.5	Keterkaitan dan <i>Cascading</i> Indikator Kinerja Kegiatan dengan <i>Rincian Output (RO)</i> pada Inspektorat V.....	38
Gambar 3.1	Komposisi Capaian Rincian <i>Output</i>	45
Gambar 3.2	DIPA Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024-2025	50
Gambar 3.3	Pohon Anggaran DIPA Awal	51
Gambar 3.4	Pohon Anggaran DIPA Revisi	51
Gambar 3.5	Pagu Anggaran Inspektorat V Tahun 2024-2025	52
Gambar 3.6	Pagu dan Realisasi Anggaran per Komponen Kegiatan Tahun 2025	55

DAFTAR SINGKATAN

ADTT	: Audit Dengan Tujuan Tertentu
AAIPI	: Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AREPP	: Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya
CHPA	: Catatan Hasil Penelitian Awal
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
E-HRM	: <i>Electronic Human Resource Management</i>
FGD	: <i>Forum Group Discussion</i>
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
MR	: Manajemen Risiko
PANRB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PBJ	: Pengadaan Barang/Jasa
PETLHP	: Pemantauan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
PK	: Perjanjian Kinerja
PKPT	: Program Kerja Pengawasan Tahunan
RENSTRA	: Rencana Strategis
RKA-K/L	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga/Negara
RKBMN	: Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SIBB	: Setjen, Itjen, Bina Konstruksi, BPIW, BPSDM
SK	: Sasaran Kegiatan
SMAP	: Sistem Manajemen Anti Penyuapan
SP	: Sasaran Program
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SS	: Sasaran Strategis
TLRHP	: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
UPR T-1	: Unit Pemilik Risiko Tingkat 1
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PNPNS	: Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang merupakan panduan dalam penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja, dan Evaluasi Implementasi SAKIP, serta Reviu Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Internal Pemerintah;
- e. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/SE/M/2024 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- f. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 47.1/KPTS/lj/2024 Tanggal 20 Desember 2024 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 34/KPTS/lj/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 47.1/KPTS/lj/2024 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025;
- g. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/lj/2025 Tanggal 30 Juni 2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 32/KPTS/lj/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/lj/2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
- h. Surat Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor PA 0101-Is/56 Tanggal 15 Januari 2025 Hal Mekanisme Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Inspektorat Jenderal
- i. Perjanjian Kinerja (PK) Revisi ke-3 Tahun 2025 Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tanggal 29 Desember 2025;
- j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 Nomor SP DIPA-145.02-0/2025 Tanggal 2 Desember 2024 beserta revisinya;
- k. Laporan Rencana Aksi Kinerja (B0) Revisi Ketiga Inspektorat V Tahun 2025 Tanggal 29 Desember 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

1.2. Tugas dan Fungsi

Sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

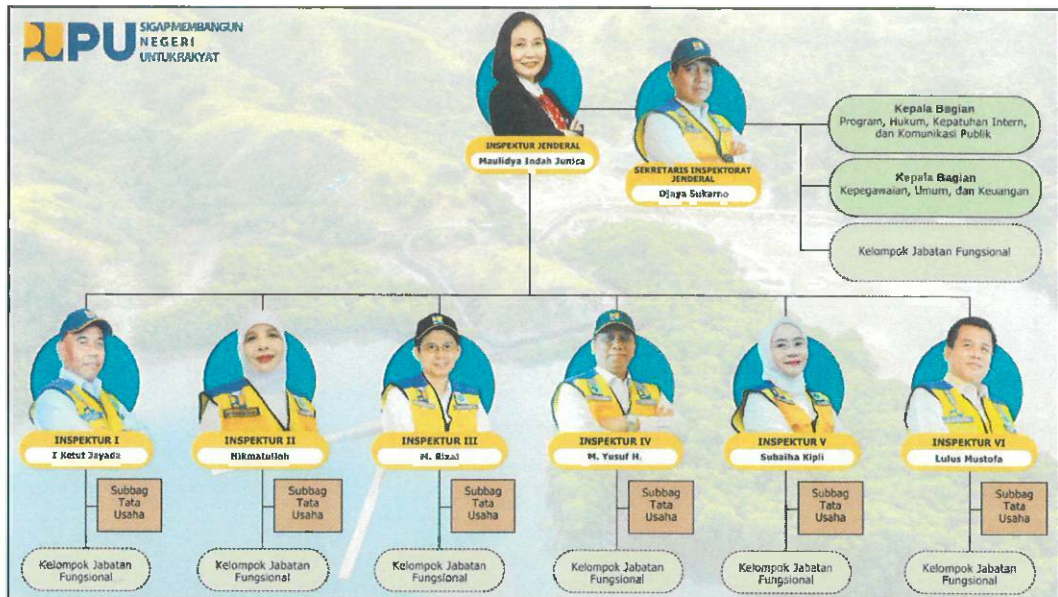
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. Pelaksanaan pengawasan wajib tingkat Kementerian;
- e. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- f. Pelaksanaan program pengembangan, penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan intern;
- g. Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
- h. Pelaporan kinerja;
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

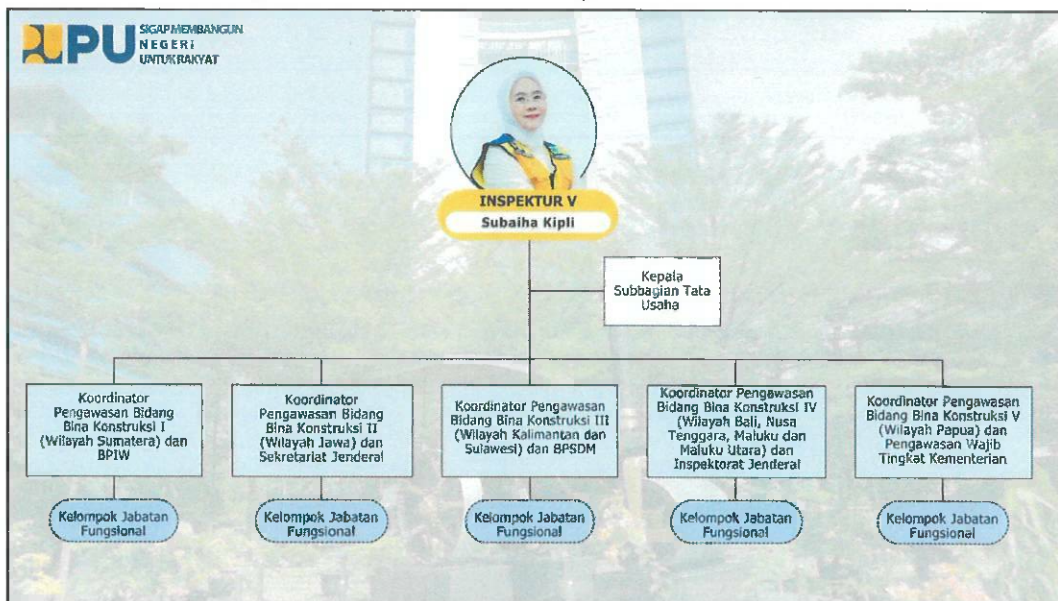
1.3.1. Struktur Organisasi

Menteri Pekerjaan Umum menetapkan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Inspektorat V terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal TA 2025

Struktur Organisasi Inspektorat V berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/Ij/2025 Tanggal 30 Juni 2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 32/KPTS/Ij/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/Ij/2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Inspektorat V TA 2025

1.3.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Pemenuhan SDM tidak hanya ditiitikberatkan pada aspek jumlah, tetapi juga pada kualitas kompetensi yang dimiliki agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal. SDM aparatur yang kompeten menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta pelayanan publik yang berkualitas.

Kualitas SDM aparatur tercermin dari pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional dan etika kerja pegawai. Pegawai yang memiliki pemahaman yang memadai terhadap peran dan tanggung jawab organisasi akan lebih mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan menjadi kebutuhan strategis dalam meningkatkan kinerja individu maupun kinerja organisasi secara keseluruhan.

Sejalan dengan upaya peningkatan kompetensi tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

Pada tahun 2025 ini, pengelolaan SDM di Inspektorat V menunjukkan kinerja yang positif dengan tercapainya target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2025. Atas capaian tersebut, telah diterapkan pemberian penghargaan (*reward*) kepada pegawai sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi atas kinerja yang diberikan dan juga sanksi (*punishment*) atas kinerja yang belum maksimal.

Penghargaan yang diberikan kepada pegawai antara lain berupa kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yaitu:

- a. Pelatihan Audit Barang Milik Negara (BMN);
- b. Pelatihan Evaluasi Tata Kelola Teknik Informatika dan Audit TIK
- c. Pelatihan Audit Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) secara Elektronik;
- d. Pelatihan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK);
- e. Workshop Peningkatan Soft Skill dalam Menunjang Pelayanan Prima;
- f. Pelatihan Women's Leadership Training.

Selain itu, penghargaan lain berupa kenaikan jenjang jabatan kepada 2 (dua) orang pegawai dan kenaikan pangkat kepada 6 (enam) orang pegawai. Kenaikan jenjang jabatan dan pangkat tersebut beriringan dengan bertambahnya penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

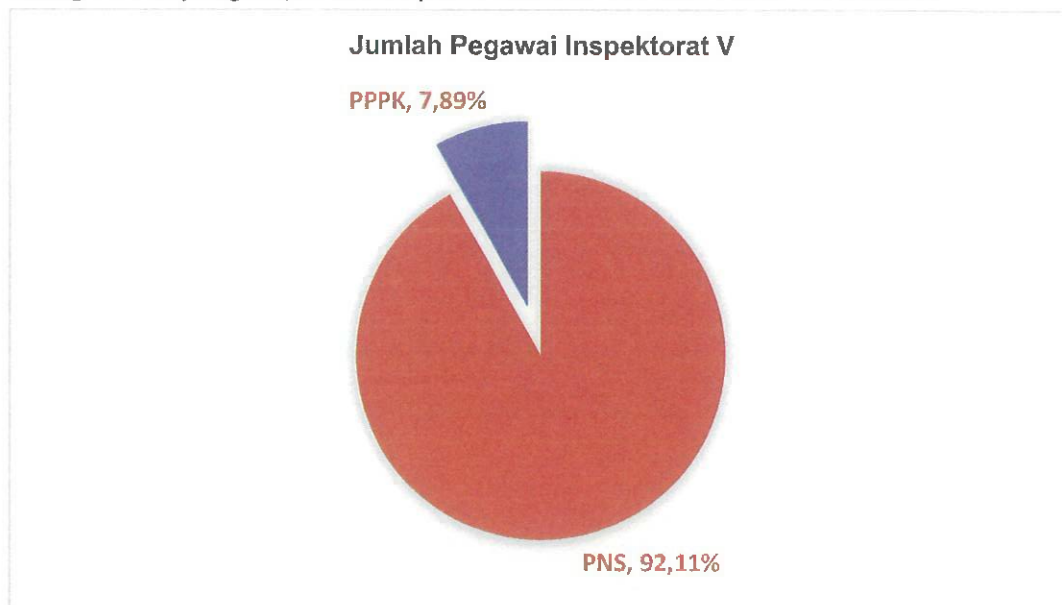
Pemberian sanksi juga diberlakukan dalam hal penegakan disiplin kehadiran pegawai yang dilaksanakan antara lain dengan melakukan pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang terlambat dan/atau tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah. Selama tahun 2025 ini telah dilakukan pemotongan tunjangan kinerja senilai total Rp40.605.510,00.

Sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/lj/2025 Tanggal 30 Juni 2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 32/KPTS/lj/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/lj/2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum serta Daftar Urut Kepangkatan Bulan Januari Tahun 2025 tercatat pegawai yang ditempatkan di Inspektorat V sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang pegawai yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 (tiga) orang Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil (PNPNS). Adapun perubahan jumlah pegawai yang tercatat selama tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Pada bulan Juni, terdapat 2 (dua) orang PNS yang pindah ke Unit Kerja Inspektorat V;
- b. Pada bulan Oktober, terdapat 3 (tiga) orang PNPNS yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- c. Pada bulan September, terdapat 1 (satu) orang PNS yang pindah dari Unit Kerja Inspektorat V,

sehingga berdasarkan data tersebut di atas pada Bulan Desember Tahun 2025 tercatat pegawai yang ditempatkan di Inspektorat V sebanyak 38 (tiga puluh

delapan) orang pegawai, terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang PNS dan 3 (tiga) orang PPPK yang dapat dilihat pada Gambar 1.3 dan Tabel 1.1 berikut:



Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Inspektorat V

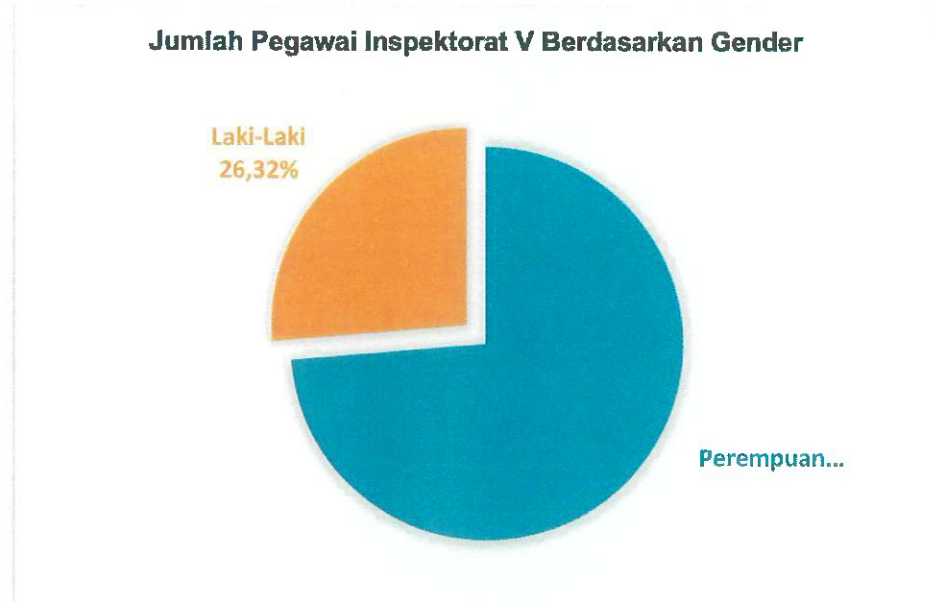
Tabel 1.1 Daftar Pegawai Inspektorat V

No.	Nama	NIP	Gol.	Jabatan
1.	Ir. Subaiha Kipli M.T.	196610021991032002	IV/d	Inspektur V
2.	Mularia Cornelia Josefina Sirait, S.E., M.Ak.	196701071998032002	IV/c	Auditor Ahli Madya
3.	Satriadarma Elliska, S.E., M.M.	198311122008012009	IV/c	Auditor Ahli Madya
4.	Lasnita Yusmiati Dahlia, S.T., M.T.	198502012008012007	IV/c	Auditor Ahli Madya
5.	Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc.	198111102006041002	IV/b	Auditor Ahli Madya
6.	Aditya, S.E., M.Ak.	198606202010121002	IV/a	Auditor Ahli Madya
7.	Na'ilil Afifah, S.T., M.T.	198305232008122001	III/d	Auditor Ahli Muda
8.	Tomy, S.T.	198404302009121001	III/d	Auditor Ahli Muda
9.	Indah Triana Ristani, S.E., Ak.	198405082009122001	III/d	Auditor Ahli Muda
10.	Mohamad Ikhsan, S.H.	198411012009121001	III/d	Auditor Ahli Muda
11.	Dumaris BR Sinurat, S.E., M.Ak.	198802152010122006	III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha
12.	Liona Pramestiani, S.I. Kom.	198511252009122001	III/d	Auditor Ahli Muda
13.	Dian Rindu Lubis, S.E., M.Ak.	198506252009122001	III/d	Auditor Ahli Muda
14.	Desy Handayani, S.E., M.Sc.	198612182010122004	III/c	Auditor Ahli Muda
15.	Gayuh Alviana Azmi, S.E., M.Ak.	198807202010122005	III/c	Auditor Ahli Muda
16.	Yolania Sari, S.E., M.E.	198507042014022002	III/c	Auditor Ahli Muda
17.	Dhiny Diyah Pradipta, S.E., Ak.	198804242014022004	III/c	Karyasiswa Master dan Doktoral
18.	Putri Scere Sinaga, S.E.	199102212014022002	III/c	Auditor Ahli Muda
19.	Hizkia Aldo Amanta Saragih, S.E.	199208102018021001	III/c	Auditor Ahli Muda
20.	Anggi Mirawati, S.T.	198908202015022001	III/b	Auditor Ahli Pertama
21.	Christina Eka Widiastuti, S.E.	199104152019032009	III/b	Auditor Ahli Pertama
22.	Fanisya Alya Puteri, S.E.	199603102019032007	III/b	Auditor Ahli Pertama
23.	Eka Nurpa Hijria, S.ST.	199606252019032010	III/b	Auditor Ahli Pertama
24.	Rifdah Mayrani, S.E.	199405142019032011	III/b	Auditor Ahli Pertama
25.	Marta Muhammad Thohir, S.E.	199103012019031006	III/b	Auditor Ahli Pertama
26.	Viena Ananda Ari Sembiena, S.T.	199601022022032019	III/b	Auditor Ahli Pertama
27.	Harfi Yanes Fira, S.T.	199605142022032012	III/b	Auditor Ahli Pertama
28.	Sun'Naidah, S.T.	199612152022032020	III/b	Auditor Ahli Pertama
29.	Vita Bakti Rafadilla, S.Tr.Ak.	199601022022032019	III/a	Auditor Ahli Pertama
30.	Sofiana Dewi, S.Tr.Ak.	199904042019122002	III/a	Auditor Ahli Pertama
31.	Muslih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	199806222021011002	II/d	Auditor Terampil
32.	Fitriana Sianipar, A.Md.Ak.	199901202021012002	II/d	Karyasiswa Ahli Madya dan Sarjana
33.	Rifka Mindo Asih Sihombing, A.Md.Ak.	199901292021012002	II/d	Auditor Terampil
34.	Yohana Tri Januarumsari, A.Md.Ak.	199801302021012002	II/d	Auditor Terampil
35.	Ahmad Supriadi	198104252014121001	II/c	Pengelola Kepegawaian
36.	Aprilia Shafira, S.E.	199004242025212048	IX	Penata Layanan Operasional

No.	Nama	NIP	Gol.	Jabatan
37.	Hendri Aji Susatiyo	198210112025211035	V	Operator Layanan Operasional
38.	Saiful Junadi Setiawan	197503032025211021	V	Operator Layanan Operasional

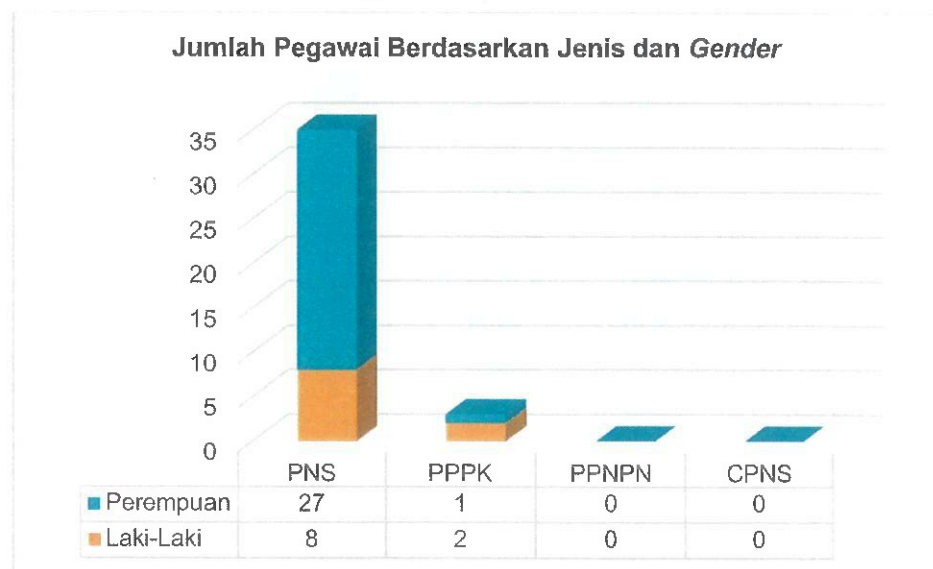
1.3.2.1. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Pengelolaan SDM aparatur bertujuan untuk mewujudkan SDM aparatur yang berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dalam melaksanakan tugas untuk mencapai Perjanjian Kinerja Inspektorat V. Ditahun 2025, tercatat jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kepegawaian dan *Gender* dapat dilihat pada Gambar 1.4 dan Gambar 1.5 berikut ini:



Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Inspektorat V Berdasarkan Gender



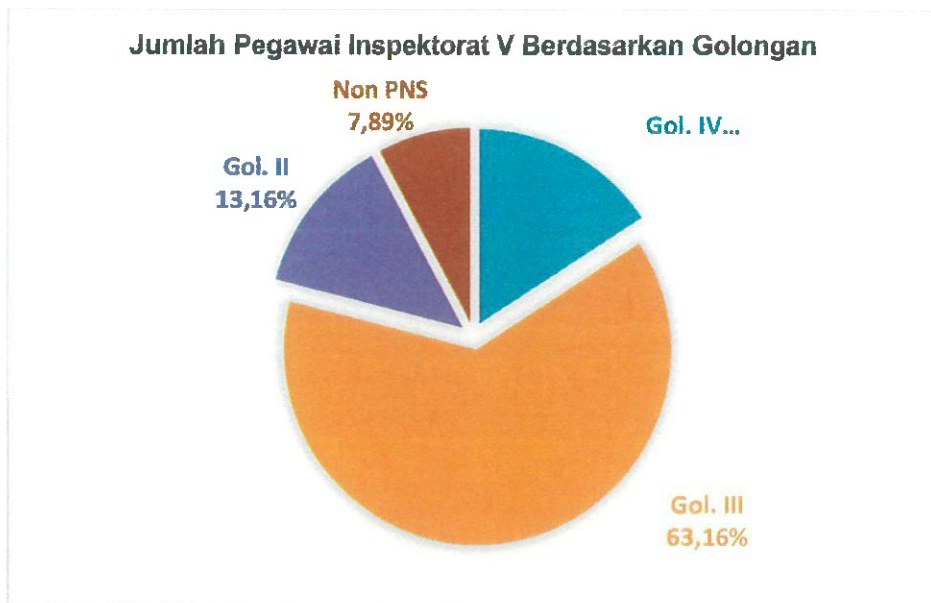
Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis dan Gender

1.3.2.2. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

PNS dan PPPK Inspektorat V sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang didominasi pegawai golongan III sebanyak 24 (dua puluh empat) orang atau 64,16% dari keseluruhan jumlah pegawai. Ditahun 2025, tercatat

jumlah SDM Berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Gambar 1.6, Gambar 1.7, dan Tabel 1.2 berikut ini:



Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

Gambar 1.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

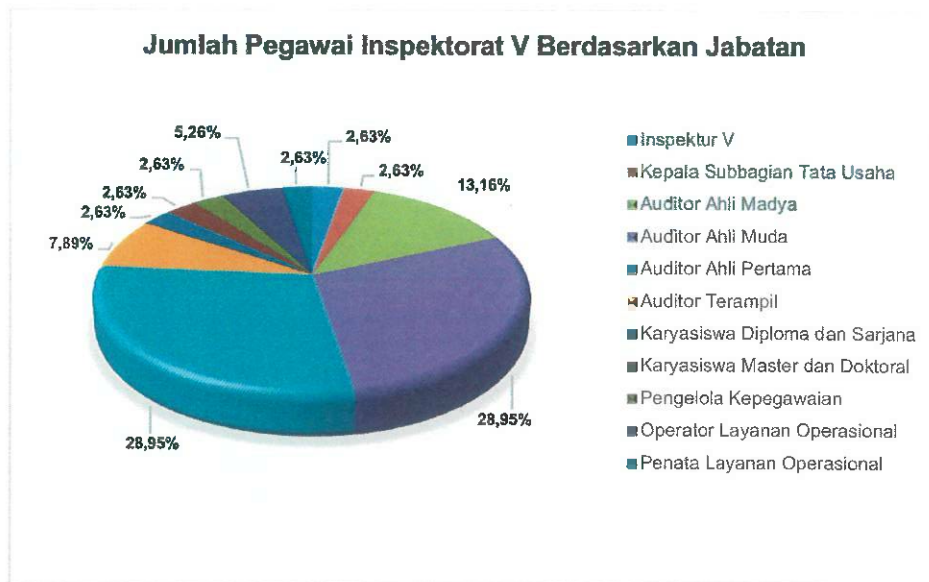
Gambar 1.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Gender

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Gender

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/d	-	1	1
2.	IV/c	-	1	1
3.	IV/b	-	2	2
4.	IV/a	2	-	2
5.	III/d	2	5	7
6.	III/c	1	5	6
7.	III/b	1	8	9
8.	III/a	-	2	2
9.	II/d	1	3	4
10.	II/c	1	-	1
11.	PPPK	2	1	3
Jumlah		10	28	38

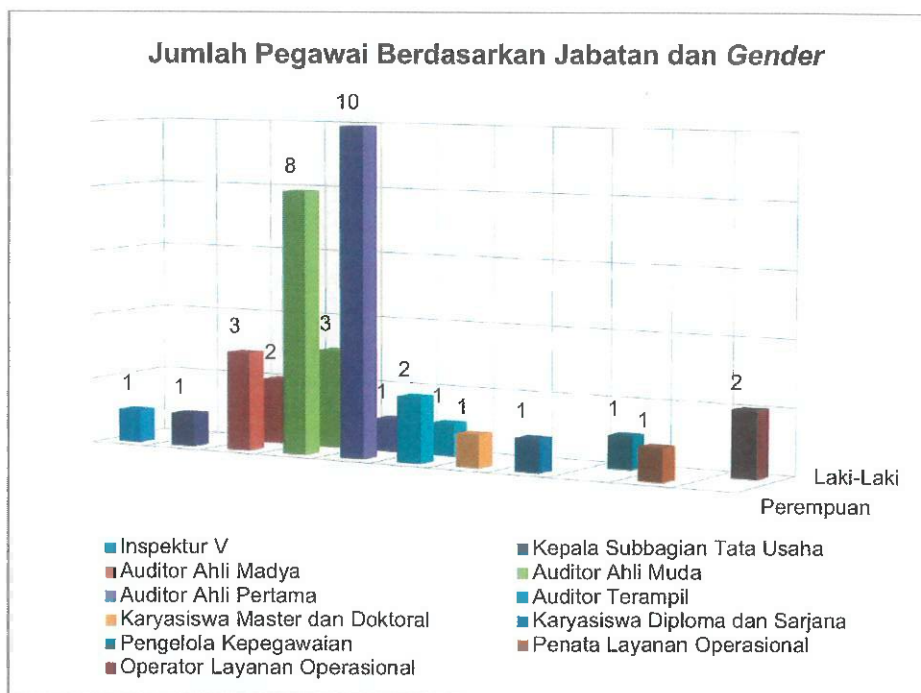
Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

Inspektorat V terdiri dari 3 (tiga) jenis jabatan yaitu Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana. Inspektorat V yang didominasi oleh Jabatan Fungsional terdiri dari Auditor Ahli Madya (13,16%), Auditor Ahli Muda (28,05%), Auditor Ahli Pertama (28,95%), dan Auditor Terampil (7,89%). Jumlah SDM Berdasarkan Golongan secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.8, Gambar 1.9, dan Tabel 1.3 berikut ini:



Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

Gambar 1.8 Jumlah Pegawai Inspektorat V Berdasarkan Jabatan



Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

Gambar 1.9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A.	Struktural			
1.	Inspektor V	-	1	1

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	-	1	1
B. Fungsional				
1.	Auditor Ahli Madya	2	3	5
2.	Auditor Ahli Muda	3	8	11
3.	Auditor Ahli Pertama	1	10	11
4.	Auditor Terampil	1	2	3
C. Pelaksana				
1.	Karyasiswa Master dan Doktoral	-	1	1
2.	Karyasiswa Diploma dan Sarjana	-	1	1
3.	Pengelola Kepegawaian	1	-	1
4.	Penata Layanan Operasional	-	1	1
5.	Operator Layanan Operasional	2	-	2
Jumlah		10	28	38

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan golongan dan jabatan, Inspektorat V didominasi oleh pegawai golongan III dengan Jabatan Auditor Ahli Pertama sebanyak 11 (sebelas) orang dan Auditor Ahli Muda sebanyak 11 (sebelas) orang yang dapat dilihat secara rinci pada Tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan

No.	Jabatan	Golongan PNS				PPPK	Jumlah
		IV	III	II	I		
1.	Inspektur V	1	-	-	-	-	1
2.	Auditor Ahli Madya	5	-	-	-	-	5
3.	Auditor Ahli Muda	-	11	-	-	-	11
4.	Auditor Ahli Pertama	-	8	-	-	-	8
5.	Auditor Terampil	-	1	2	-	-	3
6.	Karyasiswa Master dan Doktoral	-	1	-	-	-	1
7.	Karyasiswa Diploma dan Sarjana	-	-	1	-	-	1
Subbagian Tata Usaha							
1.	Kepala Subbagian Tata Usaha	-	1	-	-	-	1
2.	Auditor Ahli Pertama	-	3	-	-	-	3
3.	Pengelola Kepegawaian	-	-	1	-	-	1
4.	Penata Layanan Operasional	-	-	-	-	1	1
5.	Operator Layanan Operasional	-	-	-	-	2	2
Jumlah		6	25	4	-	3	38

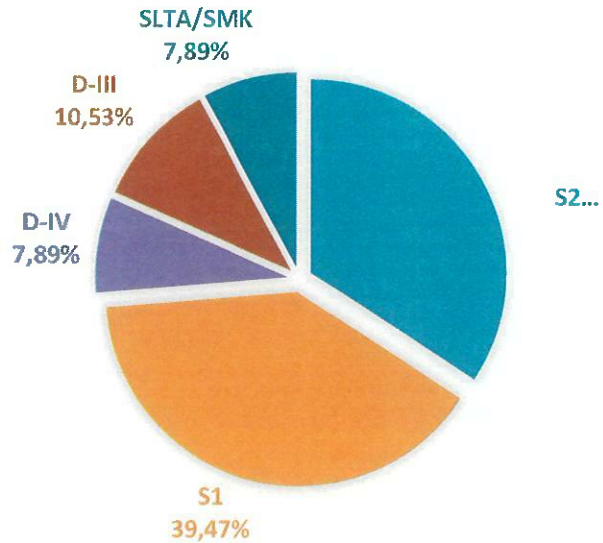
Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

1.3.2.3. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Dalam mendukung transformasi SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berbasis kompetensi, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Pegawai di lingkungan Inspektorat V telah menempuh pendidikan yang dapat dilihat secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.10, Gambar 1.11, dan Tabel 1.5 berikut ini:

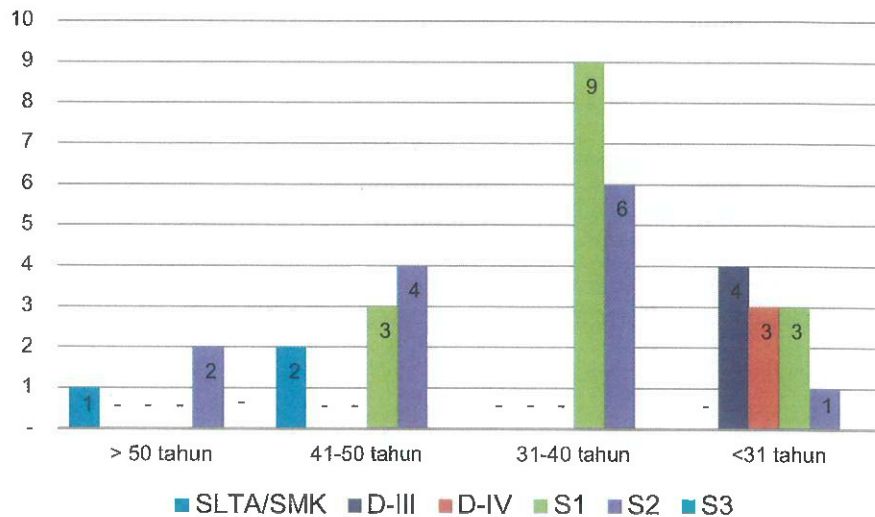
Jumlah Pegawai Inspektorat V Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

Gambar 1.10 Jumlah Pegawai Inspektorat V Berdasarkan Pendidikan

Jumlah Pegawai Inspektorat V Berdasarkan Pendidikan dan Usia



Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

Gambar 1.11 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Usia, dan Gender

No.	Pendidikan	Usia/Gender								Jumlah
		> 50 tahun		41-50 tahun		31-40 tahun		<31 tahun		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	SLTA/SMK	1	-	2	-	-	-	-	-	3
2.	D-III	-	-	-	-	-	-	1	3	4
3.	D-IV	-	-	-	-	-	-	-	3	3
4.	S1	-	-	2	1	2	7	-	3	15
5.	S2	-	2	1	3	1	5	-	1	13
6.	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	2	5	4	3	12	1	10	38

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Bulan Desember 2025

1.4. Sarana dan Prasarana

1.4.1. Aset Fisik

Sarana dan prasarana fisik Inspektorat V meliputi seluruh Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pegawai di Inspektorat V menempati Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum Lantai 16 serta didukung dengan kelengkapan ruangan tempat bekerja yang memadai. Secara bertahap Inspektorat V telah melakukan upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana fisik pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Ketersediaan sarana dan prasarana memiliki peran strategis dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Sarana mencakup peralatan dan fasilitas yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan tugas, sedangkan prasarana meliputi infrastruktur dan fasilitas pendukung seperti gedung, jaringan komunikasi, serta lingkungan kerja. Sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dapat meningkatkan produktivitas kerja, mempercepat penyelesaian tugas, serta meminimalkan hambatan dalam proses kerja.

Dengan demikian, keterpaduan antara sarana dan prasarana yang dikelola secara optimal menjadi salah satu faktor pendukung penting dalam pencapaian target kinerja Inspektorat V. Upaya pemenuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat terus mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Dalam rangka menjaga kelayakan dan keberfungsian aset fisik, Inspektorat V secara berkala melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan/atau peremajaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aset. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aset BMN dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Data Aset BMN di Inspektorat V sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.6 berikut ini:

Tabel 1.6 Data Aset BMN di Inspektorat V

No.	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah	Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1.	Printer	12	-	-	12	Berfungsi Normal
2.	Dispenser	2	-	-	2	Berfungsi Normal
3.	Scanner	1	-	-	1	Berfungsi Normal
4.	Desktop PC	4	1	-	5	Rusak Ringan: Layar berkedip
5.	Laptop	37	-	-	37	Berfungsi Normal
6.	Microwave	2	-	-	2	Berfungsi Normal
7.	TV	2	-	-	2	Berfungsi Normal
8.	Air Purifier	1	-	-	1	Berfungsi Normal
9.	Paper Shredder	3	-	-	3	Berfungsi Normal
10.	Air Fryer	2	-	-	2	Berfungsi Normal
11.	Coffee Maker	1	-	-	1	Berfungsi Normal
12.	Kulkas	2	-	-	2	Berfungsi Normal
13.	Electronic Whiteboard	1	-	-	1	Berfungsi Normal
14.	Meja Kerja	6	-	-	6	Berfungsi Normal
15.	Meja Rapat	2	-	-	2	Berfungsi Normal
16.	Kursi	48	-	-	48	Berfungsi Normal
17.	Kursi kerja	12	-	-	12	Berfungsi Normal
18.	Kursi rapat	10	-	-	10	Berfungsi Normal
19.	Mesin Penghancur Kertas	3	-	-	3	Berfungsi Normal
20.	Lemari Filling Cabinet Besi	5	-	-	5	Berfungsi Normal
21.	Lemari Kayu	17	-	-	17	Berfungsi Normal
22.	Jam Dinding	2	-	-	2	Berfungsi Normal
23.	White Board	2	-	-	2	Berfungsi Normal
24.	Nakas	2	-	-	2	Berfungsi Normal
25.	Tempat Tidur	1	-	-	1	Berfungsi Normal
26.	Meja Makan	1	-	-	1	Berfungsi Normal
27.	Kursi Makan	2	-	-	2	Berfungsi Normal
28.	Sofa	3	-	-	3	Berfungsi Normal
29.	Meja Tamu	1	-	-	1	Berfungsi Normal
30.	Meja Kayu	1	-	-	1	Berfungsi Normal

No.	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah	Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
31.	Camera Video Conference	1	-	-	1	Berfungsi Normal
32.	Frame Figura	2	-	-	2	Berfungsi Normal
33.	Sound System	1	-	-	1	Berfungsi Normal
34.	Meja Kubikal/Workstation	34	-	-	34	Berfungsi Normal
35.	Locker (7x5)	1	-	-	1	Berfungsi Normal
Total Barang		208	1	-	209	

Keterangan:

B : Baik
RR : Rusak Ringan
RB : Rusak Berat

1.4.2. Teknologi Informasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan data dan informasi dari sistem Informasi di Kementerian Pekerjaan Umum yang keseluruhannya terangkum dalam *website* Kementerian Pekerjaan Umum (<http://www.pu.go.id>), yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal. Secara spesifik sistem informasi yang digunakan oleh Inspektorat V dalam pelaksanaan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya melalui laman web sebagai berikut:

a. i-eMonitoring

i-eMonitoring merupakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik, yang merupakan upaya untuk mendapatkan data progres pelaksanaan kegiatan yang lengkap, akurat, dan terkini terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum. i-eMonitoring dapat diakses pada laman *website* <http://iemon.pu.go.id>. Sistem informasi ini berisikan data progres pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum yang berada di seluruh Indonesia. Subbagian Tata Usaha Inspektorat V melakukan *update* secara berkala terkait anggaran yang dikoordinasikan dengan Bagian Kepegawaian, Umum, dan Keuangan serta Bagian Program, Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik sehingga data pada

Data pada i-eMonitoring merupakan data yang mutakhir. Data dari sistem ini digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satuan Kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi maupun dari Pimpinan Unit Organisasi kepada Menteri Pekerjaan Umum. Selain itu, data tersebut juga digunakan sebagai bahan pelaporan/koordinasi oleh Menteri Pekerjaan Umum kepada Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan lain-lain.

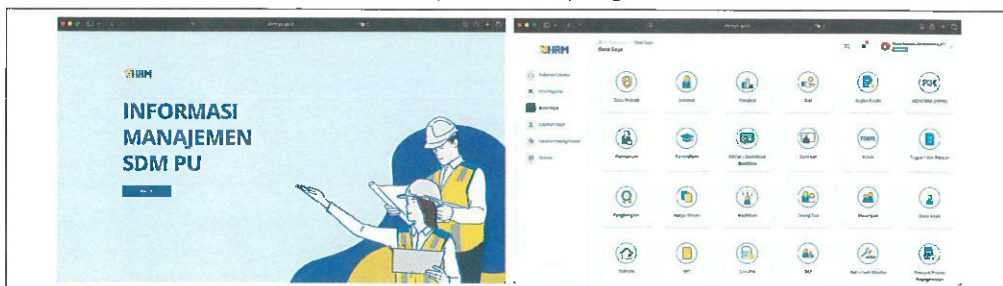


Gambar 1.12 Layar Tangkap pada Sistem Informasi i-eMonitoring

b. e-HRM (*Electronic Human Resource Management*)

e-HRM adalah sistem informasi yang dirancang untuk mempermudah proses penyimpanan dan pencarian data kepegawaian di Kementerian Pekerjaan Umum. Saat ini, e-HRM berfungsi sebagai sumber data utama untuk mendukung pengelolaan kepegawaian yang terintegrasi, efisien, dan berbasis digital. Dalam hal pengelolaan kepegawaian, Sistem e-HRM mendukung

memudahkan proses seperti Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti Pegawai, serta proses kepegawaian lainnya. Sistem e-HRM juga dapat dimanfaatkan oleh pihak eksternal, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam pengambilan data kepegawaian yang diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN. Sistem e-HRM ini dapat diakses melalui laman website <https://ehrm.pu.go.id>.



Gambar 1.13 Layar Tangkap pada Sistem Informasi e-HRM

c. e-Kinerja

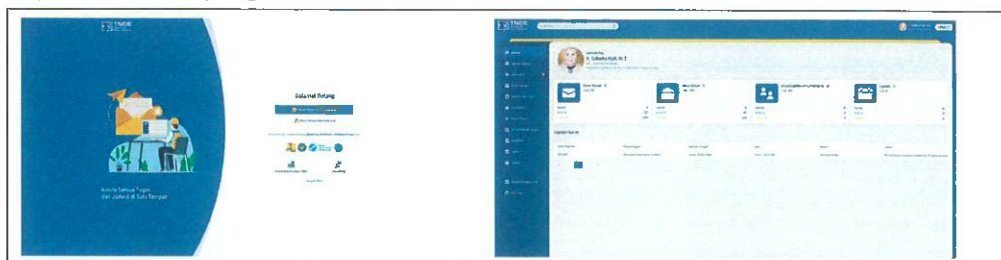
e-Kinerja merupakan sistem informasi untuk mengelola Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kementerian Pekerjaan Umum. Sistem ini mempermudah pegawai dalam menyusun target kinerja tahunan, indikator keberhasilan, serta penilaiannya secara elektronik. Selain itu, e-Kinerja juga berfungsi memantau capaian dan realisasi kinerja yang terhubung dengan Sistem BKN yaitu SAPK/MyASN untuk sinkronisasi data ASN. Sistem e-Kinerja ini dapat diakses melalui laman website <https://kinerja.pu.go.id>.



Gambar 1.14 Layar Tangkap pada Sistem Informasi e-Kinerja

d. TNDE

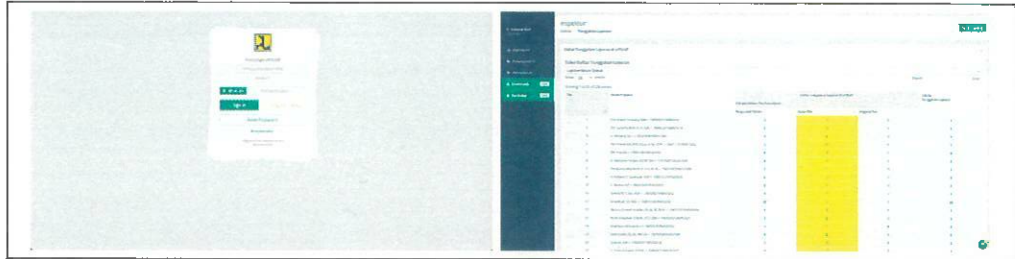
TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik) adalah sistem/aplikasi yang digunakan untuk mengelola naskah dinas dan komunikasi kedinasan secara elektronik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Pemanfaatan TNDE guna mendukung proses administrasi persuratan dan tata naskah dinas secara elektronik mulai dari penerimaan, pengolahan, disposisi, hingga pengarsipan dokumen kedinasan. TNDE memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola administrasi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel yang dapat diakses melalui laman website <https://eoffice2.pu.go.id>.



Gambar 1.15 Layar Tangkap pada Aplikasi TNDE

e. e-PTLHP

ePTLHP (Elektronik Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memantau, mengelola, dan menilai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan secara elektronik guna mendukung efektivitas, efisiensi, dan akurasi proses pengawasan. ePTLHP dapat diakses melalui laman *website* <https://eptlhp.pu.go.id>. Selain itu, ePTLHP juga digunakan untuk mendokumentasikan seluruh proses Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal secara terintegrasi yang dapat diakses oleh pemilik akun di seluruh Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum.



Gambar 1.16 Layar Tangkap pada Sistem Informasi e-PTLHP

f. Bravo-PU

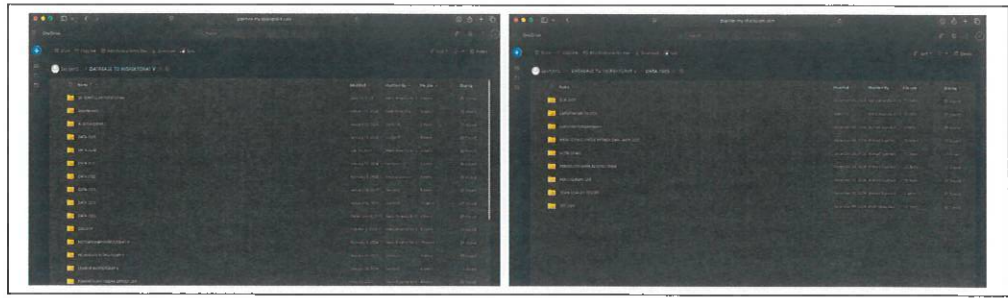
Bravo-PU merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk mengorganisir data dan informasi dari berbagai aplikasi internal Kementerian Pekerjaan Umum yang dapat diakses melalui telepon genggam ataupun laman *website* <https://bravo.pu.go.id>. Bravo-PU menyediakan pelayanan administrasi berbasis elektronik pada layanan kepegawaian, perjalanan dinas, dan administrasi umum secara *online* untuk mengurangi proses manual dan mempercepat pelayanan internal.



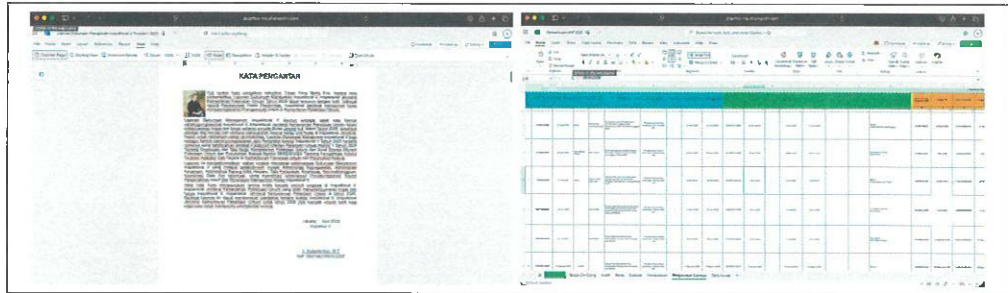
Gambar 1.17 Layar Tangkap pada Sistem Informasi Bravo-PU di Telepon Genggam dan *Website*

g. One Drive

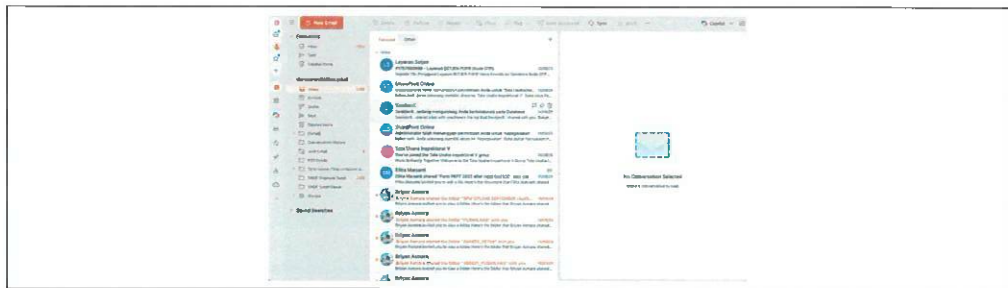
OneDrive adalah layanan penyimpanan berbasis *cloud* (awan) dari Microsoft yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan berbagi file secara *online*. OneDrive memiliki fitur sinkronisasi otomatis antar perangkat sehingga file yang disimpan atau diubah di satu perangkat akan otomatis diperbarui di semua perangkat lain yang menggunakan akun yang sama. OneDrive memudahkan pengguna dalam mengakses file yang tersimpan di dalamnya dari mana saja dan kapan saja melalui laman *website* onedrive.live.com, Aplikasi OneDrive di komputer/laptop dan telepon genggam (Android/iOS). Selain itu, Aplikasi OneDrive terintegrasi dengan Aplikasi Microsoft 365 seperti Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, dan SharePoint.



Gambar 1.18 Layar Tangkap pada Halaman Penyimpanan *One Drive*



Gambar 1.19 Dokumentasi Laporan Pengawasan pada *One Drive*



Gambar 1.20 Layar Tangkap penggunaan *Email* pada Aplikasi *Microsoft Outlook*

1.5. Isu Strategis Unit Kerja

Isu Strategis pada Inspektorat V selama tahun 2025 adalah:

- a. Peningkatan pemahaman Manajemen Risiko (MR) pada Unit Organisasi yang dibina sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/SE/M/2024 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, karena masih terdapat hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi yang dibina belum berada pada level 4;
- b. Percepatan tindak lanjut:
 - 1) Penyelesaian penanganan pengaduan yang diteruskan oleh Inspektorat VI selaku pelaksana tahap penelitian relevansi kepada Inspektorat V selaku pelaksana tahap penelitian awal;
 - 2) Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dan TLRHP BPK RI pada Unit Organisasi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga dapat tercapainya target kinerja Inspektorat V.

1.6. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Inspektorat V Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini meliputi penjelasan umum organisasi, isu/permasalahan utama terkait pengendalian intern dan pengawasan intern, serta aspek strategis Inspektorat Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, pada bab ini juga membahas terkait pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki, mencakup SDM, sarana dan prasarana, serta potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber daya yang dimiliki.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja Inspektorat V Tahun 2025, dan target 2025 menurut Renstra.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, pemanfaatan laporan kinerja, penghargaan, dan hasil survei kepuasan masyarakat.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Daftar Penghargaan yang Diperoleh, Metode Pengukuran Kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, serta Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029, Visi Kementerian Pekerjaan Umum adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

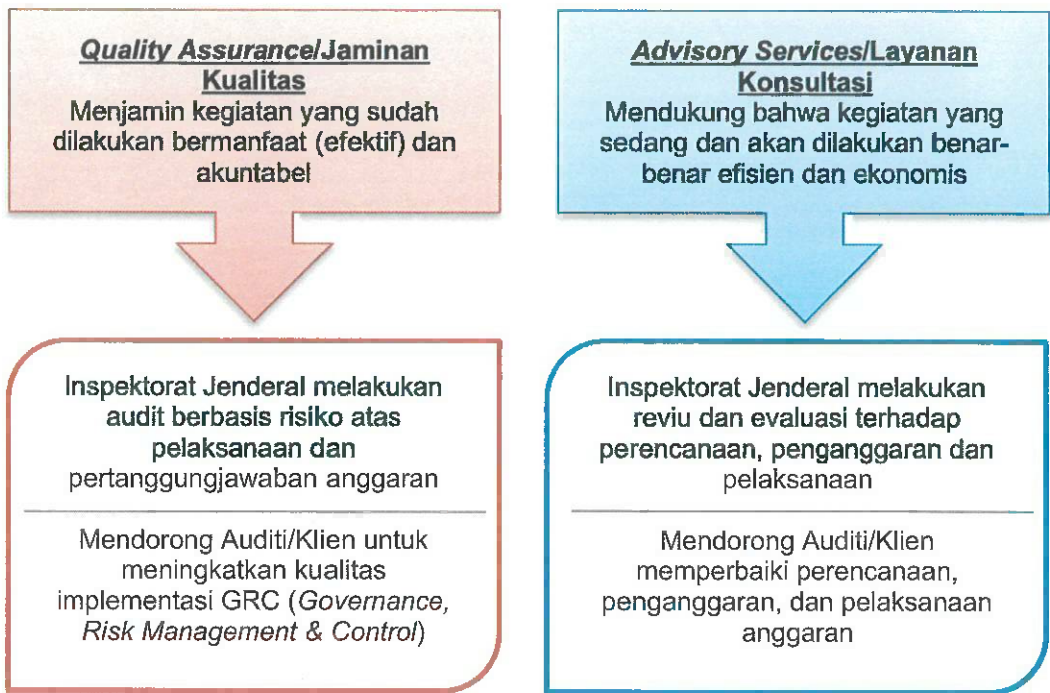
Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Pekerjaan Umum yang andal dan berkelanjutan yang selaras dengan prioritas nasional, maka Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan Misi Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan rumusan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029. Adapun Misi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
- c. Meningkatkan akses infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
- d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;
- f. Memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel; dan
- g. Meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan:

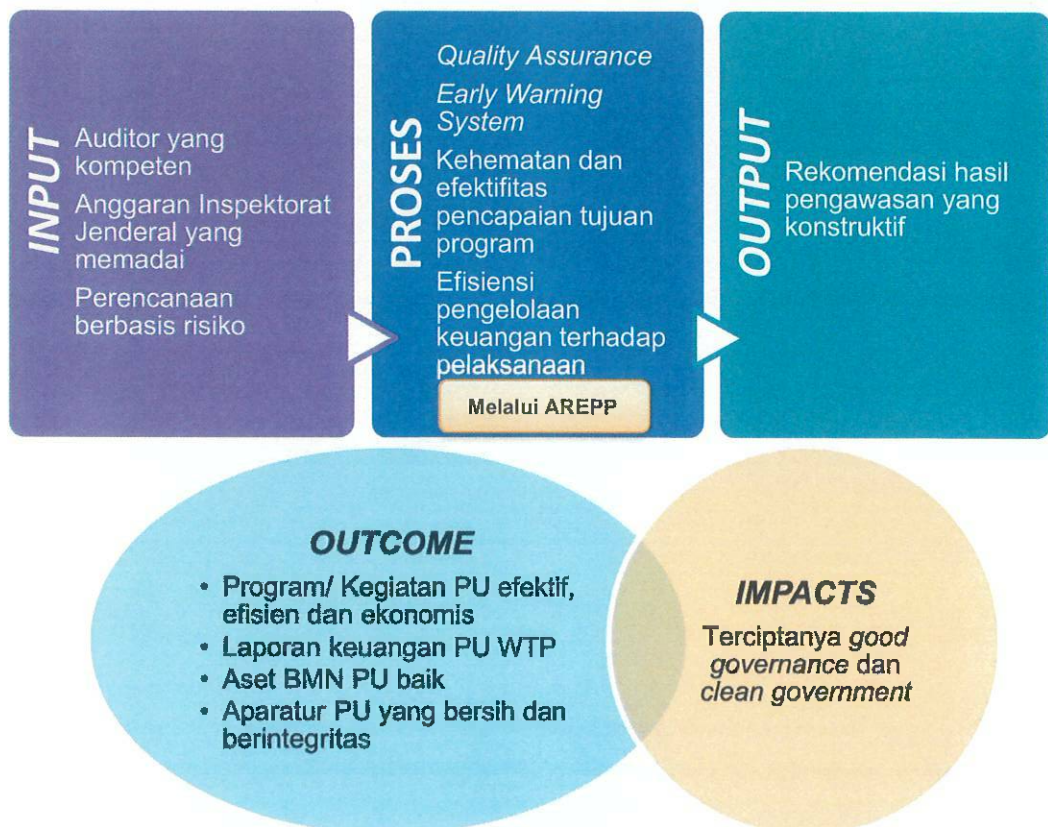
“KUALITAS PENGAWASAN DALAM RANGKA PENGAWALAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”

Inspektorat Jenderal melaksanakan pengendalian intern melalui kegiatan pengawasan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai *quality assurance*/penjamin kualitas dan *advisory services*/layanan konsultasi.



Gambar 2.1 Dwiperan Inspektorat Jenderal

Penjabaran peran dan layanan Inspektorat Jenderal ke dalam kerangka logis Portofolio Inspektorat Jenderal adalah:



Gambar 2.2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal

Tujuan program Inspektorat Jenderal tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi tujuan Inspektorat V yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG BERKUALITAS TERHADAP PENYELENGGARAAN DUKUNGAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN SERTA KEGIATAN *MANDATORY*”

2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi

Inspektorat V sebagai bagian dari Inspektorat Jenderal yang bertanggung jawab atas Pengawasan Dukungan Manajemen dan *Mandatory* Kementerian Pekerjaan Umum, mendukung pencapaian tujuan organisasi yaitu “Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya”.

Arah kebijakan dan strategi Inspektorat V disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal, yaitu pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan infrastruktur PUPR yang tepat mutu, tepat harga, dan tepat waktu, serta dilaksanakan dengan tertib administrasi keuangan dan tertib penatausahaan barang milik negara sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi pengawasan tersebut menekankan pada:

1. Arah Prioritas dan Strategi Pembangunan Nasional, Penugasan Baru dan/atau Penugasan Tambahan, Tugas Direktif dari Presiden

Arah prioritas dan strategi pembangunan nasional ditentukan dalam tahap perencanaan dalam rangka mempercepat pembangunan nasional dan mencapai tujuan bernegara sesuai dengan visi dan misi presiden serta wakil presiden. Arah prioritas pembangunan nasional harus selalu relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik terkini dan seiring dengan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Kementerian PU merupakan instansi dalam pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada lingkup strategis dapat menyebabkan perubahan arah prioritas dan strategi pembangunan nasional yang dapat mempengaruhi prioritas pembangunan dan/atau menyebabkan penugasan baru dan/atau penugasan tambahan, tugas direktif dari Presiden dalam bidang pekerjaan umum. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU harus selaras dan adaptif terhadap dengan hal tersebut.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi ini adalah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menerapkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan mempertimbangan isu strategis terkini serta berkoordinasi dengan APIP lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan. Dalam pelaksanaannya, PKPT harus dapat bersifat adaptif terhadap perubahan prioritas dan lingkungan strategis agar APIP dapat terus memberi nilai tambah bagi pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur. Dalam mendukung kebijakan tersebut, Inspektorat V berperan melaksanakan pengawasan intern atas penyelenggaraan program dan kegiatan dukungan manajemen serta urusan *mandatory* Kementerian Pekerjaan Umum agar tetap selaras dengan arah prioritas pembangunan nasional, penugasan baru dan/atau penugasan tambahan, serta tugas direktif Presiden, melalui pemberian *assurance* dan *consulting* pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia guna mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian PU.

2. Pelaksanaan Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Organisasi

Inspektorat Jenderal selaku APIP telah melakukan upaya peningkatan kapabilitas sejak Tahun 2015, melalui serangkaian upaya untuk memenuhi gap kapabilitas dari Level 2 IACM (Hasil *Quality Assurance* oleh BPKP Tahun 2011 dan 2017), Level 3 Dengan Catatan pada Tahun 2019, Level 3 dengan skor 3,53 pada Tahun 2022, hingga mencapai Level 4 dengan skor 4,06 pada tahun 2023 dan 2024.

Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal berada pada Level 4 (skor 4,06), dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Rincian Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan SDM	4	0,7200
2	Praktik Profesional	4	0,8100
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,2700
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,2400
5	Struktur dan Tata Kelola	4	0,5200
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	3	1,500
Simpulan Entitas		4	4,060

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP, khususnya elemen Peran dan Layanan, kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi ini adalah:

- Menyusun PKPT dengan memrogramkan pengawasan terhadap program strategis lintas sektoral secara konsisten dan berkelanjutan;
- Memberikan dan memantau tindak lanjut rekomendasi strategis yang fokus terhadap perbaikan 3E dalam rangka perbaikan GRC secara keseluruhan sekaligus menjadi *early warning system* sehingga hasil pengawasan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi;
- Memberi layanan konsultasi sehingga dapat menjalankan peran sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan dan *trusted advisor* bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi.

Inspektorat V berperan melaksanakan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan *Mandatory* Kementerian PU secara konsisten dan berkelanjutan untuk mendorong perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern serta memberikan nilai tambah bagi organisasi

3. Optimalisasi Tata Kelola Hubungan Kerja antara Kepatuhan Intern Unit Organisasi selaku *Second Line of Defense* dan APIP selaku *Third Line of Defense* dalam Sistem Pengendalian Intern

Tantangan dalam model 3 Lini Pengawasan Internal adalah pola koordinasi dan komunikasi yang efektif antara tiga lini pengawasan dalam melaksanakan pengawasan. Belum adanya kebijakan yang mengatur pola koordinasi dan komunikasi antara masing-masing lini menyebabkan terjadi tumpang tindih peran atau bahkan kekosongan peran, miskomunikasi, dan kesenjangan informasi antara masing-masing lini. Hal ini dapat menghambat integrasi pengawasan dan menurunkan efektivitas pengendalian internal secara keseluruhan. Oleh karena

itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang sistematis, pemahaman peran yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi untuk memastikan sinergi di antara ketiga lini tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara akuntabel dan transparan.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- a. Menyusun pedoman yang mengatur tata hubungan kerja antara Kepatuhan Intern Unit Organisasi selaku *second line of defense* dan APIP selaku *third line of defense*. Perlu dibangun pola koordinasi dan komunikasi yang efektif, kolaborasi yang sinergis, dan pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing dalam sistem pengendalian intern. Peran dan wewenang masing-masing lini perlu diuraikan dengan jelas dan memadai agar pengawasan internal dapat berjalan dengan efektif terhadap seluruh unsur tanpa terjadi tumpang tindih dan/atau kekosongan pengawasan. Dengan demikian akan terbangun tata kelola hubungan kerja yang kuat dan sinergis yang akan meningkatkan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko di Kementerian PU.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi atas ketersediaan pedoman yang mengatur hubungan kerja antara Unit Kepatuhan Intern (UKI) dan Inspektorat Jenderal. Diperlukan penyusunan dan pengembangan pedoman dimaksud sebagai dasar pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang terintegrasi, termasuk pengembangannya pada level hubungan kerja antara Unit Organisasi dan Inspektorat Jenderal.

- b. Berkoordinasi dengan Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah selaku koordinator penyusun Rencana Strategis Kementerian PU terkait usulan penyeragaman indikator kinerja Unit Kepatuhan Intern. Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk mendorong harmonisasi indikator kinerja dan mekanisme pemantauan kinerja pada level Unit Organisasi dan Inspektorat Jenderal sehingga tercipta keselarasan peran, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengendalian intern di lingkungan Kementerian PU.

Inspektorat V berperan memperkuat sinergi dengan Unit Kepatuhan Intern pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui koordinasi, pertukaran informasi, dan harmonisasi pelaksanaan pengawasan guna meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

4. Optimalisasi Budaya Sadar Risiko dan Integrasi Pengelolaan Risiko dalam Pelaksanaan Tata Kelola dalam Rangka Peningkatan Sistem Pengendalian Intern

Hasil evaluasi BPKP tahun 2024 menunjukkan bahwa Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kementerian Pekerjaan Umum telah mencapai Level 4, menandakan implementasi kebijakan pengelolaan risiko yang cukup matang meskipun belum sepenuhnya optimal. Pengendalian risiko telah mendukung pencapaian tujuan organisasi, namun masih perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi serta mengoptimalkan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat *transfer knowledge* dan kesadaran dalam penerapan manajemen risiko, serta pemanfaatan hasil penilaian risiko korupsi yang belum sepenuhnya berdampak nyata. Perbaikan tata kelola manajemen risiko perlu terus dilakukan, dengan menekankan integrasi manajemen risiko ke dalam tata kelola organisasi serta optimalisasi budaya sadar risiko untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- a. Mendorong pelaksanaan sosialisasi penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern pada seluruh unit organisasi sampai dengan unit kerja terkecil;
- b. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, memberikan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan manajemen risiko, serta memantau tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut;
- c. Melakukan penjaminan kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat, memberikan *area of improvement* pelaksanaan SPIP, serta memantau tindak lanjut terhadap *area of improvement* tersebut.

Inspektorat V berperan melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memantau tindak lanjut pengelolaan risiko pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia guna mendukung peningkatan maturitas SPIP dan budaya sadar risiko.

5. Optimalisasi Pengelolaan SDM Bidang Pengawasan dalam Segi Pemenuhan Formasi dan Pengembangan Kompetensi Sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan serta Tugas dan Fungsi Masing-Masing Pegawai

Jumlah pegawai Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Kementerian Pekerjaan Umum masih belum memenuhi formasi yang ditetapkan, sehingga kapasitas pengawasan belum optimal. Selain itu, kompetensi pegawai JFA juga belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan, yang dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah optimalisasi pengelolaan SDM di bidang pengawasan, baik dalam pemenuhan formasi maupun pengembangan kompetensi yang sesuai dengan standar jabatan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan secara menyeluruh serta memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai JFA di lingkungan Kementerian PU.

Inspektorat V berperan mendukung pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM pengawasan melalui pemantauan peningkatan kompetensi auditor dan pengelolaan sumber daya pengawasan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bagian Kepegawaian, Umum, dan Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal secara efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan intern yang berkualitas.

6. Pengembangan Teknologi Informasi Pemantauan dan Pengawasan Berkelanjutan atau *Continuous Audit–Continuous Monitoring* beserta Keamanan Data Digital

Continuous Audit–Continuous Monitoring (CACM) merupakan wujud nyata implementasi Teknologi Informasi dalam pengawasan intern sebagai bagian dari SPBE Kementerian PU yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan intern. *Continuous Auditing* adalah pendekatan audit dengan otomasi dan teknologi informasi untuk terus-menerus mengevaluasi data, *Continuous Monitoring* adalah strategi pemantauan yang melibatkan penggunaan alat otomatis untuk memberikan visibilitas data terkini terhadap kinerja, kepatuhan, dan risiko dalam suatu organisasi.

Penggunaan CACM dapat mendukung pengaksesan data yang valid dan analisis secara *realtime* sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan pengawasan, meningkatkan kualitas pengawasan, dan mendukung pengambilan keputusan oleh Pimpinan. Akan tetapi, penggunaan CACM juga dapat menimbulkan risiko lain berupa serangan siber yang harus dimitigasi, diantaranya

berupa kebocoran data, pengaksesan data secara ilegal, kerentanan sistem dan perangkat lunak, dan lain sebagainya.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- a. Mengembangkan CACM sesuai dengan kebutuhan pimpinan dan proses bisnis pengawasan Inspektorat Jenderal;
- b. Melaksanakan tata Kelola SPBE Inspektorat Jenderal;
- c. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengguna tentang risiko serangan siber.

Inspektorat V berperan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan intern, termasuk penggunaan aplikasi pengawasan, analisis data, dan *Continuous Audit–Continuous Monitoring (CACM)*, serta mendorong penerapan tata kelola keamanan informasi pada proses pengawasan.

7. Banyaknya Pengaduan Proses Pelaksanaan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Rendahnya persepsi masyarakat terhadap kepatuhan terhadap peraturan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Kementerian PU tercermin dari banyaknya *pengaduan* terkait proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya penguatan pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan PBJ.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- a. Penyusunan produk hukum Penanganan Pengaduan Masyarakat yang bersifat menyeluruh untuk Kementerian PU sebagai bagian dari perbaikan produk hukum yang sudah ada;
- b. Penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan dalam hal pengaduan terbukti;
- d. Penguatan program pemberantasan korupsi seperti pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, pengendalian gratifikasi, implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pencegahan dan penanganan benturan kepentingan, dan lain sebagainya;
- e. Keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Inspektorat V berperan dalam penanganan dan pengawasan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta mendorong penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas melalui kegiatan pengawasan dan pencegahan korupsi.

8. Optimalisasi Sinergi dan Kolaborasi Pengawasan

Optimalisasi sinergi dan kolaborasi pengawasan merupakan langkah strategis dalam pengawasan dan pengawalan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah dan menindaklanjuti potensi tindakan *fraud*. Dengan memperkuat koordinasi, berbagi informasi, serta melakukan asistensi dan pendampingan hukum, diharapkan risiko penyimpangan dapat diminimalisir sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Sinergi dan kolaborasi dilakukan melalui koordinasi yang berkelanjutan antara APIP (Inspektorat Jenderal dan BPKP), lembaga pengawasan eksternal seperti BPK dan KPK, serta aparat penegak hukum. Pendekatan ini juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi bersama dan pengembangan sistem pelaporan yang saling terintegrasi guna meminimalkan duplikasi pengawasan.

Kegiatan koordinasi dengan mitra instansi eksternal Kementerian PU antara lain dengan melaksanakan kerja sama pengawasan dan pengamanan

penyelenggaraan Infrastruktur Kementerian PU dengan pihak BPKP dan APH, pelaksanaan tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh KPK, koordinasi penanganan pengaduan baik dengan APH maupun lembaga lain seperti Badan Ombudsman dan KPPU, dan pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan APIP lain, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, LKPP, KPPU dan PPATK.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam mengoptimalkan koordinasi antara lain dengan menyusun, mereviu, dan/atau memperbaiki kerja sama dengan pihak terkait di bidang pengawasan serta melakukan identifikasi risiko kemitraan terhadap pencapaian sasaran program ataupun sasaran kegiatan.

Inspektorat V berperan memperkuat koordinasi dan kolaborasi pengawasan dengan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, APIP lainnya, BPKP, BPK, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan intern serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2. Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025, dirumuskan 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pekerjaan Umum. Inspektorat Jenderal menjalankan program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program (SP) **“Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya”**. Sasaran Program ini akan berkontribusi dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum yaitu **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya”** (SS-06).

Program Dukungan Manajemen merupakan program Inspektorat Jenderal yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur atau administrasi pemerintahan. Inspektorat Jenderal tidak memiliki Program teknis yang merupakan program-program Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).

Sasaran Program tersebut didukung oleh Peta Strategi Inspektorat Jenderal yang dijelaskan dalam Peta Strategi berikut:

Stakeholders	<p>(SS-06) Kementerian Pekerjaan Umum Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya</p>
Customers	<p>SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</p>



Gambar 2.3 Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Seperti dijabarkan dalam Gambar Peta Strategi di atas, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*customers*) agar dapat terpenuhi dan untuk memenuhi harapan *stakeholders*, Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam *internal process* dan *learning and growth* dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai (SK) berikut:

Kegiatan 1 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan

SK 1 Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Kegiatan 2 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

SK 2.1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I;

SK 2.2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II;

SK 2.3 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III;

SK 2.4 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV;

SK 2.5 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V;

SK 2.6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI.

Inspektorat V memiliki kegiatan berupa Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU di Wilayah Pengawasan Inspektorat V yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SIBB dan Bina Konstruksi) dan *Mandatory*, dengan Sasaran Kegiatan berupa Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V.

Sasaran Kegiatan tersebut memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V dengan Subindikator Kinerja Kegiatan yaitu:

- a. Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern proses AREPP Inspektorat V;
- b. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat V;
- c. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat V
- d. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat V;
- e. Tingkat Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi;
- f. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat V;
- g. Predikat SAKIP Inspektorat V;
- h. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V;
- i. Transformasi Digital Inspektorat V;
- j. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat V.

Subindikator Kinerja Kegiatan tersebut menjadi komitmen pimpinan Inspektorat V untuk dilaksanakan, diukur dan dipantau setiap tahun serta didokumentasikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

2.2.1. Perjanjian Kinerja Awal

Pada Bulan Januari Tahun 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur I–VI untuk Tahun Anggaran 2025. Penetapan Perjanjian Kinerja Awal telah mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja Inspektorat V Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2025 (PK Awal)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		BASELINE 2024	TARGET 2025
PROGRAM: Dukungan Manajemen			
KEGIATAN 2: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum			
SASARAN KEGIATAN 2.5: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V		97%	80%
1.	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	94,42	94,43
2.	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat V	100%	85,00%
3.	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat V	98,55%	85,00%
4.	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat V	91,14%	91,20%
5.	Tingkat Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	96,22%	95,49%
6.	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat V	95,48%	100,00%
7.	Predikat SAKIP Inspektorat V*	-	A (Nilai 81,56)
8.	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V	Level 4 (Nilai 78,35)	Level 4 (Nilai 78,35)

*Subindikator Kinerja Kegiatan baru di Tahun 2025

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal Inspektorat V Tahun 2025 dan Lembar Konfirmasi Indikator & Target Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025–2029

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum di Wilayah Pengawasan Inspektorat V memiliki anggaran sebesar Rp2.973.006.000,00.

2.2.2. Perjanjian Kinerja Akhir

Pada Bulan Desember Tahun 2025, telah dilakukan penandatanganan revisi terakhir Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur I–VI untuk Tahun Anggaran 2025. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Inspektorat V revisi 29 Desember 2025:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi ke-3 Inspektur V Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		BASELINE 2024	TARGET 2025
PROGRAM: Dukungan Manajemen			
KEGIATAN 2: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum			
SASARAN KEGIATAN 2.5: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V		97%	80%
1.	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	94,42	94,43
2.	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat V	100%	85,00%
3.	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat V	98,55%	85,00%
4.	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat V	91,14%	91,20%
5.	Tingkat Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	96,22%	95,49%
6.	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat V	95,48%	100,00%
7.	Predikat SAKIP Inspektorat V*	A (Nilai 80,00)	A (Nilai 81,56)
8.	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V	Level 4 (Nilai 75,00)	Level 4 (Nilai 78,35)
9.	Transformasi Digital Inspektorat V**	-	30,00
10.	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat V**	-	30,00

*Subindikator Kinerja Kegiatan baru di Tahun 2025

**Penambahan Subindikator Kinerja Kegiatan dari Perjanjian Kinerja Awal

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat V Tahun 2024

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum di Inspektorat V memiliki anggaran senilai Rp2.328.900.000,00.

2.2.3. Kronologi Perubahan PK

Perjanjian Kinerja Awal Inspektorat V untuk Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan target pada Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 dan anggaran pada DIPA Awal Inspektorat Jenderal.

Pada Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) kali perubahan Perjanjian Kinerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Revisi ke-1 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tanggal 4 Juli 2025
Terdapat perubahan pejabat yaitu Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum sehingga menyebabkan revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat V Tahun 2025.
- b. Revisi ke-2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tanggal 30 September 2025
 - 1) Terdapat perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat V, yaitu penyesuaian Target Sasaran Kegiatan Inspektorat V Bulan September Tahun 2025 sesuai dengan Surat Inspektur Jenderal Nomor

PA 0101-IJ/808 Tanggal 14 Agustus 2025 Hal Penyampaian Koreksi Data Target Kinerja Inspektorat Jenderal pada Rancangan Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2025–2029 dengan menambahkan target pada 2 (dua) Subindikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- a) Transformasi Digital Inspektorat V;
- b) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat V.

2) Terdapat revisi ke-2 Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat V, serta pergeseran anggaran Inspektorat V menjadi Rp2.328.900.000,00 (sebelum Rp2.973.006.000,00) untuk penyesuaian anggaran untuk kebutuhan kegiatan prioritas di akhir tahun 2025.

sehingga menyebabkan revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat V Tahun 2025.

- c. Revisi ke-3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tanggal 29 Desember 2025

Terdapat perubahan Capaian *Output* Kegiatan Inspektorat akibat Revisi ke-3 Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat V, sehingga menyebabkan revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat V Tahun 2025.

2.4. Metode Pengukuran

Metode Pengukuran Sasaran Kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 dari 10 (sepuluh) subindikator kinerja kegiatan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan Berdasarkan Renstra

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025
Kegiatan 2: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum		
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	78,78%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern proses AREPP Inspektorat V (20%)	94,43
	2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat V (20%)	85,00%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat V (20%)	85,00%
	4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti (10%)	91,20%
	5. Tingkat Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi (5%)	95,49%
	6. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat V (5%)	100,00%
	7. Predikat SAKIP Inspektorat V (5%)	A (Nilai 81,56)
	8. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V (5%)	Level 4 (Nilai 78,35)
	9. Transformasi Digital Inspektorat V (5%)	30,00
10. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat V (5%)	30,00	

Metode pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 maupun Dokumen Rencana Strategis Inspektorat V Tahun 2025–2029. Indikator tersebut sudah melalui evaluasi dan reviu baik oleh internal Inspektorat Jenderal maupun eksternal seperti Biro Perencanaan bahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sehingga indikator-indikator tersebut sudah memenuhi syarat IKK yang *SMART* (*Specific, Measureable, Achievable, Relevant* dan *Time Bound*). Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP**, diperoleh dari data hasil pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, *non reciprocal*) atas penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya).

2. **Tingkat Pelaksanaan Pengawasan**, diperoleh dari persentase pelaksanaan PKPT dengan pembobotan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan Terprogram : 50%
 - b. Pengawasan Tidak Terprogram : 50%
 Jumlah LHP dibagi dengan target LHP Inspektorat V pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), kumulatif bulanan (sumber data sistem informasi ePTLHP).
3. **Tingkat Penanganan Pengaduan**, diperoleh dari perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengaduan, dengan bobot sesuai tahapan pengaduan sebagai berikut:
 - a. SPT : 25%
 - b. Konsep LHADTT : 50%
 - c. LHADTT dan SP : 100%
4. **Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti**, diperoleh dari jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal pada Unit Organisasi yang dibina yang telah ditindaklanjuti, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi, dengan perbandingan:
 - a. Itjen : 50% (Belum Tuntas: 0%, Tuntas: 100%)
 - b. BPKP : 25% (Belum Tuntas: 0%, Tuntas: 100%)
 - c. BPK : 25% (Belum Tuntas: 0%, Memadai sesuai Hasil Verifikasi Itjen: 75%, Tuntas pada SIPTL: 100%)
5. **Tingkat Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi**, diperoleh dari perbandingan nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap Hasil Evaluasi BPKP.
6. **Tingkat Perencanaan UPKPT**, diperoleh dari tingkat pemenuhan dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat V yang disusun tepat waktu.
7. **Predikat SAKIP**, diperoleh dari Kategori Nilai Hasil Evaluasi implementasi atas AKIP Inspektorat V.
8. **Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2**, diperoleh dari Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V.
9. **Transformasi Digital Inspektorat V**, diperoleh dari Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital Inspektorat V.
10. **Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat V**, diperoleh dari Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat V.

2.5. Target Kinerja Tahun yang Dilaporkan Menurut Rencana Strategis

Dalam perencanaan kinerja yang bersifat *top down* diperlukan peta/pohon kinerja yang berasal dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program dari Unit Organisasi Inspektorat Jenderal seperti yang terlihat pada bagan berikut:

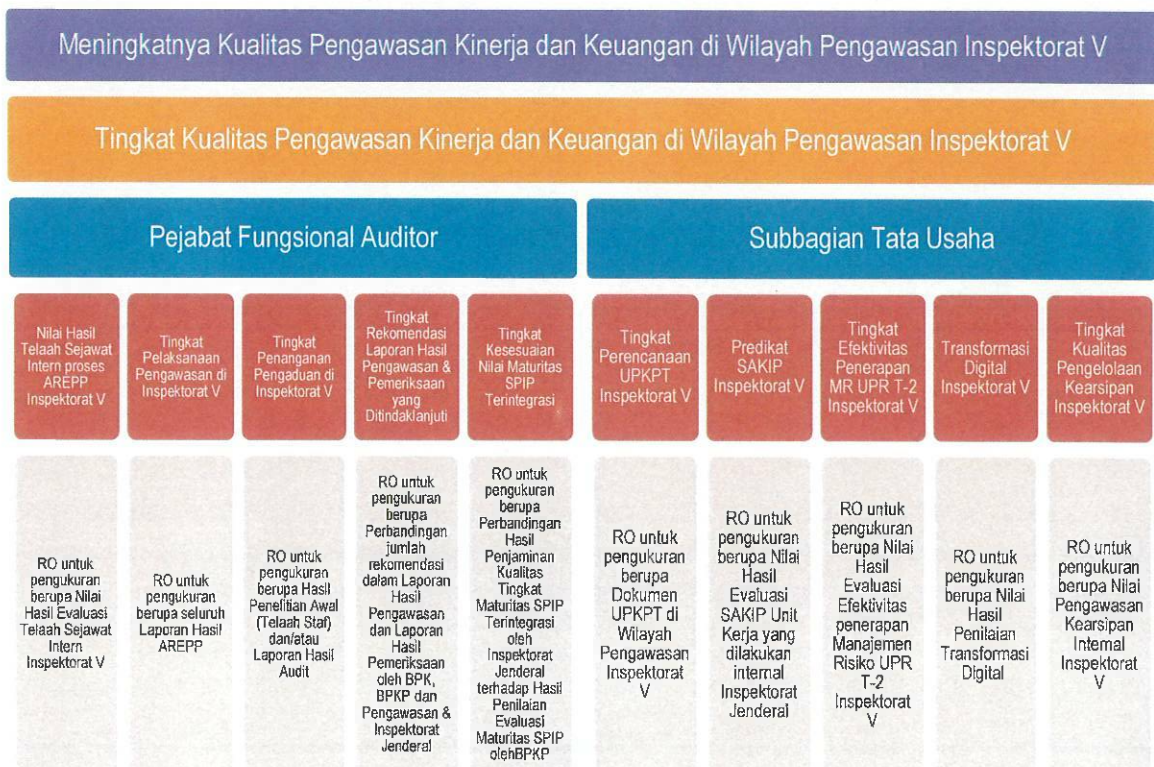


Gambar 2.4 Indikator Kinerja Program Unor Inspektorat Jenderal

Dari Indikator Kinerja program di atas, akan diuraikan pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal berupa Kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Dalam hal ini, Inspektorat V memiliki Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V” dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V”.

Dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja Inspektorat V yang telah ditandatangani oleh Inspektur V dalam dokumen Perjanjian Kinerja, maka sasaran kinerja tersebut perlu diturunkan pada seluruh pegawai/individu di Inspektorat V.

Dalam melaksanakan penjenjangan kinerja (*cascading*) ini, maka perlu diketahui hubungan/keterkaitan antara Sasaran Kegiatan Inspektorat V dengan Rincian *Output* (RO) tugas para pegawai/individu sesuai dengan fungsinya, baik sebagai Pejabat Fungsional Auditor maupun Subagian Tata Usaha, yang dapat dilihat pada Gambar 2.5 di bawah ini:



Gambar 2.5 Keterkaitan dan *Cascading* Indikator Kinerja Kegiatan dengan *Rincian Output* (RO) pada Inspektorat V

Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V merupakan fungsi dan tugas Inspektorat V yang diukur dengan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V yang terdiri dari 10 (sepuluh) Subindikator Kinerja Kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan AREPP akan ditugaskan kepada Pejabat Fungsional Auditor atau pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas AREPP yang telah memenuhi ketentuan, dengan sebaran target Rincian *Output* (RO) disesuaikan dengan Rencana Penugasan yang terdapat pada Lampiran Pedoman Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan 2025. Tampilan target Rincian *Output* berdasarkan Lampiran II Program Kerja Pengawasan Tahunan 2025.

Tujuan dari *cascading* adalah agar *output* dapat dibagi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dalam penentuan target ini, Pejabat Fungsional Auditor dapat ditugaskan sesuai dengan jenjang jabatannya atau turun setingkat dari jenjang jabatannya sesuai dengan ketentuan pedoman teknis Jabatan Fungsional Auditor.

2.4.1. Reviu Capaian Target Renstra

Sesuai Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan umum Tahun 2025–2029, Inspektorat Jenderal mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis ke-6 (SS-06) Kementerian Pekerjaan umum, yaitu **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya** dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis **Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum**. Inspektorat Jenderal menjalankan tugas dan fungsi pengawasan intern melalui Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program yaitu **Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya** yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen);
2. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU.

Inspektorat V bertanggungjawab atas pemenuhan Sasaran Kegiatan 2.5 yaitu **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V** dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.5 yaitu **Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V**. Capaian target Rencana Strategis Inspektorat V Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5 Capaian Target Renstra Inspektorat V Tahun 2025–2029

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V				
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	2025	78,78%	84,08%	106,73%
	2026	80,89%	-	-
	2027	83,00%	-	-
	2028	85,12%	-	-
	2029	87,23%	-	-

Capaian atas target Rencana Strategis Inspektorat V Tahun 2025–2029 merupakan faktor penting dalam penentuan *baseline* untuk perencanaan tahun berikutnya. Dalam proses pelaksanaannya, hal-hal yang mendukung keberhasilan dan menghambat capaian pada tahun sebelumnya dapat menjadi masukan untuk menyusun kebijakan dan strategi dengan tujuan peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal.

2.4.2. Target Kinerja Berdasarkan Renstra

Target Kinerja pada Sasaran Kegiatan Inspektorat V di dalam Renstra Inspektorat V Tahun 2025–2029 digambarkan pada Tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6 Target Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat V

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/CARA PENGUKURAN	SATUAN	2025		2026		2027		2028		2029	
		Renstra	PK	Renstra	PK	Renstra	PK	Renstra	PK	Renstra	PK
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN											
KEGIATAN: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V											
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	%	78,78	84,31	80,89	-	83,00	-	85,12	-	87,23	-
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern proses AREPP Inspektorat V (20%)	Nilai	94,43	94,43	94,44	-	94,45	-	94,46	-	94,47	-
2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat V (20%)	%	85,00	85,00	86,00	-	87,00	-	88,00	-	89,00	-
3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat V (20%)	%	85,00	85,00	87,00	-	89,00	-	91,00	-	93,00	-
4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat V (10%)	%	91,20	91,20	91,30	-	91,40	-	91,50	-	91,60	-
5. Tingkat Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi (5%)	%	95,49	95,49	95,50	-	95,51	-	95,52	-	95,53	-
6. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat V (5%)	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
7. Predikat SAKIP Inspektorat V (5%)	Kategori	A (Nilai 81,56)	A (Nilai 81,56)	A (Nilai 81,57)	-	A (Nilai 81,58)	-	A (Nilai 81,59)	-	A (Nilai 81,60)	-
8. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V (5%)	Level	Level 4 (Nilai 78,35)	Level 4 (Nilai 78,35)	Level 4 (Nilai 78,36)	-	Level 4 (Nilai 78,37)	-	Level 4 (Nilai 78,38)	-	Level 4 (Nilai 78,39)	-
9. Transformasi Digital Inspektorat V (5%)	Nilai	30,00	30,00	35,00	-	40,00	-	45,00	-	50,00	-
10. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat V (5%)	Nilai	30,00	30,00	35,00	-	40,00	-	45,00	-	50,00	-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, dan kapabilitasnya dalam mengelola kapasitas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi yang dimiliki Inspektorat V digolongkan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang dikelola.

3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat V Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan melalui Surat Inspektur I Nomor PW 0204-Ia/09 Tanggal 12 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2024 pada Inspektorat V, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi atas AKIP Inspektorat V Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024 mendapatkan kategori A (Memuaskan), dengan nilai 88,45.

Pencapaian kinerja ditahun 2025 tidak lepas dari *feedback* (umpan balik) yang dihasilkan dari Evaluasi Laporan Kinerja Inspektorat V untuk tahun 2024. Beberapa umpan balik tersebut dijadikan bahan *input* dalam pelaksanaan dan pelaporan kinerja ditahun 2025. Berikut ini adalah tindak lanjut hasil Evaluasi Laporan Kinerja tahun sebelumnya:

Tabel 3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2024

No.	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut/Upaya Yang Telah Dilakukan
1.	Perencanaan Kinerja	Melakukan penyempurnaan implementasi SAKIP di Inspektorat V berupa inovasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja secara kreatif dan menjadi model bagi instansi lain.	Telah dilakukan penyempurnaan implementasi SAKIP di Inspektorat V berupa penyusunan inovasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja.
2.	Pengukuran Kinerja		
3.	Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan dan mendokumentasikan reviu berjenjang dalam penyusunan Laporan Kinerja sehingga dapat dinilai ditahun berikutnya; b. Menyampaikan dokumen Laporan Kinerja dan Monev Bulanan melalui e-SAKIP secara tepat waktu, serta mendokumentasikan proses pengunggahan dokumen Lakin pada <i>website</i> ltjen dan aplikasi e-SAKIP setiap melakukan; c. Menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan kinerja Unit Kerja sejenis yang menyajikan informasi yang akurat/dapat dipertanggungjawabkan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah dilaksanakan dan didokumentasikan reviu berjenjang dalam penyusunan Laporan Kinerja; b. Telah dilaksanakan penyampaian dokumen Laporan Kinerja dan Monev Bulanan melalui e-SAKIP secara tepat waktu, serta pendokumentasi proses pengunggahan dokumen Lakin pada <i>website ltjen</i> dan aplikasi e-SAKIP; c. Telah disajikan informasi terkait analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan kinerja Unit Kerja sejenis yang menyajikan informasi yang akurat/dapat dipertanggungjawabkan.
4.	Evaluasi Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyajikan informasi terkait penyebab penurunan efektivitas dan efisiensi kinerja apabila terdapat penurunan pada Laporan Kinerja sebagai <i>lesson learned</i> tahun berikutnya; b. Meningkatkan capaian kinerja ditahun berikutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah disajikan informasi terkait penyebab penurunan efektivitas dan efisiensi kinerja apabila terdapat penurunan pada Laporan Kinerja; b. Telah disajikan capaian kinerja pada Tahun 2025 beserta penjelasannya.

3.2. Capaian Kinerja

Pada Laporan Kinerja ini disampaikan pencapaian kinerja Inspektorat V yang diukur dengan metode pengukuran pada:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029;
- b. Perjanjian Kinerja Revisi ke-3 Inspektorat V Tahun 2025.

3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Capaian Sasaran Kegiatan 2.5, Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2.5 dengan pelaksana Inspektorat V yaitu "Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V". Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Revisi ke-3 Inspektorat V Tahun 2025 dan, Capaian

Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan indikator dan capaian sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Sasaran Kegiatan Inspektorat V Tahun 2025 (Renstra dan PK)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ CARA PENGUKURAN	BOBOT SETELAH REVISI	TARGET 2025	REALISASI					
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	2025	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V		78,78%	58,29%	50,24%	50,22%	84,30	84,08	
	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 Tanggal 31 Januari 2025	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern proses AREPP Inspektorat V	20%	94,43	0,00	0	0	94,34	93,46
		2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat V	20%	85,00%	57,89%	62,50%	86,84%	94,07%	94,07%
		3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat V	20%	85,00%	100,00 %	50,00%	50,00%	89,29%	89,29%
		4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat V	10%	91,20%	92,96%	94,79%	93,34%	91,26%	91,26%
		5. Tingkat Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	5%	95,49%	95,48%	95,48%	95,48%	95,48%	94,65%
		6. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat V	5%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		7. Predikat SAKIP Inspektorat V	5%	A (Nilai 81,56)	A (Nilai 81,55)	A (Nilai 88,45)	A (Nilai 88,45)	A (Nilai 88,45)	A (Nilai 88,45)
		8. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V	5%	Level 4 (Nilai 78,35)	Level 4 (Nilai 78,34)	Level 4 (Nilai 86,43)	Level 4 (Nilai 86,43)	Level 4 (Nilai 86,43)	Level 4 (Nilai 86,43)
	Berdasarkan Revisi ke-2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Tanggal 30 September 2025	9. Transformasi Digital Inspektorat V*	5%	30,00	-	-	0,00	49,56	49,56
10. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat V*		5%	30,00	-	-	0,00	52,70	52,70	

*Penambahan Subindikator Kinerja Kegiatan baru berdasarkan Revisi ke-2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Tanggal 30 September 2025

Sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/SE/M/2024 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, predikat kinerja Inspektorat V pada bulan Desember adalah **Istimewa** dengan capaian **106,73%**, hal tersebut dilihat dari realisasi IKK 2.5 yaitu sebesar 84,08% dari target 78,78%. Realisasi IKK 2.5 telah mencapai target tahun 2025 yang dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern proses AREPP Inspektorat V Tahun 2025 adalah sebesar 94,46. Nilai hasil telaah sejawat ini berada pada rentang 90-100 yang berarti termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Namun demikian, nilai tersebut belum mencapai target tahunan disebabkan masih terdapat catatan Tim Evaluator terkait aspek penilaian yang perlu diperbaiki oleh Tim Audit Inspektorat V kedepannya;
- Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat V Tahun 2025 adalah sebesar 94,07%. Hal tersebut telah melebihi target yang telah ditentukan;

- c. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat V Tahun 2025 adalah sebesar 89,29%. Hal tersebut telah melebihi target yang telah ditentukan;
- d. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat V Tahun 2025 adalah sebesar 91,26%. Hal tersebut telah melebihi target yang telah ditentukan;
- e. Tingkat Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 adalah sebesar 94,65%. Penilaian tersebut turun dari Tahun 2024 dikarenakan masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, seperti adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan lingkungan organisasi, optimalisasi peluang untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan, serta perbaikan berkelanjutan atas pengendalian dan pengelolaan risiko korupsi dalam rangka mewujudkan budaya organisasi antikorupsi yang lebih luas.
- f. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat V Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Hal tersebut telah sesuai target yang telah ditentukan;
- g. Predikat SAKIP Inspektorat V Tahun 2025 adalah kategori A dengan nilai 88,45. Hal tersebut telah melebihi target yang telah ditentukan;
- h. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V Tahun 2025 adalah Level 4 dengan nilai 86,43. Hal tersebut telah melebihi target yang telah ditentukan;
- i. Transformasi Digital Inspektorat V Tahun 2025 mendapatkan nilai 49,56. Hal tersebut telah melebihi target yang telah ditentukan;
- j. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat V Tahun 2025 mendapatkan nilai 52,70. Hal tersebut telah melebihi target yang telah ditentukan.

Dari data di atas dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut:

- a. Secara kuantitas dan kualitas pelaporan AREPP untuk Inspektorat V sudah tercapai, terlihat dari indikator Persentase Pengawasan yang telah tercapai serta nilai kualitas pelaporan melalui hasil telaah sejawat yang juga mendapatkan simpulan nilai "Sangat Baik" dengan nilai 93,46. Hal tersebut menunjukkan bahwa standar pelaksanaan AREPP di Inspektorat V telah memenuhi Standar Audit Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI);
- b. Mayoritas indikator kinerja Inspektorat V Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada pelaksanaan pengawasan dan perencanaan UPKPT yang mencapai 100%, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas yang tercermin dari Predikat SAKIP mendapatkan kategori A dengan nilai 88,45 dan Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V mendapatkan Level 4 dengan nilai 86,43.
- c. Nilai transformasi digital dan pengelolaan kearsipan yang masih relatif sedang menunjukkan perlunya penguatan lebih lanjut pada kualitas sistem, integrasi proses, serta peningkatan kompetensi SDM agar capaian kinerja tidak hanya melampaui target, tetapi juga unggul secara mutu.

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan, Inspektorat V menghadapi berbagai hambatan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan konsistensi dan akurasi data dalam pelaporan, seperti pada telaah sejawat internal dan pengawasan, yang memerlukan koordinasi lintas Unit Kerja serta pemanfaatan teknologi secara optimal. Selain itu, peningkatan jumlah pengaduan masyarakat dan kompleksitas tindak lanjut hasil pengawasan dapat menjadi kendala yang memengaruhi efisiensi proses kerja. Meski demikian, dengan strategi yang tepat dan dukungan penuh dari seluruh elemen organisasi, hambatan-hambatan tersebut dapat dikelola untuk menjaga keberlanjutan pencapaian kinerja yang optimal.

Hambatan terkait dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tantangan signifikan dalam mencapai target kinerja Inspektorat V dengan jumlah pegawai sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang serta target kinerja yang harus diselesaikan dan kompleksitas tugas yang beraneka ragam. Hal ini dapat memengaruhi kapasitas pegawai dalam menyelesaikan tugas secara efisien dan tepat waktu, terutama dalam pelaksanaan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Untuk mengatasi hambatan dalam mencapai target kinerja tersebut, terdapat beberapa solusi strategis telah diterapkan oleh Inspektorat V:

1. Koordinasi perbantuan Sumber Daya Manusia dari Unit Kerja lain;
2. Optimalisasi Teknologi Informasi;
3. Penguatan Kolaborasi dan Koordinasi dengan pihak internal dan eksternal Inspektorat V;
4. Penyusunan Rencana Aksi.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Inspektorat V berhasil mencapai bahkan melampaui target kinerjanya. Hal ini menunjukkan kemampuan dalam mengelola tantangan secara efektif melalui optimalisasi peran setiap pegawai, penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, serta pelaksanaan strategi kerja yang efisien. Dengan komitmen dan dedikasi seluruh pegawai, Inspektorat V mampu menjaga produktivitas kerja, memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai rencana, dan mewujudkan hasil yang maksimal. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa hambatan dapat diatasi dengan perencanaan yang matang, kolaborasi yang baik, serta dukungan teknologi yang memadai.

3.2.2. Analisis Capaian *Output* Kegiatan

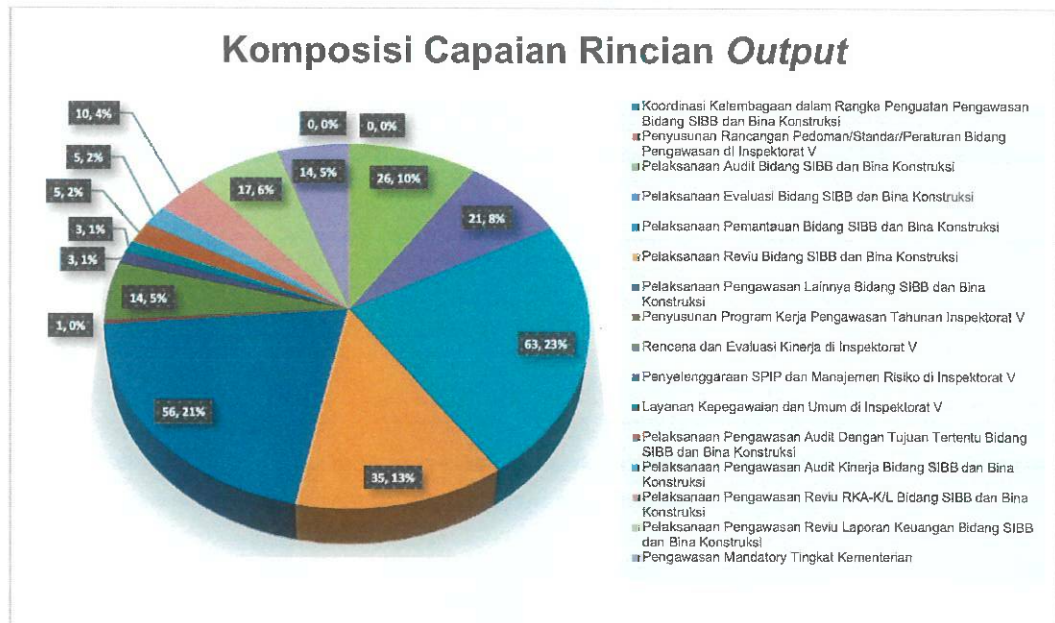
Capaian Sasaran Kegiatan (SK) Tahun 2025 merupakan hasil dari capaian Rincian *Output* (RO) Tahun 2025. Berikut ini adalah capaian Rincian *Output* (RO):

Tabel 3.3 Capaian *Output* Program dan Capaian *Output* Kegiatan Tahun 2025

KODE	OUTPUT/SUB-OUTPUT/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% TERHADAP TARGET
1	2	3	4	9 = 6 + 7	10 = (9/3)x100
7754.AEC	Kerja sama (Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan)				
7754.AEC.005	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat V				
7754.AEC.005.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	Kegiatan	1	0	0
7754.AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar)				
7754.AFA.005	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat V				
7754.AFA.005.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat V	Rancangan	1	0	0
7754.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)				
7754.EBD.051	Layanan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi				
7754.EBD.051.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	Laporan	14	26	185,71%
7754.EBD.051.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	Laporan	26	21	80,77%
7754.EBD.051.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	Laporan	39	63	161,54%
7754.EBD.051.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	Laporan	17	35	205,88%
7754.EBD.051.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	Laporan	42	56	133,33%

KODE	OUTPUT/SUB-OUTPUT/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% TERHADAP TARGET
1	2	3	4	5 = 6 + 7	10 = (9/3)x100
7754.EBD.051.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat V	Laporan	1	1	100,00%
7754.EBD.051.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat V	Laporan	14	14	100,00%
7754.EBD.051.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat V	Laporan	2	3	150,00%
7754.EBD.051.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat V	Laporan	1	3	300,00%
7754.EBD.052	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi				
7754.EBD.052.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	Laporan	12	5	41,67%
7754.EBD.053	Layanan Audit Kinerja Bidang SIBB dan Bina Konstruksi				
7754.EBD.053.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	Laporan	8	5	62,50%
7754.EBD.054	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang SIBB dan Bina Konstruksi				
7754.EBD.054.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	Laporan	10	10	100,00%
7754.EBD.055	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi				
7754.EBD.055.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	Laporan	17	17	100,00%
7754.EBD.061	Layanan Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian				
7754.EBD.061.051.A	Pengawasan <i>Mandatory</i> Tingkat Kementerian	Laporan	14	14	100,00%
Total			219	273	124,66%

Dari tabel di atas maka tampak bahwa pencapaian rincian *output* ditahun 2025 telah melebihi target sebesar 124,66% dari target 2025, dengan komposisi pada Gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Komposisi Capaian Rincian Output

Dari data di atas maka dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut:

- a. Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan belum mencapai target tahunan, yaitu sebanyak 0 Laporan (0,00% dari target tahunan). Terdapat deviasi negatif sebanyak 1 Laporan hal tersebut disebabkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 tidak terdapat pelaksanaan Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan. Proporsi capaian rincian *output* berupa Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan terhadap keseluruhan capaian *output* sebesar 0,00%.
- b. Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan belum mencapai target tahunan, yaitu sebanyak 0 Laporan (0,00% dari target tahunan). Terdapat deviasi negatif sebanyak 1 Laporan hal tersebut disebabkan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang sebelumnya dilaksanakan oleh Inspektorat V pada Tahun 2024 akan dilaksanakan oleh Inspektorat VI selaku penanggung jawab dan menjadi target pada PKPT Tahun 2026 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 171/ND/Is/2025 Tanggal 26 September 2025 Hal Usulan Rencana Penyusunan NSPK Tahun 2026. Proporsi capaian rincian *output* berupa Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan terhadap keseluruhan capaian *output* sebesar 0,00%.
- c. Pelaksanaan Audit oleh Inspektorat V telah mencapai target tahunan, yaitu sebanyak 26 Laporan (185,71% dari target tahunan). Proporsi capaian rincian *output* berupa Pelaksanaan Audit terhadap keseluruhan capaian *output* sebesar 9,52%. Audit yang dilaksanakan adalah Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Penanganan Pengaduan dan Verifikasi (yang diperhitungkan adalah yang dilaksanakan di kantor).
- d. Pelaksanaan Evaluasi oleh Inspektorat V belum mencapai target tahunan, yaitu sebanyak 21 Laporan (80,77% dari target tahunan). Terdapat deviasi negatif sebanyak total 5 Laporan yang sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 yaitu sebanyak 1 Laporan sedang dalam proses penyusunan, 3 Laporan belum disusun dikarenakan pelaksanaan Telaah Sejawat Intern menunggu Laporan Hasil Audit Kinerja selesai disusun, serta 1 Laporan tidak dilaksanakan dikarenakan tidak terdapat permohonan evaluasi dari Unit Organisasi binaan Inspektorat V. Proporsi capaian rincian *output* berupa Pelaksanaan Evaluasi terhadap keseluruhan capaian *output* sebesar 7,69%. Evaluasi yang telah dilaksanakan adalah Evaluasi SAKIP, Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko UPR T-1, Evaluasi Penjaminan Kualitas SPIP, dan Telaah Sejawat.
- e. Pelaksanaan Pemantauan oleh Inspektorat V telah mencapai target tahunan, yaitu sebanyak 63 Laporan (161,54% dari target tahunan). Proporsi capaian rincian *output* berupa Pelaksanaan Pemantauan terhadap keseluruhan capaian *output* sebesar 23,08% yang merupakan salah satu aktivitas pengawasan yang dominan dilaksanakan oleh Inspektorat V pada Tahun 2025. Pemantauan yang dilaksanakan adalah Penilaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas Manajemen Risiko UPR T-1 Tahun Anggaran 2024.
- f. Pelaksanaan Reviu oleh Inspektorat V telah mencapai target tahunan, yaitu sebanyak 35 Laporan (205,88% dari target tahunan). Proporsi capaian rincian *output* berupa Pelaksanaan Reviu terhadap keseluruhan capaian *output* sebesar 12,82%. Reviu yang dilaksanakan berupa Reviu Usulan Revisi Anggaran, Reviu RKBMN, dan Reviu Kaji Cepat.
- g. Pelaksanaan Pengawasan Lainnya oleh Inspektorat V telah mencapai target tahunan, yaitu sebanyak 56 Laporan (133,33% dari target tahunan). Proporsi capaian rincian *output* berupa Pelaksanaan Pengawasan Lainnya terhadap

keseluruhan capaian *output* sebesar 20,52% yang merupakan salah satu aktivitas pengawasan yang dominan dilaksanakan oleh Inspektorat V pada Tahun 2025. Pengawasan lainnya yang dilaksanakan berupa menghadiri undangan sebagai narasumber, menghadiri undangan *workshop*, menghadiri undangan *FGD*, menghadiri undangan rapat/koordinasi, dan Pendampingan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Penunjukan Langsung.

- h. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan telah mencapai target tahunan, yaitu sebanyak 1 Laporan (100% dari target tahunan). Proporsi capaian rincian *output* berupa Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan terhadap keseluruhan capaian *output* sebesar 0,37%.
- i. Rencana dan Evaluasi Kinerja telah mencapai target tahunan, yaitu sebanyak 14 Laporan (100% dari target tahunan). Proporsi capaian rincian *output* berupa Rencana dan Evaluasi Kinerja terhadap keseluruhan capaian *output* sebesar 5,13%.
- j. Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko telah mencapai target tahunan, yaitu sebanyak 3 Laporan (150% dari target tahunan). Proporsi capaian rincian *output* berupa Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko terhadap keseluruhan capaian *output* sebesar 1,10%.
- k. Layanan Kepegawaian dan Umum telah mencapai target tahunan, yaitu sebanyak 3 Laporan (300% dari target tahunan). Proporsi capaian rincian *output* berupa Layanan Kepegawaian dan Umum terhadap keseluruhan capaian *output* sebesar 1,10%.
- l. Pelaksanaan Pengawasan ADTT belum mencapai target tahunan, yaitu sebanyak 5 Laporan (41,67% dari target tahunan). Terdapat deviasi negatif sebanyak 7 Laporan yang sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 sedang dalam proses penyusunan. Proporsi capaian rincian *output* berupa Pelaksanaan Pengawasan ADTT terhadap keseluruhan capaian *output* sebesar 1,83%. Pengawasan ADTT yang telah dilaksanakan adalah Audit Ketaatan, ADTT Penanganan Pengaduan, dan ADTT atas Perencanaan Manfaat, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengadaan Barang/Jasa, dan Hal Lain di Bidang Keuangan pada Satuan Kerja Pusat (yang diperhitungkan adalah yang dilaksanakan di luar kantor).
- m. Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja belum mencapai target tahunan, yaitu sebanyak 5 Laporan (62,50% dari target tahunan). Terdapat deviasi negatif sebanyak 3 Laporan yang sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 sedang dalam proses penyusunan. Proporsi capaian rincian *output* berupa Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja terhadap keseluruhan capaian *output* sebesar 1,83%.
- n. Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L telah mencapai target tahunan, yaitu sebanyak 10 Laporan (100,00% dari target tahunan). Proporsi capaian rincian *output* berupa Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L terhadap keseluruhan capaian *output* sebesar 3,66%.
- o. Pengawasan *Mandatory* Tingkat Kementerian telah mencapai target tahunan, yaitu sebanyak 14 LHP (100% dari target tahunan). Proporsi capaian rincian *output* berupa Pengawasan *Mandatory* Tingkat Kementerian terhadap keseluruhan capaian *output* sebesar 5,13%. Pengawasan *Mandatory* tingkat Kementerian yang telah dilaksanakan berupa Reviu Laporan Keuangan, Reviu Laporan Kinerja, Reviu RKA-K/L, Reviu RKBMN, Evaluasi Penjaminan Kualitas SPIP, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

3.3. Analisis Perbandingan Kinerja

Kinerja organisasi perlu dilakukan analisis perbandingan untuk dilakukan evaluasi tiap tahunnya, baik dengan tahun sebelumnya maupun dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Subbab ini membahas hal tersebut dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Secara umum kinerja pencapaian IKK Inspektorat V pada Tahun 2025 telah mengalami penurunan capaian bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 yang diukur menggunakan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya ditampilkan pada Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat V Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan/Cara Pengukuran	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	87%	97%	111,49	78,78%	84,08%	106,73
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern proses AREPP Inspektorat V	90	94,42	104,91	94,43	93,46	98,97
2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat V*	90%	100,00%	111,11	85,00%	94,07%	110,68
3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat V*	95%	98,55%	103,74	85,00%	89,29%	105,04
4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat V*	65%	91,14%	140,22	91,20%	91,26%	100,06
5. Tingkat Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	95%	95,48%	100,50	95,49%	94,65%	99,12
6. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat V**				100,00%	100,00%	100,00
7. Predikat SAKIP Inspektorat V**				A (Nilai 81,56)	A (Nilai 88,45)	108,45
8. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V**				Level 4 (Nilai 78,35)	Level 4 (Nilai 86,43)	110,31
9. Transformasi Digital Inspektorat V**				30,00	49,56	165,20
10. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat V**				30,00	52,70	175,67

* Tidak dapat dilakukan Perbandingan Kinerja dikarenakan perbedaan metode perhitungan antara Tahun 2024 dengan Tahun 2025

** Subindikator Kinerja Kegiatan baru di Tahun 2025

Dari data tahun 2024 dan 2025 di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- Angka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ditahun 2025 menurun dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut disebabkan terdapat penambahan Cara Pengukuran atau Subindikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2024 serta terdapat perbedaan metode pengukuran. Sehingga capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025 tidak diukur efektivitasnya dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak dalam rentang periode Rencana Strategis berjalan sama.
- Kualitas hasil pelaksanaan dan pelaporan AREPP dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 mengalami penurunan. Nilai Hasil Telaah Sejawat tahun 2024 mendapatkan nilai 94,42 yaitu masuk dalam kategori "Sangat Baik". Pada tahun 2025, Inspektorat V mengalami penurunan Nilai Hasil Telaah Sejawat berdasarkan Berita Acara Hasil *Quality Assurance* Telaah Sejawat Intern pada Inspektorat V tanggal 13 Januari 2026 yaitu mendapatkan nilai 93,46 namun demikian nilai tersebut masih berada dalam kategori "Sangat Baik". Penurunan tersebut lebih pada Standar Atribut antara lain penilaian intern secara berkala pada Semester II belum dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 Laporan Hasil Audit Kinerja Semester II sedang dalam proses penyusunan.
- Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2024 ke Tahun 2025 mengalami peningkatan. Namun demikian realisasi pada tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 terdapat 1 pengaduan yang masih dalam proses pelaksanaan dari 7 pengaduan yang diterima oleh Inspektorat V.
- Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 turun dari Tahun 2024 dikarenakan masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, seperti adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan lingkungan organisasi, optimalisasi peluang untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan, serta

perbaikan berkelanjutan atas pengendalian dan pengelolaan risiko korupsi dalam rangka mewujudkan budaya organisasi antikorupsi yang lebih luas.

3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra

Capaian Sasaran Program Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan telah memenuhi target Rencana Strategis Inspektorat V Tahun 2025–2029.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat V Tahun 2025 dengan Target Renstra

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V				
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	2025	78,78%	84,08%	106,73%
	2026	80,89%	-	-
	2027	83,00%	-	-
	2028	85,12%	-	-
	2029	87,23%	-	-

Dari tabel di atas, dapat dianalisis sebagai berikut:

- Proses pelaksanaan penugasan AREPP secara kualitas sudah baik dan berhasil menjaga mutu yang diinginkan setiap tahunnya, terlihat dari nilai Standar Kinerja yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun untuk meningkatkan di tahun 2026 diperlukan strategi agar antara kualitas dan kuantitas tetap dapat sesuai target yang diinginkan;
- Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat masih memerlukan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan percepatan respon atas pengaduan yang diterima, hal tersebut untuk meningkatkan realisasi penanganan pengaduan ditahun 2026;
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dapat terus ditingkatkan hingga tahun 2026 dengan cara koordinasi dengan pihak Auditi untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi, baik TL LHP yang sudah lama maupun yang baru;

3.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Lain

Berdasarkan Laporan Kinerja TA 2025 pada Inspektorat II, perbandingan realisasi atau capaian kinerja Inspektorat V dengan Inspektorat II sebagai Unit Kerja yang setara (*benchmark* kinerja) dengan rincian pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Unit Kerja yang Setara

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BOBOT		TARGET 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN KINERJA (%)	
	INSP V	INSP II	INSP V	INSP II	INSP V	INSP II	INSP V	INSP II
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V			78,78%	76,61%	84,08%	87,85%	106,73	114,67
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern proses AREPP Inspektorat V	20%	20%	94,43	94,50	93,46	93,13	98,97	98,55
2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat V	20%	20%	85,00%	85,00%	94,07%	100,00%	110,68	117,65
3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat V	20%	20%	85,00%	85,00%	89,29%	100,00%	105,04	117,65
4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat V	10%	15%	91,20%	75,50%	91,26%	84,36%	100,06	111,74
5. Tingkat Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi*	5%	-	95,49%	-	94,65%	-	99,12	-
6. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat V	5%	5%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	100,00

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BOBOT		TARGET 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN KINERJA (%)	
	INSP V	INSP II	INSP V	INSP II	INSP V	INSP II	INSP V	INSP II
7. Predikat SAKIP Inspektorat V	5%	5%	A (Nilai 81,56)	A (Nilai 80,70)	A (Nilai 88,45)	A (Nilai 80,80)	108,45	100,12
8. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V	5%	5%	Level 4 (Nilai 78,35)	Level 4 (Nilai 77,00)	Level 4 (Nilai 86,43)	Level 4 (Nilai 88,64)	110,31	115,12
9. Transformasi Digital Inspektorat V	5%	5%	30,00	30,00	49,56	86,54	165,20	288,47
10. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat V	5%	5%	30,00	40,00	52,70	55,48	175,67	138,70

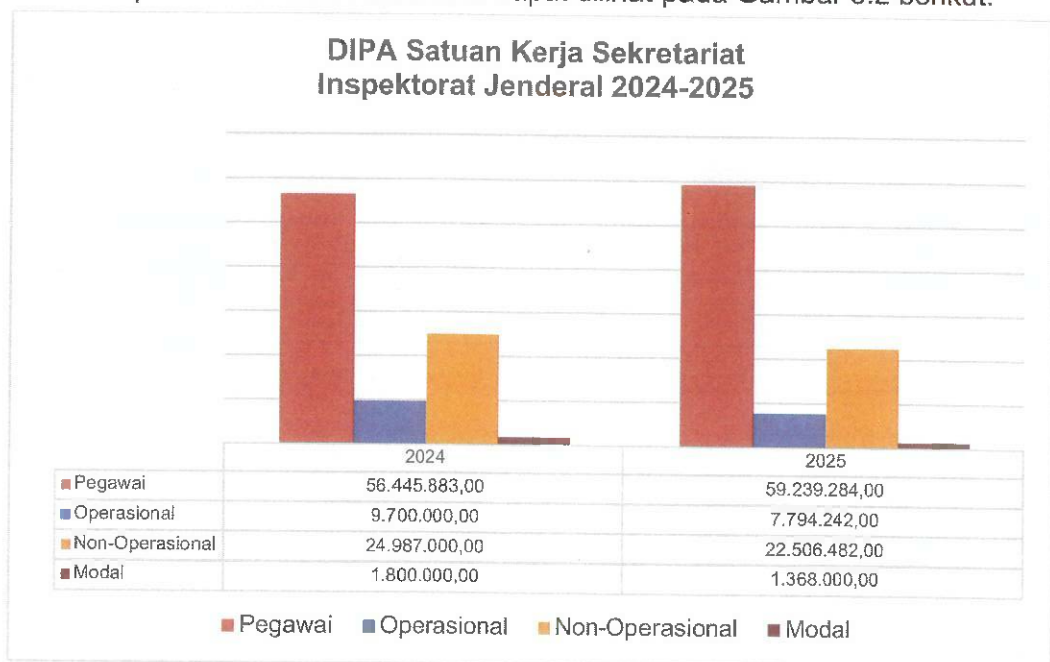
Dari tabel di atas, dapat dianalisis sebagai berikut:

- Realisasi/Capaian Kinerja Inspektorat V lebih tinggi pada pada 3 (tiga) Subindikator Kinerja Kegiatan dari Capaian Kinerja Inspektorat II;
- Atas capaian kinerja Inspektorat V tersebut, Inspektorat V berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

3.4. Analisis Realisasi Anggaran

3.4.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

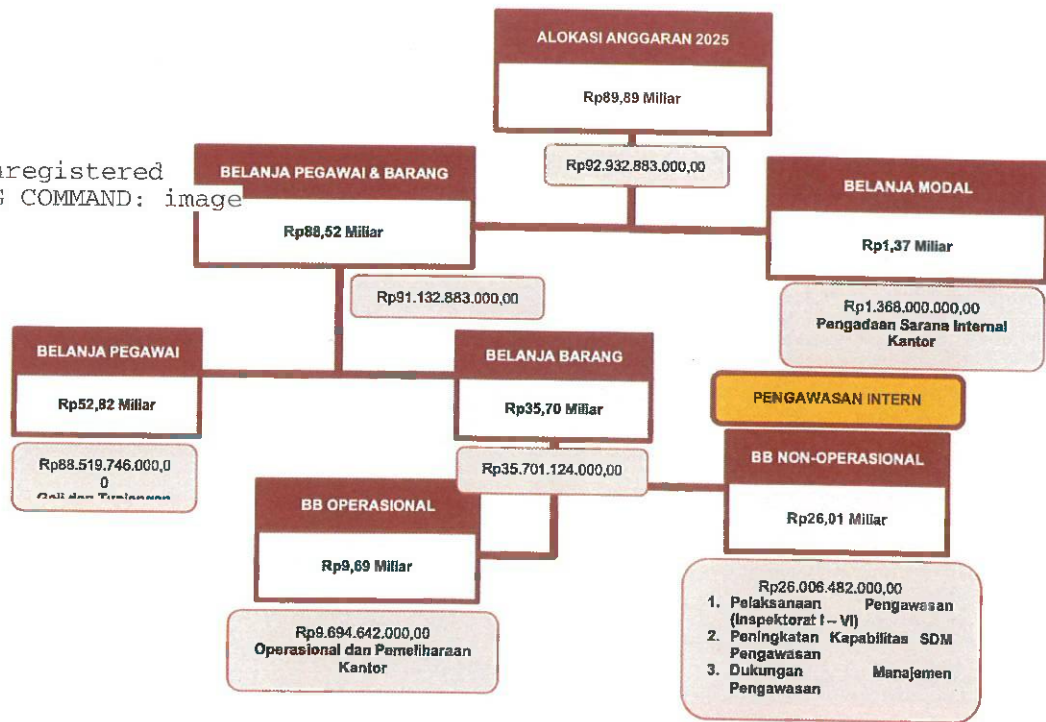
Ketersediaan anggaran merupakan salah satu sumber daya yang menunjang keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut:



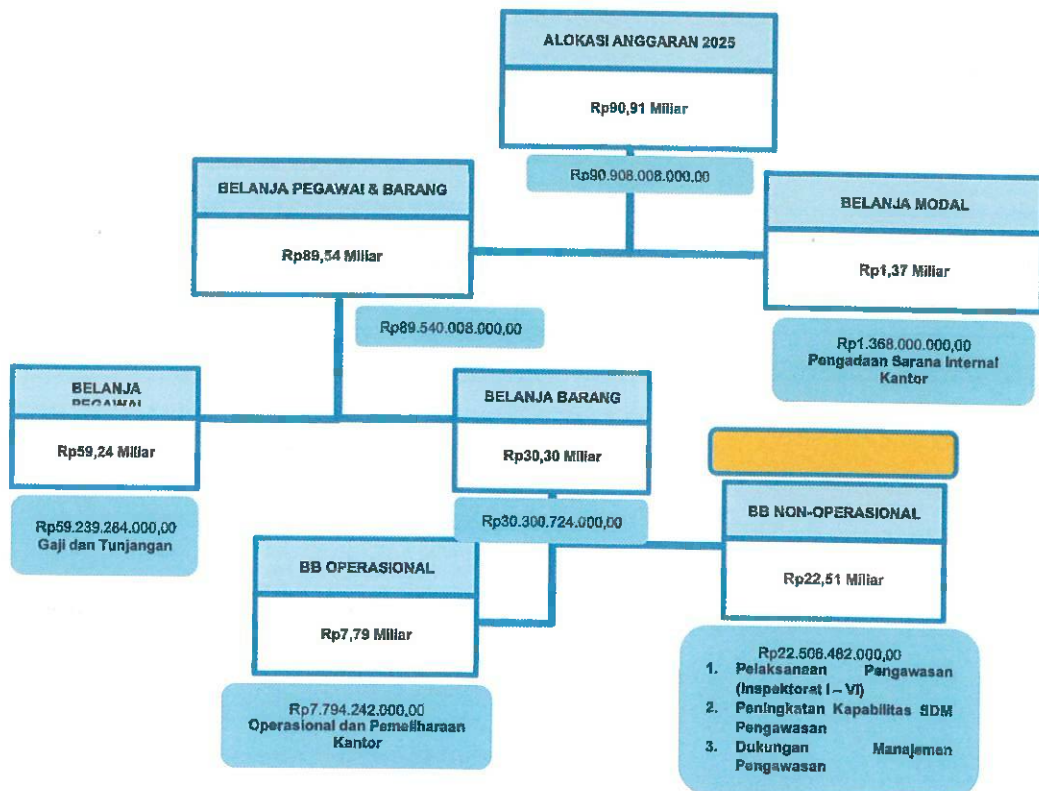
Gambar 3.2 DIPA Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024-2025

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2025 terdapat peningkatan Pagu Anggaran Belanja Pegawai yang mencapai 104,95% dari tahun sebelumnya. Mayoritas Jenis Belanja pada Tahun 2025 tidak berubah jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun atas DIPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal tersebut dapat dilihat Pohon Anggaran DIPA Awal (Gambar 3.3) dan DIPA Revisi (Gambar 3.4) sebagai berikut:

ERROR: unregistered
OFFENDING COMMAND: image



Gambar 3.3 Pohon Anggaran DIPA Awal



Gambar 3.4 Pohon Anggaran DIPA Revisi

Anggaran yang digunakan Inspektorat V merupakan bagian dari DIPA Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Pagu anggaran Inspektorat V pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 3.5 sebagai berikut:



Gambar 3.5 Pagu Anggaran Inspektorat V Tahun 2024-2025

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2025 terdapat penurunan anggaran yang mencapai (-17,49%) dari tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan di kantor sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan di luar kantor dioptimalkan berdasarkan kebutuhan.

Inspektorat V pada tahun 2025 mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp2.328.900.000,00 atau 2,59% dari Rp89.887.746.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat Revisi Anggaran sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 21 Februari 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal revisi administrasi (DIPA Revisi ke-1), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.973.006.000,00;
- b. Pada tanggal 24 Februari 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap (POK Revisi ke-1), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.973.006.000,00;
- c. Pada tanggal 12 Maret 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap (POK Revisi ke-2), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.973.006.000,00;
- d. Pada tanggal 17 Maret 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal revisi administrasi (DIPA Revisi ke-2), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.973.006.000,00;
- e. Pada tanggal 21 Maret 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal revisi administrasi (DIPA Revisi ke-3), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.973.006.000,00;
- f. Pada tanggal 24 April 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal revisi administrasi (DIPA Revisi ke-4), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.973.006.000,00;
- g. Pada tanggal 8 Mei 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap (POK Revisi ke-3), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.973.006.000,00;
- h. Pada tanggal 10 Juli 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap (POK Revisi ke-4), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.973.006.000,00;
- i. Pada tanggal 11 Juli 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal revisi administrasi (DIPA Revisi ke-5), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.973.006.000,00;
- j. Pada tanggal 24 Juli 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal revisi administrasi (POK Revisi ke-5), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.973.006.000,00;

- k. Pada tanggal 7 Agustus 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal revisi administrasi (DIPA Revisi ke-6), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.973.006.000,00;
- l. Pada tanggal 12 Agustus 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal revisi administrasi (DIPA Revisi ke-7), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.973.006.000,00;
- m. Pada tanggal 22 September 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal Pergeseran antar-Kegiatan, antar-KRO, antar-RO, antar-Komponen, dan antar-Akun dalam 1 (satu) Satker yang sama (DIPA Revisi ke-8), anggaran Inspektorat V berubah menjadi sebesar Rp2.328.900.000,00;
- n. Pada tanggal 15 Oktober 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal Revisi Administrasi (DIPA Revisi ke-9), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.328.900.000,00;
- o. Pada tanggal 20 Oktober 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap (DIPA Revisi ke-10), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.328.900.000,00;
- p. Pada tanggal 27 Oktober 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal Revisi Administrasi (DIPA Revisi ke-11), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.328.900.000,00;
- q. Pada tanggal 3 November 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal Revisi Administrasi (DIPA Revisi ke-12), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.328.900.000,00;
- r. Pada tanggal 7 November 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap (POK Revisi ke-6), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.328.900.000,00;
- s. Pada tanggal 12 November 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap (DIPA Revisi ke-13), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.328.900.000,00;
- t. Pada tanggal 21 November 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap (POK Revisi ke-7), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.328.900.000,00;
- u. Pada tanggal 5 Desember 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap (POK Revisi ke-8), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.328.900.000,00;
- v. Pada tanggal 12 Desember 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap (POK Revisi ke-9), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.328.900.000,00;
- w. Pada tanggal 19 Desember 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap (POK Revisi ke-10), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.328.900.000,00;
- x. Pada tanggal 23 Desember 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap (POK Revisi ke-11), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.328.900.000,00;
- y. Pada tanggal 31 Desember 2025, terdapat Revisi Anggaran dalam hal pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap (POK Revisi ke-12), anggaran Inspektorat V tetap sebesar Rp2.328.900.000,00,

berdasarkan data di atas Inspektorat V mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp2.328.900.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum.

3.4.2. Realisasi Anggaran TA 2025

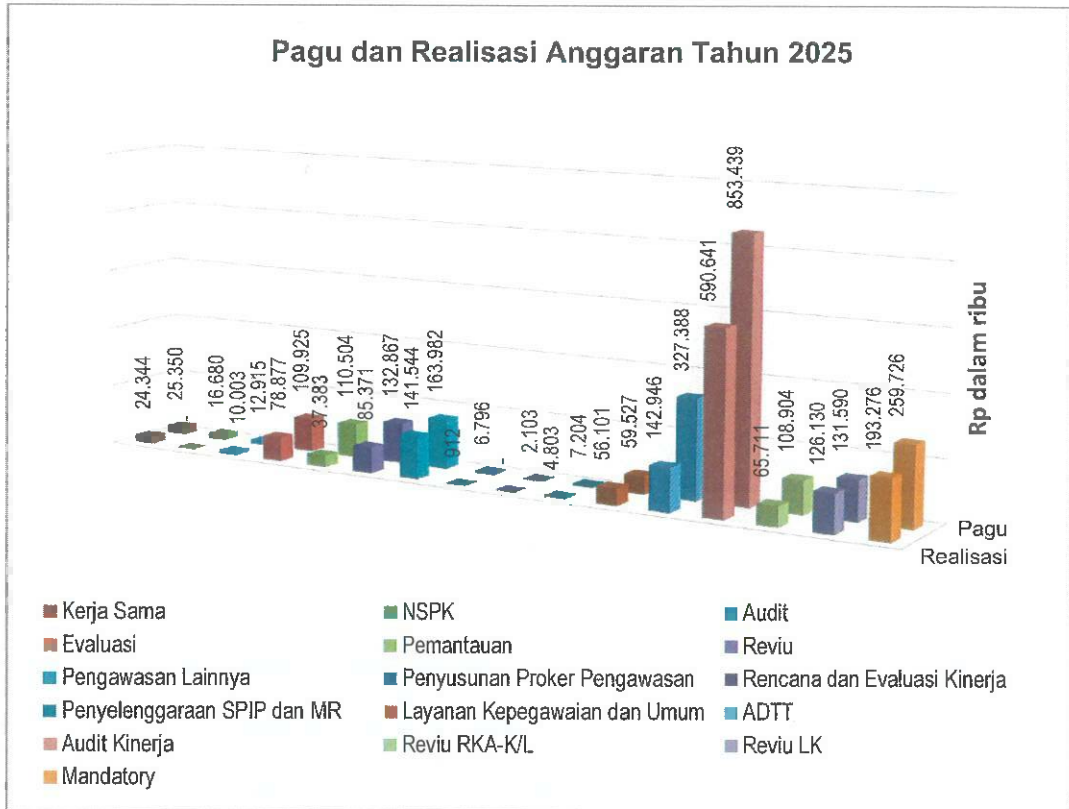
Realisasi anggaran Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025 adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Inspektorat V Tahun 2025

KODE	OUTPUT/SUB-OUTPUT/ SUBKOMPONEN	PAGU (DIPA REVISI KE-12) (RP RIBU)	REALISASI ANGGARAN* (RP RIBU)	KEUANGAN* (S.D. DESEMBER)			FISIK (S.D. DESEMBER)		
				RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)
7754.AEC	Kerjasama (Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan)								
7754.AEC.005	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat V								
7754.AEC.005.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	25.350	24.344	100,00	96,03	(3,97)	100,00	0	(100,00)
7754.AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar)								
7754.AFA.005	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat V								
7754.AFA.005.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat V	16.680	0	100,00	0,00	(100,00)	100,00	0	(100,00)
7754.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)								
7754.EBD.051	Layanan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi								
7754.EBD.051.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	12.915	10.003	100,00	77,45	(22,55)	100,00	185,71	85,71
7754.EBD.051.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	109.925	78.877	100,00	71,76	(28,24)	100,00	80,77	(19,23)
7754.EBD.051.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	110.504	37.383	100,00	33,83	(66,17)	100,00	161,54	61,54
7754.EBD.051.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	132.867	85.371	100,00	64,25	(35,75)	100,00	205,88	105,88
7754.EBD.051.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	163.982	141.544	100,00	86,32	(13,68)	100,00	133,33	33,33
7754.EBD.051.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat V	6.796	912	100,00	13,42	(86,58)	100,00	100,00	0,00
7754.EBD.051.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat V	2.103	0,00	100,00	0,00	(100,00)	100,00	100,00	0,00
7754.EBD.051.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat V	7.204	4.803	100,00	66,67	(33,33)	100,00	150,00	50,00
7754.EBD.051.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat V	59.527	56.101	100,00	94,24	(5,76)	100,00	300,00	200,00
7754.EBD.052	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi								
7754.EBD.052.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	327.388	142.946	100,00	43,66	(56,34)	100,00	41,67	(58,33)
7754.EBD.053	Layanan Audit Kinerja Bidang SIBB dan Bina Konstruksi								
7754.EBD.053.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	853.439	590.641	100,00	69,21	(30,79)	100,00	62,50	(37,50)
7754.EBD.054	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang SIBB dan Bina Konstruksi								
7754.EBD.054.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	108.904	65.711	100,00	60,34	(39,66)	100,00	100,00	0,00
7754.EBD.055	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi								
7754.EBD.055.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	131.590	126.130	100,00	95,85	(4,15)	100,00	100,00	0,00

KODE	OUTPUT/SUB-OUTPUT/ SUBKOMPONEN	PAGU (DIPA REVISI KE-12) (RP RIBU)	REALISASI ANGGARAN* (RP RIBU)	KEUANGAN* (S.D. DESEMBER)			FISIK (S.D. DESEMBER)		
				RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)
7754.EBD .061	Layanan Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian								
7754.EBD. 061.051.A	Pengawasan Mandatory Tingkat Kementerian	259.726	193.276	100,00	74,42	(25,58)	100,00	100,00	0,00
Total		2.328.900	1.558.042	100,00	66,90	(33,10)	100,00	124,66	24,66

Realisasi anggaran per rincian *output* dibandingkan dengan alokasinya adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.6 berikut:



Gambar 3.6 Pagu dan Realisasi Anggaran per Komponen Kegiatan Tahun 2025

Anggaran Inspektorat V pada Tahun 2025 yang terealisasi sebesar 66,90% dari pagu setelah Revisi Anggaran terakhir di Bulan Desember 2025. Terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar 33,10% hal itu disebabkan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran pada Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat V tidak seluruhnya terserap. Dari Pagu Anggaran sebesar Rp2.103.000,00 dan realisasi Rp0,00 didapatkan persentase penyerapan anggaran yaitu sebesar 0,00%. Hal tersebut disebabkan kegiatan Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat V dilaksanakan di lingkungan kantor yang tidak memerlukan banyak anggaran. Realisasi tersebut merupakan bentuk efisiensi anggaran bagi Unit Kerja.
- b. Anggaran yang tidak terealisasi atau mengalami deviasi negatif tersebut relatif tidak mengganggu realisasi *output* fisik karena telah dilaksanakan efisiensi anggaran dalam:
 - 1) Pelaksanakan kegiatan pengawasan di kantor;
 - 2) Pelaksanakan kegiatan pengawasan di luar kantor dioptimalkan berdasarkan kebutuhan;
 - 3) Pengoptimalan Sumber Daya Manusia di Inspektorat V dalam pelaksanaan penugasan.

3.4.3. Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan TA 2024

Dalam melakukan analisis terhadap pelaksanaan anggaran, maka realisasi anggaran tahun 2025 dapat dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2024, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan TA 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/SUB-OUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/ AKUN/DETIL	TAHUN ANGGARAN 2024			TAHUN ANGGARAN 2025		
		PAGU SETELAH REVISI (RP RIBU)	REALISASI (RP RIBU)	% TERHADAP PAGU SETELAH REVISI	PAGU SETELAH REVISI (RP RIBU)	REALISASI (RP RIBU)	% TERHADAP PAGU SETELAH REVISI
7754.AEC	Kerjasama (Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan)						
7754.AEC.005	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat V						
7754.AEC.005.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	36.592	36.590	99,99	25.350	24.344	96,03
7754.AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar)						
7754.AFA.005	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat V						
7754.AFA.005.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat V	5.000	3.263	66,26	16.880	0	0
7754.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)						
7754.EBD.051	Layanan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi						
7754.EBD.051.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	1.383.882	1.374.870	99,35	12.915	10.003	77,45
7754.EBD.051.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	185.897	181.789	97,79	109.825	78.877	71,76
7754.EBD.051.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	61.050	57.329	93,90	110.504	37.383	33,83
7754.EBD.051.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	496.440	495.070	99,72	132.867	85.371	64,25
7754.EBD.051.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	212.650	210.229	98,86	163.982	141.544	86,32
7754.EBD.051.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat V	504	0	0	6.796	912	13,42
7754.EBD.051.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat V	961	480	49,95	2.103	0,00	0,00
7754.EBD.051.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat V	2.040	913	44,75	7.204	4.803	66,67
7754.EBD.051.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat V	89.264	87.948	98,53	59.527	56.101	94,24
7754.EBD.052	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi						
7754.EBD.052.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	-	-	-	327.388	142.946	43,66
7754.EBD.053	Layanan Audit Kinerja Bidang SIBB dan Bina Konstruksi						
7754.EBD.053.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	-	-	-	853.439	590.641	69,21
7754.EBD.054	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang SIBB dan Bina Konstruksi						
7754.EBD.054.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	-	-	-	108.904	65.711	60,34
7754.EBD.055	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi						
7754.EBD.055.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	-	-	-	131.590	126.130	95,85
7754.EBD.061	Layanan Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian						
7754.EBD.061.051.A	Pengawasan Mandatory Tingkat Kementerian	379.886	374.085	98,47	259.726	193.276	74,41
	TOTAL	2.854.166	2.822.566	98,89	2.328.900	1.558.042	66,90

Dari data di atas diketahui bahwa realisasi anggaran TA 2025 menurun dibandingkan dengan realisasi anggaran TA 2023. Namun, Persentase penyerapan anggaran TA 2025 meningkat sebesar 66,90% dari persentase penyerapan anggaran TA 2023 sebesar 57,50%

3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai target kinerja Inspektorat V terlihat dari kemampuan organisasi mengelola jumlah pegawai secara optimal, terdapat peningkatan pegawai dari 37 (tiga puluh tujuh) orang pada tahun 2024 menjadi 38 (tiga puluh delapan) orang pada tahun 2025. Peningkatan ini mendorong Inspektorat V dalam mencapai target kinerja, yang disertai dengan strategi efektif dalam pembagian tugas, peningkatan kompetensi pegawai, dan pemanfaatan teknologi pendukung. Inspektorat V berhasil menjaga kualitas dan kuantitas *output* kerja.

Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana dalam mencapai target kinerja Inspektorat V tercermin dari optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Misalnya, penggunaan perangkat teknologi informasi seperti

komputer, *printer*, dan pelaksanaan audit berbasis komputer memungkinkan percepatan proses pemeriksaan dokumen dan pengolahan data. Akibatnya, efisiensi penggunaan ruang rapat meningkat secara signifikan dengan adanya implementasi rapat secara *online*, yang memanfaatkan teknologi seperti *platform* konferensi video. Dengan metode ini, kebutuhan akan ruang fisik untuk rapat menjadi berkurang, sehingga ruang rapat yang tersedia dapat dialokasikan untuk keperluan lain atau digunakan hanya untuk rapat yang memerlukan tatap muka langsung. Selain itu, rapat *online* memungkinkan penghematan waktu perjalanan, biaya operasional, dan konsumsi energi, sekaligus memperluas aksesibilitas bagi peserta yang berada di lokasi berbeda. Hal ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas, tetapi juga mendukung keberlanjutan kerja yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Di sisi lain, prasarana seperti ruang kerja yang ergonomis, jaringan internet berkualitas, dan ruang rapat yang dilengkapi fasilitas presentasi mendukung efektivitas koordinasi serta pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut secara tepat guna dan sesuai prioritas, Inspektorat V dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat penyelesaian tugas, dan memastikan pencapaian target kinerja secara optimal.

Nilai efisiensi anggaran Inspektorat V adalah sebesar 186,33%. Angka ini diukur dari perbandingan persentase *output* fisik dengan penyerapan anggaran. Persentase *output* fisik Inspektorat V TA 2025 sebesar 124,66% dan persentase penyerapan anggaran Inspektorat V TA 2025 sebesar 66,90%. Perbandingan realisasi anggaran dan realisasi fisik dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik

KODE	OUTPUT/SUB-OUTPUT SUBKOMPONEN	PAGU (DIPA REVISI KE-12) ANGGARAN* (RP RIBU)	REALISASI ANGGARAN* (RP RIBU)	KEUANGAN* (S.D. DESEMBER)			FISIK (S.D. DESEMBER)		
				RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)
7754.AEC	Kerja sama (Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan)								
7754.AEC.005	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat V								
7754.AEC.005.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	25.350	24.344	100,00	96,03	(3,97)	100,00	0	(100,00)
7754.AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar)								
7754.AFA.005	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat V								
7754.AFA.005.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat V	16.680	0	100,00	0,00	(100,00)	100,00	0	(100,00)
7754.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)								
7754.EBD.051	Layanan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi								
7754.EBD.051.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	12.915	10.003	100,00	77,45	(22,55)	100,00	185,71	85,71
7754.EBD.051.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	109.925	78.877	100,00	71,76	(28,24)	100,00	80,77	(19,23)
7754.EBD.051.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	110.504	37.383	100,00	33,83	(66,17)	100,00	161,54	61,54
7754.EBD.051.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	132.867	85.371	100,00	64,25	(35,75)	100,00	205,88	105,88
7754.EBD.051.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	163.982	141.544	100,00	86,32	(13,68)	100,00	133,33	33,33
7754.EBD.051.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat V	6.796	912	100,00	13,42	(86,58)	100,00	100,00	0,00
7754.EBD.051.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat V	2.103	0,00	100,00	0,00	(100,00)	100,00	100,00	0,00
7754.EBD.051.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat V	7.204	4.803	100,00	66,67	(33,33)	100,00	150,00	50,00
7754.EBD.051.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat V	59.527	56.101	100,00	94,24	(5,76)	100,00	300,00	200,00
7754.EBD.052	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi								
7754.EBD.052.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	327.388	142.946	100,00	43,66	(56,34)	100,00	41,67	(58,33)
7754.EBD.053	Layanan Audit Kinerja Bidang SIBB dan Bina Konstruksi								

KODE	OUTPUT/SUB-OUTPUT/ SUBKOMPONEN	PAGU (DIPA REVISI KE-12) (RP RIBU)	REALISASI ANGGARAN* (RP RIBU)	KEUANGAN* (S.D. DESEMBER)			FISIK (S.D. DESEMBER)		
				RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)
7754.EBD. 053.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	853.439	590.641	100,00	69,21	(30,79)	100,00	62,50	(37,50)
7754.EBD .054	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang SIBB dan Bina Konstruksi								
7754.EBD. 054.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	108.904	65.711	100,00	60,34	(39,66)	100,00	100,00	0,00
7754.EBD .055	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi								
7754.EBD. 055.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	131.590	126.130	100,00	95,85	(4,15)	100,00	100,00	0,00
7754.EBD .061	Layanan Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian								
7754.EBD. 061.051.A	Pengawasan <i>Mandatory</i> Tingkat Kementerian	259.726	193.276	100,00	74,42	(25,58)	100,00	100,00	0,00
Total		2.328.900	1.558.042	100,00	66,90	(33,10)	100,00	124,66	24,66

*Sumber: *lemon.pu.go.id* pada tanggal 2 Januari 2026

Kebijakan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas terkait Audit, Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan Lainnya dan *Mandatory* dilaksanakan di kantor maupun diskusi/rapat secara luring, sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas ke luar kantor dan biaya rapat;
2. Pelaksanaan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan yang lebih efisien.

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat V Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan penggunaan anggaran. Laporan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada Laporan Kinerja ini disampaikan pencapaian kinerja Inspektorat V yang diukur dengan metode pengukuran pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 dan perubahannya serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan revisinya. Capaian Kinerja Inspektorat V Tahun 2024 sebesar 106,73% dengan predikat **Istimewa**. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V adalah sebesar 84,08% dari target 78,78%. Inspektorat V berhasil meningkatkan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi Anggaran Inspektorat V telah mencapai Rp2.328.900.000,00 (66,90% dari alokasi anggaran pagu setelah revisi). Penyerapan anggaran sudah optimal dan mampu melakukan penghematan mencapai 33,10% dari pagu setelah revisi. Dalam hal ini, Inspektorat V telah berhasil mengelola anggaran dengan baik.

Keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan baiknya pengelolaan penugasan pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya) serta peningkatan koordinasi Inspektorat V dengan Unit Organisasi SIBB dan Bina Konstruksi dalam kepedulian/*awareness* penerapan SPIP dan Manajemen Risiko dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK maupun Inspektorat Jenderal.

Pelaksanaan dan pelaporan pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya) telah mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung dengan pengelolaan data kinerja yang telah dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis digital.

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan, Inspektorat V menghadapi berbagai hambatan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan konsistensi dan akurasi data dalam pelaporan, seperti pada telaah sejawat internal dan pengawasan, yang memerlukan koordinasi lintas Unit Kerja serta pemanfaatan teknologi secara optimal. Selain itu, peningkatan jumlah pengaduan masyarakat dan kompleksitas tindak lanjut hasil pengawasan dapat menjadi kendala yang memengaruhi efisiensi proses kerja. Meski demikian, dengan strategi yang tepat dan dukungan penuh dari seluruh elemen organisasi, hambatan-hambatan tersebut dapat dikelola untuk menjaga keberlanjutan pencapaian kinerja yang optimal.

Hambatan terkait dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tantangan signifikan dalam mencapai target kinerja Inspektorat V dengan jumlah pegawai sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang serta target kinerja yang harus diselesaikan dan kompleksitas tugas yang beraneka ragam. Hal ini dapat memengaruhi kapasitas pegawai dalam menyelesaikan tugas secara efisien, terutama dalam pelaksanaan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Inspektorat V berhasil mencapai bahkan melampaui target kinerjanya. Hal ini menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengelola tantangan secara efektif melalui optimalisasi peran setiap pegawai, penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, serta pelaksanaan strategi kerja yang efisien. Dengan komitmen dan dedikasi seluruh pegawai, Inspektorat V mampu menjaga produktivitas kerja, memastikan tindak lanjut pengawasan berjalan sesuai rencana, dan mewujudkan target kinerja secara konsisten. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa

hambatan dapat diatasi dengan perencanaan yang matang, kolaborasi yang baik, serta dukungan teknologi yang memadai.

Inspektorat V berkomitmen untuk mendukung peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang andal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan fokus pada pengawalan pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat, dukungan ini diwujudkan melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas, penguatan integritas, serta transformasi paradigma dalam menjalankan tugas dan fungsi. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat peran Inspektorat Jenderal dalam memastikan pembangunan infrastruktur yang berintegritas, profesional, dan berkelanjutan sesuai amanat Kementerian Pekerjaan Umum.

4.2. Faktor Pendukung Keberhasilan

Pencapaian atas Laporan Kinerja ini merupakan wujud keberhasilan kinerja pimpinan dan seluruh pegawai Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Keberhasilan pencapaian ini dapat dilihat sebagai hasil capaian *output* dan indikator kegiatan kinerja yang melebihi target dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Proses pelaksanaan penugasan AREPP pada kegiatan seperti ADTT Pengaduan, Audit Ketaatan, Verifikasi, Evaluasi SAKIP, Evaluasi Penerapan MR, Evaluasi SPIP, Pemantauan, Reviu Revisi Anggaran, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA-K/L, Reviu RKBMN Laporan, Reviu Administrasi Lainnya, Pendampingan, Narasumber, Undangan *Workshop*, Undangan FGD, Undangan Koordinasi dan Pengawasan *Mandatory* Tingkat Kementerian telah memberikan dukungan yang signifikan dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan capaian kinerja Inspektorat V sebagai berikut:

- a. Faktor eksternal, meliputi koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan baik dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum maupun antar Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga berbagai kendala baik dari sisi administrasi, teknis, maupun sosial dapat diminimalkan.
- b. Faktor internal, meliputi:
 - 1) Penetapan tujuan dan sasaran unit kerja yang jelas tergambar melalui Kebijakan Pengawasan Intern (Jakwas) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu/*SMART* (*Specific, Measureable, Achieveable, Relevant* dan *Time Bound*) memberikan arah yang jelas dalam penyusunan laporan;
 - 2) Pemantuan kinerja secara berkala disajikan dalam bentuk Laporan *Monitoring* dan Evaluasi bulanan sebagai alat ukur kendali pencapaian pengawasan bulanan agar sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah dan mengevaluasi perbaikan berkelanjutan yang dapat dilaksanakan kedepannya;
 - 3) Peran serta seluruh pegawai Inspektorat V yang memiliki nilai-nilai dasar (*core values*) ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif);
 - 4) Sistem pengolahan data yang efektif agar penyajian data dalam laporan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 5) Pembagian tanggung jawab per bidang yang sudah jelas pada Inspektorat V yaitu Bidang SIBB, Bidang Bina Konstruksi I, Bina Konstruksi II, Bina Konstruksi III dan Bidang *Mandatory*, RB Keuangan dan Pelaporan Kinerja sehingga pelaksanaan tugas pengawasan dan dukungan manajemen dapat optimal melalui pengaturan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang;
 - 6) Dukungan tim yang kompeten dan terlatih pada setiap bidang dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;

- 7) Supervisi dan revidu berjenjang oleh pimpinan dalam setiap penugasan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan dan penggunaan anggaran secara berkala;
- 8) Adanya mitigasi risiko terkait pencatatan dan pengukuran kinerja yang tidak tercatat dalam sistem EPTLHP melalui penggunaan teknologi dan informasi berupa penggunaan *workbook* dan *one drive* yang digunakan sebagai kontrol dalam meminimalisir kesalahan dalam pencatatan data.
- 9) Penghematan/efisiensi terjadi sebagai akibat pelaksanaan penugasan kegiatan Audit, Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan Lainnya dan Mandatory yang dilaksanakan di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas ke daerah.

4.3. Faktor Penyebab Kegagalan

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025, Inspektorat V menghadapi beberapa tantangan dalam pencapaian target kinerja adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Anggaran di Inspektorat V sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

4.4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Dalam mencapai dan meningkatkan kinerja ditahun 2026 diharapkan seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat V tetap melakukan penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal sesuai *core values* ASN BerAkhlak. Inspektorat V juga diharapkan tetap mengembangkan sistem dan prosedur serta administrasi secara digital agar pelaksanaan penugasan dapat terlaksana dengan lebih efektif.


Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat V pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal terkait pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia;
- b. Melakukan manajemen personel Auditor dalam penugasan pengawasan di Inspektorat V;
- c. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalui tertib pelaksanaan Kendali Mutu Audit dan melaksanakan Audit Kinerja ditahun 2026;
- d. Meningkatkan pembinaan penerapan Manajemen Risiko pada Unit Organisasi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

LAMPIRAN

Lampiran I Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Inspektorat V

a. Perjanjian Kinerja Awal



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT V – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Subaiha Kipli, M.T.
Jabatan : Inspektur V

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

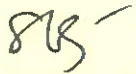
Nama : Dadang Rukmana
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

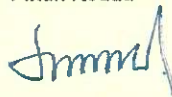
1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama


Ir. SUBAIHA KIPLI, M.T.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua


DADANG RUKMANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT V – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	80,00%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran

Rp 2.973.006.000

INSPEKTUR JENDERAL



DADANG RUKMANA

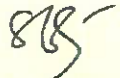

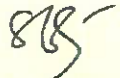

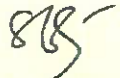

Jakarta, 31 Januari 2025

INSPEKTUR V



Ir. SUBAIHA KIPLI, M.T.

b. Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 Tahun 2025 Inspektorat V Tanggal 4 Juli 2025

	REVISI		
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT V – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM			
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Ir. Subaiha Kipli, M.T. Jabatan : Inspektur V</p> <p>Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA</p> <p>Nama : Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc Jabatan : Inspektur Jenderal</p> <p>Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA</p> <p>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. <p style="text-align: center;">Jakarta, 4 Juli 2025</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;"><p>Pihak Pertama</p> Ir. SUBAIHA KIPLI, M.T.</td><td style="width: 50%; text-align: center;"><p>Pihak Kedua</p> Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.</td></tr></table>		<p>Pihak Pertama</p>  Ir. SUBAIHA KIPLI, M.T.	<p>Pihak Kedua</p>  Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.
<p>Pihak Pertama</p>  Ir. SUBAIHA KIPLI, M.T.	<p>Pihak Kedua</p>  Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.		

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT V – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	80,00%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran

Rp 2.973.006.000

INSPEKTUR JENDERAL



Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.




Jakarta, 4 Juli 2025

INSPEKTUR V



Ir. SUBAIHA KIPLI, M.T.

c. Perjanjian Kinerja Revisi ke-2 Tahun 2025 Inspektorat V Tanggal 30 September 2025

	REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT V – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Ir. Subaiha Kipli, M.T. Jabatan : Inspektur V</p> <p>Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA</p> <p>Nama : Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc. Jabatan : Inspektur Jenderal</p> <p>Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA</p> <p>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
<p>Pihak Pertama</p>  Ir. SUBAIHA KIPLI, M.T.	<p>Jakarta, 30 September 2025</p> <p>Pihak Kedua</p>  Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT V – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	78,78%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran

Rp 2.328.900.000

INSPEKTUR JENDERAL



Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.


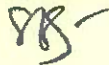

Jakarta, 30 September 2025

INSPEKTUR V



Ir. SUBAIHA KIPLI, M.T.

d. Perjanjian Kinerja Revisi ke-3 Tahun 2025 Inspektorat V Tanggal 29 Desember 2025

 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTUR V – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	REVISI
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Subaiha Kipli Jabatan : Inspektur V</p> <p>Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA</p> <p>Nama : Maulidya Indah Junica Jabatan : Inspektur Jenderal</p> <p>Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA</p> <p>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
<p>Pihak Pertama</p>  SUBAIHA KIPLI	<p>Jakarta, 29 Desember 2025</p> <p>Pihak Kedua</p>  MAULIDYA INDAH JUNICA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR V – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	78,78%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran

Rp 2.328.900.000

INSPEKTUR JENDERAL


MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 29 Desember 2025
INSPEKTUR V


SUBAIHA KIPLI

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT V
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
SK	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V		
1.	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	78,78%	<p>Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan penunjang tugas pengawasan pada Inspektorat V dengan bobot masing-masing sub indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dua Puluh Persen (20%) Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat V dari Nilai Telaah Sejawat Internal Antar Inspektorat; 2. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat V dari Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal; 3. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat V dari Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengaduan; 4. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat V yang dihitung berdasarkan Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi; 5. Lima Persen (5%) Tingkat Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi yang dihitung melalui Perbandingan Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP;

			<p>6. Lima Persen (5%) Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat V yang dihitung melalui Tingkat pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat V yang disusun tepat waktu;</p> <p>7. Lima Persen (5%) Nilai SAKIP Inspektorat V yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat V;</p> <p>8. Lima Persen (5%) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V;</p> <p>9. Lima Persen (5%) Transformasi Digital Inspektorat V yang dihitung melalui Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital Inspektorat V (Sub IKK Baru);</p> <p>10. Lima Persen (5%) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat V yang dihitung berdasarkan Nilai Pengawasan Kearsipan Inspektorat V (Sub IKK Baru);</p>
--	--	--	---

INSPEKTUR JENDERAL

Mami
MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 29 Desember 2025

INSPEKTUR V

Subaiha
SUBAIHA KIPLI

Lampiran II PKPT Inspektorat V Tahun 2025

- 92 -

V. PKPT TA 2025 INSPEKTORAT V - PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN UMUM PADA SEKRETARIAT JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI, INSPEKTORAT JENDERAL, BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH, DAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, & PENGAWASAN WAJIB TINGKAT KEMENTERIAN

No	Obyek Pengawasan	Prioritas Pengawasan	Risiko	Kode Fokus/Tema	Kode Pengawasan	Jumlah Hari	Minggu	Mulai	Selasa	Nama	Jabatan	Biaya (Rp1.000)	Jml LHP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PU PADA SEKRETARIAT JENDERAL, INSPEKTORAT JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI, BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH, DAN BADAN											2,069,213	198	
AUDIT											1,161,591	34	
A	1	PKAT - AUDIT BERBASIS MANAJEMEN RISIKO	P5	II / a	NI	9	Ke-3	Ke-4	Inspektor V	Daltu	858,463	8	
	a	PKAT I - Audit Kinerja Level Program Tahap I							Aditya, S.E., M.Ak., ORMA	Dalnis	284,711	5	
		Tim I	Tinggi						Rizka Aldo Amarta Saragih, S.E.	Katim			
		1) Satker BP2JK Sumatera Barat							Rifdah Mayrani, S.E.	Anggota			
									Sun Naidah, S.T.	Anggota			
	b	Tim II	Tinggi			9	Ke-3	Ke-4	Inspektor V	Daltu	67,163	1	
		1) Satker BP2JK Maluku Utara							Satridartama Elliska, S.E., M.M., QIA, CFA, CRMO	Dalnis			
									Yolania Sari, S.E., M.E.	Katim			
									Marta Muhammed Thohir, S.E.	Anggota			
									Eka Nurse Hiris, S.ST.	Anggota			
	c	Tim III	Tinggi			9	Ke-3	Ke-4	Inspektor V	Daltu	47,814	1	
		1) Satker BP2JK Kalimantan Barat							Lewanta Yusemied Dahila, S.T., M.T.	Dalnis			
									Liona Pramestiani, S.I. Kom.	Katim			
									Harli Yanes Pira, S.T.	Anggota			
									Rifka Minto Asih Sibombing, A.Md.Ak.	Anggota			
	d	Tim IV	Tinggi			9	Ke-3	Ke-4	Inspektor V	Daltu	58,261	1	
		1) Satker BP2JK Sulawesi Selatan							Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP	Dalnis			
									Tasy, S.T.	Katim			
									Christina Eka Widiaatuti, S.E.	Anggota			
									Viena Ananda Ari Sembiana, S.T.	Anggota			
	e	Tim V	Tinggi			9	Ke-3	Ke-4	Inspektor V	Daltu	62,955	1	
		1) Satker BP2JK Nusa Tenggara Barat							Mularia Cornelia Josefina Sirait, S.E., M.Ak.	Dalnis			
									Mohamad Khawan, S.H.	Katim			
									Dian Rindu Lubis, S.E., M.Ak.	Anggota			
									Muslim Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Anggota			
2	Audit Kinerja pada Satker Biro PBMN	P5	Tinggi	II / a	NI	25	Ke-3	Ke-4	Inspektor V	Daltu	28,750	1	
									Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP	Dalnis			
									Putri Seere Sinaga, S.E.	Katim			
									Dian Rindu Lubis, S.E., M.Ak.	Anggota			
									Yolania Sari, S.E., M.E.	Anggota			
									Hizkia Aldo Amarta Saragih, S.E.	Anggota			
									Christina Eka Widiaatuti, S.E.	Anggota			
									Rifdah Mayrani, S.E.	Anggota			
									Muslim Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Anggota			

No	Objek Pengawasan	Prioritas Pengawasan	Risiko	Kode Fokus/Tema	Kode Pengawasan	Jumlah Hari	Minggu		Nama	Jabatan	Biaya (Rp1.000)	Jml. LHP
							Mulai	Selesai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	PKAT II - Audit Kinerja Level Program Tahap II	P5	Tinggi	II / a	N1	12	Ke-4 November	Ke-1 Desember	Inspektur V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP Tomv, S.T. Mohamad Ikhsan, S.H. Eka Nurpa Hijria, S.ST. Sun Naidah, S.T.	Daltu Dalmis Katim Anggota Anggota	260,563 88,840	2 1
a	1) Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin											
c	Tim III 1) Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura		Tinggi			12 Hari Kalender	Ke-2 November	Ke-3 November	Inspektur V Adiwa, S.E., M.Ak. Hizkia Aldo Amanta Saragih, S.E. Dewy Handayani, S.E., M.Sc. Rifdah Mawani, S.E. Muslih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Daltu Dalmis Katim Anggota Anggota	171,723	1
D	AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU										306,138	26
1	Audit Ketertarikan- Pemeriksaan Kantor Pusat Serenak	P7	Tinggi	I / a	N31	12	Ke-2 September	Ke-4 September	Inspektur V Satriadarma Elieska, S.E., M.M., OIA, CPFA, CRMO Volania Sari, S.E., M.E. Marta Muhammad Thohir, S.E. Vita Bakti Redadilla, S.Tr.Ak Abdul Fatah Ihsan Binotanto, S.Tr.Ak	Daltu Dalmis Katim Anggota Anggota	136,735 8,925	9 1
a	1) Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi					12 Hari Kerja						
b	Tim II 1) Satker Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya		Tinggi			12 Hari Kerja	Ke-2 September	Ke-4 September	Inspektur V Adiwa, S.E., M.Ak., QORMA Hizkia Aldo Amanta Saragih, S.E. Rifdah Mawani, S.E. Yohana Tri Jenuarumsari, A.Md.Ak. Harli Yanes Fira, S.T.	Daltu Dalmis Katim Anggota Anggota	8,925	1
c	Tim III 1) Satker Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional		Tinggi			12 Hari Kerja	Ke-2 September	Ke-4 September	Inspektur V Lanitta Yumniani Dahila, S.T., M.T. Liona Prameswari, S.J, Kom. Cavuh Alviana Azmi, S.E., M.Ak. Rifka Mando Ash Sibombing, A.Md.Ak.	Daltu Dalmis Katim Anggota Anggota	8,925	1
d	Tim IV 1) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi		Tinggi			12 Hari Kerja	Ke-2 September	Ke-4 September	Inspektur V Satriadarma Elieska, S.E., M.M., OIA, CPFA, CRMO Putri Seere Sinaga, S.E. Nahli Affiah, S.T., M.T., CRMO, CGAA Anggi Mawati, S.T.	Daltu Dalmis Katim Anggota Anggota	37,140	1
e	Tim V 1) Satker Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah		Tinggi			12 Hari Kerja	Ke-2 September	Ke-4 September	Inspektur V Lanitta Yumniani Dahila, S.T., M.T. Gustri Anggarani Rachman, S.T., MPSSA Reza Viola Purba, S.E., M.Ak Viola Ananda Ari Sembiana, S.T. Sun Waidah, S.T.	Daltu Dalmis Katim Anggota Anggota	8,925	1
f	Tim VI 1) Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah		Tinggi			12 Hari Kerja	Ke-2 September	Ke-4 September	Inspektur V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP Mohamad Ikhsan, S.H. Eka Nurpa Hijria, S.ST.	Daltu Dalmis Katim Anggota	8,925	1

No	Obyek Pengawasan	Prioritas Pengawasan	Risiko	Kode Fokus/Tema	Kode Pengawasan	Jumlah Hari	Minggu		Nama	Jabatan	Biaya (Rp1.000)	Jml. LHP
							Mulai	Selesai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
k	Tim VII		Tinggi			12 Hari Kerja	Ke-2 September	Ke-4 September	Inspektur V Aditya, S.E., M.Ak., ORMA Desv Handayani, S.E., M.Sc. Indah Triana Ristanti, S.E., Ak. Muslih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Daltu Dalmis Katim Anggota Anggota	37.140	1
	1) Saker Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen											
	h											
Tim VIII		Tinggi			12 Hari Kerja	Ke-2 September	Ke-4 September	Inspektur V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP Gavuh Alviana Azmi, S.E., M.Ak. Indah Triana Ristanti, S.E., Ak. Christina Eka Widinatuti, S.E. Faniava Alva Puteri, S.E., M.Si.M. Eka Nurpa Hijria, S.ST.	Daltu Dalmis Katim Anggota Anggota Anggota	8.925	1	
1) Pusat Data dan Teknologi Informasi												
i												
Tim IX		Tinggi			12 Hari Kerja	Ke-2 September	Ke-4 September	Inspektur V Mulanita Corneilia Josefina Sirait, S.E., M.Ak. Dian Rindu Lubis, S.E., M.Ak. Rosdianti, S.E. Cantika Rahmella Putri, S.T.	Daltu Dalmis Katim Anggota Anggota	8.925	1	
1) Sekretariat Inspektorat Jenderal												
2												
PKAT - Audit Keluasan Pengelolaan PNBPTA 2023 - 2024						5 Hari Kalender	Ke-3 November	Ke-4 November	Inspektur V Aditya, S.E., M.Ak., ORMA Hizkia Aldo Amanta Saragih, S.E. Desv Handayani, S.E., M.Sc. Rifdiah Mavrani, S.E. Muslih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Daltu Dalmis Katim Anggota Anggota	44.561	1
a												
1) Saker Politeknik Pekerjaan Umum												
3	AUDIT LANJUTAN PENANGANAN PENGADUAN						Ke-1 Oktober	Ke-1 Oktober	Inspektur V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP Hizkia Aldo Amanta Saragih, S.E. Christina Eka Widinatuti, S.E. Eka Nurpa Hijria, S.ST.	Daltu Dalmis Katim Anggota Anggota	45.584	2
a												
1) Audit Lanjutan Penanganan Pengaduan												
4	VERIFIKASI TINDAK LANJUT LHP BPK						Jan	Des	Inspektur V Lanifia Yumiaty Dahia, S.T., M.T. Liona Pramestiani, S.I. Kom. Tomv, S.T. Gavuh Alviana Azmi, S.E., M.Ak. Rifka Minda Asih Sihombing, A.Md.Ak. Yohana Tri Januarumasa, A.Md.Ak.	Daltu Dalmis Katim Anggota Anggota Anggota	79.238	14
a												
1) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah												
b	Tim II						Jan	Des	Inspektur V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP Indah Triana Ristanti, S.E., Ak. Faniava Alva Puteri, S.E., M.Si.M. Christina Eka Widinatuti, S.E. Eka Nurpa Hijria, S.ST. Vita Bakti Rafadilla, S.Tr.Ak.	Daltu Dalmis Katim Anggota Anggota Anggota	6.270	2
1) Sekretariat Jenderal												
c	Tim III						Jan	Des	Inspektur V Aditya, S.E., M.Ak., ORMA Hizkia Aldo Amanta Saragih, S.E. Desv Handayani, S.E., M.Sc. Rifdiah Mavrani, S.E. Muslih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Daltu Dalmis Katim Anggota Anggota Anggota	25.130	5
1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia												

No	Objek Pengawasan	Prioritas Pengawasan	Risiko	Kode Fokus/Tema	Kode Pengawasan	Jumlah Hari	Minggu		Nama	Jabatan	Biaya (Rp1.000)	Jml. LHP
							Mulai	Selesai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
d	Tim IV Inspektorat Jenderal						Jan	Des	Inspektur V Mularia Carolina Josefina Sirait, S.E., M.Ak. Mohamad Ikhsan, S.H. Dian Rindu Lubis, S.E., M.Ak. Roslivanti, S.E. Sofiana Dewi, S.Tr.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	15,750	1
e	Tim V Direktorat Jenderal Bina Konstruksi						Jan	Des	Inspektur V Satriadarma Elliska, S.E., M.M., QIA, CPFA, CRMO Yolania Sari, S.E., M.E. Nasri Affah, S.T., M.T., CRMG, CCAA Putri Score Sinaga, S.E. Anggi Mirawati, S.T. Marta Muhammad Thohir, S.E.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	11,670	2
II											389,236	44
A	REVIU										126,130	17
1	REVIU LAPORAN KEUANGAN Reviu Laporan Keuangan TA 2024	P2		II / b	M3	5	Ke-3 Januari	Ke-3 Januari	Inspektur V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP Indah Triana Riatani, SE, Ak. Christina Eka Widawati, S.E. Eka Nurpa Hijri, S.ST.	Daltu Dalnis Katim Anggota	0	1
a	1) UAPPA E1 Sekretaris Jenderal					4	Ke-4 Januari	Ke-4 Januari	Inspektur V Laenba Yusrini Dahlan, S.T., M.T. Gayuh Alviana Azmi, S.E., M.Ak. Rifka Minto Asih Shombing, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota	0	1
	2) UAPPA E1 Inspektorat Jenderal					5	Ke-4 Januari	Ke-4 Januari	Inspektur V Mohamad Ikhsan, S.H. Dian Rindu Lubis, S.E., M.Ak. Roslivanti, S.E. Sofiana Dewi, S.Tr.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota	0	1
	3) UAPPA E1 BPIW					7	Ke-3 Januari	Ke-3 Januari	Inspektur V Satriadarma Elliska, S.E., M.M., QIA, CPFA, CRMO Yolania Sari, S.E., M.E. Putri Score Sinaga, S.E. Marta Muhammad Thohir, S.E. Putri Ivan Putra Prakasa, S.Tr.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	0	1
	4) UAPPA E1 Ditjen Bina Konstruksi					5	Ke-3 Januari	Ke-3 Januari	Inspektur V Aditya, S.E., M.Ak., QRMA Dev Handayani, S.E., M.Sc. Ridiah Mawani, S.E. Muzlihin Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota	0	1
	5) UAPPA E1 BPSDM					4	Ke-1 Februari	Ke-2 Februari	Inspektur V Mohamad Ikhsan, S.H. Dian Rindu Lubis, S.E., M.Ak. Sofiana Dewi, S.Tr.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota	0	1
	b >> Loan ITDP					4	Ke-1 Februari	Ke-2 Februari	Inspektur V Mohamad Ikhsan, S.H. Tomv, S.T. Rifka Minto Asih Shombing, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota	0	1
	>> Loan NUDP					4	Ke-1 Februari	Ke-2 Februari	Inspektur V Mohamad Ikhsan, S.H. Tomv, S.T. Rifka Minto Asih Shombing, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota	0	1

No	Obyek Pengawasan	Prioritas Pengawasan	Risiko	Kode Fokus/Tema	Kode Pengawasan	Jumlah Hari	Minggu		Nama	Jabatan	Biaya (Rp1.000)	Jml. LHP
							Mulai	Selesai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	1) Revisi Laporan Keuangan Semester I TA 2025 UAPPA E1 Sekretaris Jenderal	P2		II / b	M3	5	Ke-3 Juli	Ke-3 Juli	Inspektor V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP Liona Pramestiani, S.I. Kom. Christina Eka Widiaatuti, S.E. Faniwa Alva Puteri, S.E., M.S.M. Eka Nurpa Hijria, S.ST.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	126.130 23.267	10 2
	2) UAPPA E1 Inspektorat Jenderal								Inspektor V Mularia Cornelia Josefina Sirait, S.E., M.Ak. Dian Rindu Lubis, S.E. M.Ak. Sofiana Dewi, S.Tr.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota	2.385	2
	3) UAPPA E1 BPIW								Inspektor V Lemaita Yusmiad Dahlia, S.T., M.T. Mohamed Ichaan, S.H. Yohana Tri Januarumari, A.Md.Ak. Rifka Mitdo Asih Sihombing, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	19.728	2
	4) UAPPA E1 Ditjen Bina Konstruksi								Inspektor V Satriadarma Eliaska, S.E., M.M., OIA, CPFA, CRMO Yolania Sari, S.E., M.E. Naili Afifah, S.T., M.T., CRMO, CGAA Marta Muhammad Thohir, S.E.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	61.429	2
	5) UAPPA E1 BPSDM								Inspektor V Aditya, S.E., M.Ak., QRMA Hizkia Aldo Amenta Saragih, S.E. Rifdah Mavrani, S.E. Muslih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	19.321	2
b	REVISI RKA-K/L TA 2026										104.354	10
a	1) Revisi RKA/L TA 2025 - Pagu Anggaran Pagu Anggaran (Sekretaris Jenderal)	P2		II / b	M3	5	Ke-1 Agustus	Ke-1 Agustus	Inspektor V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP Indah Triana Risteni, SE, Ak. Christina Eka Widiaatuti, S.E. Faniwa Alva Puteri, S.E., M.S.M. Eka Nurpa Hijria, S.ST. Vita Bakri Rafadilla, S.Tr.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota Anggota	0 0 0 0 0	5 1
	2) Pagu Anggaran (Inspektorat Jenderal)								Inspektor V Mularia Cornelia Josefina Sirait, S.E., M.Ak. Roediyanti, S.E. Sofiana Dewi, S.Tr.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota	0	1
	3) Pagu Anggaran (BPIW)								Inspektor V Aditya, S.E., M.Ak., QRMA Gavuh Alviaza Azmi, S.E., M.Ak. Tomv, S.T. Liona Pramestiani, S.I. Kom. Yohana Tri Januarumari, A.Md.Ak. Rifka Mitdo Asih Sihombing, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota Anggota	0	1
	4) Pagu Anggaran (Ditjen Bina Konstruksi)								Inspektor V Satriadarma Eliaska, S.E., M.M., OIA, CPFA, CRMO Naili Afifah, S.T., M.T., CRMO, CGAA Yolania Sari, S.E., M.E. Putri Senni Sinaga, S.E. Anagi Mirawati, S.T. Marta Muhammad Thohir, S.E. Harri Yanes Pira, S.T.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota Anggota Anggota	0	1

No	Obyek Pengawasan	Prioritas Pengawasan	Risiko	Kode Fokus/Tema	Kode Pengawasan	Jumlah Hari	Minggu		Nama	Jabatan	Biaya (Rp 1.000)	Jml. LHP
							Mulai	Selesai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5) Pasu Anggaran (BPSDM)					5	Ke-1 Agustus	Ke-1 Agustus	Inspektur V Aditva, S.E., M.Ak., Q.RMA Hizkia Aldo Amarta Saragih, S.E. Desy Handayani, S.E., M.Sc. Rifdah Mavrani, S.E. Sun'Naidah, S.T.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	0	1
4	Revisi RKANL TA 2025 - Alokasi Anggaran (Sekretaris Jenderal)	P2		II / b	M9	5	Ke-4 September	Ke-4 September	Inspektur V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP Indah Triana Ristani, SE, Ak. Christina Eka Widiaatuti, S.E. Eka Nurpa Hidir, S.ST. Vita Bekti Rafedilla, S.Tr.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	104,854	5
	1) Alokasi Anggaran (Sekretaris Jenderal)					5	Ke-4 September	Ke-4 September	Inspektur V Mularia Cornelia Josefina Sirait, S.E., M.Ak. Mohamad Rhasan, S.H. Rordiyanti, S.E.	Daltu Dalnis Katim Anggota	13,044	1
	2) Alokasi Anggaran (Inspektorat Jenderal)					5	Ke-4 September	Ke-4 September	Inspektur V Lasmira Yusemiati Dahli, S.T., M.T. Gavuh Alviana Azmi, S.E., M.Ak. Torov, S.T. Yohana Tri Januarumari, A.Md.Ak. Rifka Mindo Asih Sihombing, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	21,740	1
	3) Alokasi Anggaran (BPIW)					5	Ke-4 September	Ke-4 September	Inspektur V Satriadarma Elihska, S.E., M.M., QIA, CFA, CRMO Nairil Affah, S.T., M.T., CRMO, CCAA Yolania Sari, S.E., M.E. Putri Seera Sitaga, S.E. Anggi Minavati, S.T. Harri Yanes Fira, S.T.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	26,089	1
	4) Alokasi Anggaran (Ditjen Bina Konstruksi)					5	Ke-4 September	Ke-4 September	Inspektur V Aditva, S.E., M.Ak., Q.RMA Hizkia Aldo Amarta Saragih, S.E. Desy Handayani, S.E., M.Sc. Rifdah Mavrani, S.E. Muslih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	21,740	1
	5) Alokasi Anggaran (BPSDM)					5	Ke-4 September	Ke-4 September	Inspektur V Aditva, S.E., M.Ak., Q.RMA Hizkia Aldo Amarta Saragih, S.E. Desy Handayani, S.E., M.Sc. Rifdah Mavrani, S.E. Muslih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	21,740	1
C	REVISI RKBMN										88,802	10
	5 a 1) Revisi Usulan Perubahan RKBMN TA 2025 (Sekretaris Jenderal)	P2		II / a	M10	5	Ke-2 Mei	Ke-3 Mei	Inspektur V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP Indah Triana Ristani, SE, Ak. Christina Eka Widiaatuti, S.E. Eka Nurpa Hidir, S.ST.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	37,227	5
	2) Revisi Revisi RKBMN TA 2025 (Inspektorat Jenderal)					5	Ke-2 Mei	Ke-3 Mei	Inspektur V Lasmira Yusemiati Dahli, S.T., M.T. Liona Pramestiani, S.I. Kom. Gavuh Alviana Azmi, S.E., M.Ak. Rifka Mindo Asih Sihombing, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	7,445	1
	3) Revisi Revisi RKBMN TA 2025 (BPIW)					5	Ke-2 Mei	Ke-3 Mei	Inspektur V Mohamad Rhasan, S.H. Dipa Rindu Lubis, S.E. M.Ak. Sofiana Dewi, S.Tr.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota	7,445	1

No	Objek Pengawasan	Prioritas Pengawasan	Risiko	Kode Fokus/Tema	Kode Pengawasan	Jumlah Hari	Minggu		Nama	Jabatan	Biaya (Rp1.000)	Jml. LHP
							Mulai	Selesai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4) Revisi Revisi RKBMN TA 2025 (Ditjen Bina Konstruksi)					5	Ke-3 Mei	Ke-3 Mei	Inspektur V Satriadarma Elliska, S.E., M.M., QIA, CPrA, CRMO Putri Seere Sinaga, S.E. Naili Afifah, S.T., M.T., CRMO, CGAA Yolania Sari, S.E., M.E. Marta Muhammad Thohir, S.E.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	7,445	1
	5) Revisi Revisi RKBMN TA 2025 (BPSDM)					5	Ke-2 Mei	Ke-3 Mei	Inspektur V Aditya, S.E., M.Ak., QRMA Desy Handayani, S.E., M.Sc. Hizkia Aldo Amarta Saragih, S.E. Rifdiah Mayrani, S.E. Muslih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	7,445	1
6	b) 1) Revisi Usulan RKBMN TA 2027 Revisi RKBMN TA 2027 (Sekretaris Jenderal)	P2		II / a	M12	5	Ke-1 Oktober	Ke-1 Oktober	Inspektur V Dirma Hendra Chita, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP Indah Triana Ristani, SE, Ak Christina Eka Widiaestuti, S.E Eka Nurpa Hijria, S.ST. Vita Bakti Rafadilla, S.Tr. Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	51,575 11,722	5 1
	2) Revisi RKBMN TA 2027 (Inspektorat Jenderal)					5	Ke-1 Oktober	Ke-1 Oktober	Inspektur V Mohamad Ihsan, S.H. Dian Rindu Lubis, S.E. M.Ak. Rozdianti, S.E.	Daltu Dalnis Katim Anggota	7,033	1
	3) Revisi RKBMN TA 2027 (BPIW)					5	Ke-1 Oktober	Ke-1 Oktober	Inspektur V Laelita Yusrinati Dahlan, S.T., M.T. Cayuli Alwisa Azmi, S.E., M.Ak. Yohana Tri Januatumsari, A.Md.Ak. Rifka Mindo Ash Sihombing, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	9,377	1
	4) Revisi RKBMN TA 2027 (Ditjen Bina Konstruksi)					5	Ke-1 Oktober	Ke-1 Oktober	Inspektur V Satriadarma Elliska, S.E., M.M., QIA, CPrA, CRMO Naili Afifah, S.T., M.T., CRMO, CGAA Yolania Sari, S.E., M.E. Anggi Mirawati, S.T. Marta Muhammad Thohir, S.E.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	11,722	1
	5) Revisi RKBMN TA 2027 (BPSDM)					5	Ke-1 Oktober	Ke-1 Oktober	Inspektur V Aditya, S.E., M.Ak., QRMA Desy Handayani, S.E., M.Sc. Hizkia Aldo Amarta Saragih, S.E. Rifdiah Mayrani, S.E. Muslih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	11,722	1
D	REVISI USULAN REVISI ANGGARAN										5,250	6
1	a) Revisi Usulan Revisi Anggaran Revisi Usulan Revisi Anggaran (Berdasarkan Permintaan)	P2		II / b	M25		Januari	Desember	Inspektur V Satriadarma Elliska, S.E., M.M., QIA, CPrA, CRMO Naili Afifah, S.T., M.T., CRMO, CGAA Putri Seere Sinaga, S.E. Anggi Mirawati, S.T.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	5,250 5,250	5 5
E	REVISI LAINNYA										64,700	2
2	a) Revisi Lainnya Revisi Lainnya (Berdasarkan Permintaan)	P1/P8		II / b	N8		Januari	Desember	Inspektur V Aditya, S.E., M.Ak., QRMA Tomv, S.T. Rifdiah Mayrani, S.E. Muslih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	64,700 64,700	2 2

No	Obyek Pengawasan	Prioritas Pengawasan	Risiko	Kode Fokus/Tema	Kode Pengawasan	Jumlah Hari	Minggu	Mulai	Selasai	Nama	Jabatan	Biaya (Rp1.000)	Jml. LHP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
III	EVALUASI											93.337	29
A												38.003	6
1	a	P2		II / b	M15	5	Ke-4 Mei	Ke-1 Juni	Inspektor V Lusnita Yusrinati Dahlan, S.T., M.T. Gevuh Alviana Azmi, S.E., M.Ak. Liona Pramestiani, S.I. Kom. Rifka Minda Ash Sibombing, A.Md.Ak.	Datu Dalnis Katim Anggota	673	1	
2	a	P2		II / b	M16	5	Ke-2 Juni	Ke-2 Juni	Inspektor V Lusnita Yusrinati Dahlan, S.T., M.T. Gevuh Alviana Azmi, S.E., M.Ak. Liona Pramestiani, S.I. Kom. Rifka Minda Ash Sibombing, A.Md.Ak.	Datu Dalnis Katim Anggota	37.330 7.466	5 1	
	2)					5	Ke-2 Juni	Ke-2 Juni	Inspektor V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP Indah Triana Ristani, SE, Ak. Christina Eka Widhiastuti, S.E. Faniwa Alva Puteri, S.E., M.S.M.	Datu Dalnis Katim Anggota	7.466	1	
	3)					5	Ke-2 Juni	Ke-2 Juni	Inspektor V Mularia Cornelia Josefina Sirait, S.E., M.Ak. Dina Rindu Lubis, S.E, M.Ak. Desw Hardevanti, S.E., M.Sc. Sofiana Dewi, S.Tr.Ak.	Datu Dalnis Katim Anggota	7.466	1	
	4)					5	Ke-2 Juni	Ke-2 Juni	Inspektor V Satriadarma Elliska, S.E., M.M., CIA, CFA, CRMO Naili Afiyah, S.T., M.T., CRMO, CGAA Yolanda Sari, S.E., M.E. Putri Scere Shuzka, S.E.	Datu Dalnis Katim Anggota	7.466	1	
	5)					5	Ke-2 Juni	Ke-2 Juni	Inspektor V Aditya, S.E., M.Ak., ORMA Hizkia Aldo Amanta Sarazih, S.E. Ridlah Mawroni, S.E. Muallih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Datu Dalnis Katim Anggota	7.466	1	
B												40.635	5
3	a	P2		II / a	M20	5	Ke-4 Mei	Ke-1 Juni	Inspektor V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP Indah Triana Ristani, SE, Ak. Faniwa Alva Puteri, S.E., M.S.M. Eka Nurpa Hjria, S.ST.	Datu Dalnis Katim Anggota	40.635 8.127	5 1	
	2)					5	Ke-4 Mei	Ke-1 Juni	Inspektor V Lusnita Yusrinati Dahlan, S.T., M.T. Tomv, S.T. Liona Pramestiani, S.I. Kom. Rifka Minda Ash Sibombing, A.Md.Ak.	Datu Dalnis Katim Anggota	8.127	1	
	3)					5	Ke-4 Mei	Ke-1 Juni	Inspektor V Mularia Cornelia Josefina Sirait, S.E., M.Ak. Mohamad Rhaman, S.H. Roslivanti, S.E. Sofiana Dewi, S.Tr.Ak.	Datu Dalnis Katim Anggota	8.127	1	

No	Objek Pengawasan	Prioritas Pengawasan	Risiko	Kode Fokus/Tema	Kode Pengawasan	Jumlah Hari	Minggu		Nama	Jabatan	Biaya (Rp1.000)	Jml. LHP
							Mulai	Selesai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4)	Evaluasi Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi (UPR-T1) Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2024					5	Ke-4 Mei	Ke-1 Juni	Inspektur V Satriadarma Elliska, S.E., M.M., OIA, CPra, CRMO Naili Afifah, S.T., M.T., CRMO, CGAA Putri Seere Sinaga, S.E. Marta Muhammad Thohir, S.E.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	8,127	1
5)	Evaluasi Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi (UPR-T1) BPSDM Tahun 2024					5	Ke-4 Mei	Ke-1 Juni	Inspektur V Aditya, S.E., M.Ak., QRMA Desv Handayani, S.E., M.Sc. Rifdah Mavrani, S.E. Muslih Abdul Aziz Abza, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	8,127	1
C	EVALUASI - PENJAMINAN KUALITAS MATURITAS										0	6
4	Evaluasi - Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Unit Organisasi Sekretariat Jenderal	P2		II / a	M22	5	Ke-2 Agustus	Ke-3 Agustus	Inspektur V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP Indah Triana Riutani, SE, Ak. Christina Eka Widiaetuti, S.E. Faniya Alva Putri, S.E., M.S.M. Eka Nurpa Hijria, S.ST.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota Anggota	0	5
a	Evaluasi - Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Unit Organisasi Inspektorat Jenderal					5	Ke-2 Agustus	Ke-3 Agustus	Inspektur V Mularia Corvella Josefina Sivri, S.E., M.Ak. Dian Rindu Lubis, S.E, M.Ak. Liana Pramestiani, S.I. Kom. Rosdivanti, S.E.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	0	1
b	Evaluasi - Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Unit Organisasi BPIW					5	Ke-2 Agustus	Ke-3 Agustus	Inspektur V Lanita Yusrinati Dahlia, S.T., M.T. Gavuh Alviana Azmi, S.E., M.Ak. Tomvi, S.T. Muhammad Rafi Kambara, A.Md.Ak. Yohana Tri Januarumsari, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota Anggota	0	1
c	Evaluasi - Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Unit Organisasi Ditjen Bina Konstruksi					5	Ke-2 Agustus	Ke-3 Agustus	Inspektur V Satriadarma Elliska, S.E., M.M., OIA, CPra, CRMO Yolania Sari, S.E., M.E. Naili Afifah, S.T., M.T., CRMO, CGAA Anggi Mirawati, S.T.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	0	1
d	Evaluasi - Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Unit Organisasi BPSDM					5	Ke-2 Agustus	Ke-3 Agustus	Inspektur V Aditya, S.E., M.Ak., QRMA Desv Handayani, S.E., M.Sc. Rifdah Mavrani, S.E. Vita Bakti Rafadilla, S.Tr.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	0	1
D	TELAH SEJAWAT INTERN										0	9
5	Evaluasi - Telah Sejawat Intern TA 2025	P7		II / d	N9		Ke-2 Desember	Ke-3 Desember	Inspektur V Lanita Yusrinati Dahlia, S.T., M.T. Gavuh Alviana Azmi, S.E., M.Ak. Sofiana Dewi, S.Tr.Ak. Yohana Tri Januarumsari, A.Md.Ak.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	0	9
a	Telaah Sejawat Intern										0	1
b	Telaah Sejawat Penjaminan kualitas antar Tim Pengawasan 1) Telaah Sejawat Intern pada Tim I Satker BP2JK Nusa Tenggara Barat	P7		II / d	N9		Ke-4 Agustus	Ke-4 Agustus	Inspektur V Aditya, S.E., M.Ak., QRMA Hizkia Aldo Amante Saragih, S.E. Rifdah Mavrani, S.E. Surti Wadiah, S.T.	Daltu Dalnis Katim Anggota Anggota	0	5
											0	1


No	Objek Pengawasan	Prioritas Pengawasan	Risiko	Kode Fokus/Tema	Kode Pengawasan	Jumlah Hari	Minggu		Nama	Jabatan	Biaya (Rp1.000)	Jml. LHP	
							Mulai	Selesai					
2)	Telaah Sejawat Intern pada Tim II Satker BPZJK Maluku Utara						Ke-4 Agustus	Ke-4 Agustus	Inspektur V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP Tomv, S.T. Christina Eka Widiasatuti, S.E Vienna Ananda Ari Sembiana, S.T.	Datu Dalnis Katim Anggota Anggota	0	1	
3)	Telaah Sejawat Intern pada Tim III Satker BPZJK Sumatera Barat						Ke-4 Agustus	Ke-4 Agustus	Inspektur V Satriandarma Elihaka, S.E., M.M., OIA, CPrA, CRMO Valenia Sari, S.E., M.E. Marta Muhammad Tholur, S.E. Eka Nurpa Hiriia, S.ST.	Datu Dalnis Katim Anggota Anggota	0	1	
4)	Telaah Sejawat Intern pada Tim IV Satker BPZJK Sulawesi Selatan						Ke-4 Agustus	Ke-4 Agustus	Inspektur V Lesnita Yusrinati Dahila, S.T., M.T. Liona Pramestiani, S.I. Kom. Harli Yanes Fira, S.T. Rifka Minda Asih Shombing, A.Md.Ak.	Datu Dalnis Katim Anggota Anggota	0	1	
5)	Telaah Sejawat Intern pada Tim V Satker BPZJK Kalimantan Barat						Ke-4 Agustus	Ke-4 Agustus	Inspektur V Mularia Cornelia Josefina Sirait, S.E., M.Ak. Mohamad Ikhwan, S.H. Dian Rindu Lubis, S.E., M.Ak. Muslih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Datu Dalnis Katim Anggota Anggota	0	1	
c	Telaah Sejawat Penjaminan kualitas antar Tim Pengawasan	P7		II / d	N9							0	3
1)	Telaah Sejawat Intern pada Tim I Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin						Ke-4 Desember	Ke-4 Desember	Inspektur V Aditva, S.E., M.Ak. Hizkia Aldo Amanta Saragih, S.E. Devi Handayani, S.E., M.Sc. Rifqah Maviani, S.E. Muslih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Datu Dalnis Katim Anggota Anggota	0	1	
IV PEMANTAUAN											88.818	35	
A	PEMANTAUAN TL LHP										65.219	39	
1	Pemantauan TL LHP Hden	P8		II / b	N11						32.832	38	
a	Tim I Bidang Bina Konstruksi I (Wilayah Sumatera) dan BPIW						Jan	Des	Inspektur V Lesnita Yusrinati Dahila, S.T., M.T. Liona Pramestiani, S.I. Kom. Tomv, S.T. Gavuh Alviana Azmi, S.E., M.Ak. Rifka Minda Asih Shombing, A.Md.Ak. Yohana Tri Janesrumaari, A.Md.Ak.	Datu Dalnis Katim Anggota Anggota Anggota	8.208	20	
b	Tim II Bidang Bina Konstruksi II (Wilayah Jawa) dan Sekretariat						Jan	Des	Inspektur V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP Indah Triana Ristani, SE, Ak. Faniya Alva Puteri, S.E., M.S.M. Christina Eka Widiasatuti, S.E Eka Nurpa Hiriia, S.ST. Vita Bakti Rafadilla, S.Tr.Ak.	Datu Dalnis Katim Anggota Anggota Anggota	8.208	3	
c	Tim III Bidang Bina Konstruksi III (Wilayah Kalimantan) dan						Jan	Des	Inspektur V Aditva, S.E., M.Ak., QRMA Hizkia Aldo Amanta Saragih, S.E. Devi Handayani, S.E., M.Sc. Rifqah Maviani, S.E. Muslih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Datu Dalnis Katim Anggota Anggota Anggota	8.208	10	
d	Tim IV Bidang Bina Konstruksi IV (Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara) dan Inspektorat Jenderal						Jan	Des	Inspektur V Mularia Cornelia Josefina Sirait, S.E., M.Ak. Mohamad Ikhwan, S.H. Dian Rindu Lubis, S.E., M.Ak.	Datu Dalnis Katim Anggota	8.208	5	

No	Objek Pengawasan	Prioritas Pengawasan	Risiko	Kode Fokus/Tema	Kode Pengawasan	Jumlah Hari	Minggu		Nama	Jabatan	Biaya (Rp1.000)	Jml. LHP
							Mulai	Selesai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Rosdivanti, S.E Sofiana Dewi, S.Tr.Ak.	Anggota Anggota		
2	Pemantauan TL LHP BPK						Jan	Des	Inspektor V Lusmita Yusemiati Dahlia, S.T., M.T. Mohamad Ikhsan, S.H. Indah Triana Ristani, S.E., Ak. Gavuh Alviana Azmi, S.E., M.Ak. Desy Handayani, S.E., M.Sc. Putri Scere Sinaga, S.E. Anggi Mirawati, S.T. Sofiana Dewi, S.Tr.Ak.	Datu Dahnis Katrin Anggota Anggota Anggota Anggota	32,387	1
V PENGAWASAN LAINNYA											161,706	46
A BIMTEK, ASISTENSI, PENDAMPINGAN, DAN KONSULTASI DI BIDANG PENGAWASAN											105,840	39
1	a										105,840	36
	1)						ke-4 Agustus	ke-4 Agustus	Inspektor V Lusmita Yusemiati Dahlia, S.T., M.T. Lilisa Fransawati, S.I. Kom. Tomy, S.T. Gavuh Alviana Azmi, S.E., M.Ak. Harfi Yanes Pira, S.T. Yohana Tri Januarumeari, A.Md.Ak. Rifka Minto Asih Sitombing, A.Md.Ak.	Datu Dahnis Katrin Anggota Anggota Anggota	21,168	8
	2)						ke-4 Agustus	ke-4 Agustus	Inspektor V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP Indah Triana Ristani, S.E., Ak. Christina Eka Widiasatuti, S.E. Faniya Alya Pallert, S.E., M.S.M. Eka Nurpa Hirma, S.ST. Muhammad Azra Ramadhani, S.Tr.Ak. Fanni Andreas, S.Tr.Ak.	Datu Dahnis Katrin Anggota Anggota Anggota Anggota	21,168	4
	3)						ke-4 Agustus	ke-4 Agustus	Inspektor V Aditya, S.E., M.Ak., ORMA Hizkia Aldo Amanta Suragih, S.E. Desy Handayani, S.E., M.Sc. Farid Arif Adi Nugroho, S.ST. Rifdiah Mawrani, S.E. Vienna Amunda Ari Sembiana, S.T. Muslih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Datu Dahnis Katrin Anggota Anggota Anggota Anggota	21,168	9
	4)						ke-4 Agustus	ke-4 Agustus	Inspektor V Mularia Cornelia Josefina Sirait, S.E., M.Ak. Rosdivanti, S.E. Mohamad Ikhsan, S.H. Dian Rindu Lubis, S.E. M.Ak. Sun Neldah, S.T. Nurizkaqilah, S.T. Vita Bakgi Rafadhila, S.Tr.Ak.	Datu Dahnis Anggota Katrin Anggota Anggota Anggota	21,168	7
	5)						ke-4 Agustus	ke-4 Agustus	Inspektor V Satriadarma Elliska, S.E., M.M., QIA, CPrA, CRMD Yolkma Sari, S.E., M.E. Anggi Mirawati, S.T. Marta Muhammad Thahir, S.E. Abdul Fatah Iham Bimotanto, S.Tr.Ak.	Datu Dahnis Katrin Anggota Anggota	21,168	7

No	Objek Pengawasan	Prioritas Pengawasan	Risiko	Kode Fokus/Tema	Kode Pengawasan	Jumlah Hari	Minggu		Nama	Jabatan	Biaya (Rp1.000)	Jml. LHP
							Mulai	Selesai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Azhar Shidd Espana Putrasvari, S.Tr.Ak Seraya M. Sinaga, A.Md.Ak	Anggota Anggota		
									Inspektur V Satriadarma Elliska, S.E., M.M., CIA, CPFA, CRMO Yolanis Sari, S.E., M.E. Anggi Mirawati, S.T. Marta Muhammad Thohir, S.E. Abdul Fatah Ihsan Bimotanto, S.Tr.Ak. Azhar Shidd Espana Putrasvari, S.Tr.Ak	Daltu Daltis Ketim Anggota Anggota Anggota	21,168	2
									Inspektur V Satriadarma Elliska, S.E., M.M., CIA, CPFA, CRMO Yolanis Sari, S.E., M.E. Anggi Mirawati, S.T. Marta Muhammad Thohir, S.E. Abdul Fatah Ihsan Bimotanto, S.Tr.Ak. Azhar Shidd Espana Putrasvari, S.Tr.Ak	Daltu Daltis Ketim Anggota Anggota Anggota		1
2	Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Provinsi Aceh			1 / a	N30		Ke-3 Desember	Ke-4 Desember		Anggota	0	3
a	Provinsi Aceh								Inspektur V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc. Mohammed Ihsan, S.H. Muslih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak. Eka Nurpa Hjria, S.ST.	Daltu Daltis Ketua Anggota Anggota	0	1
b	Provinsi Sumatera Utara								Inspektur V Lasanta Yumiasri Daulia, S.T., M.T. Yolanis Sari, S.E., M.E. Rifka Mudo Aeli Sibrumbang, A.Md.Ak. Yohana Tri Januarumawati, A.Md.Ak.	Daltu Daltis Ketua Anggota Anggota	0	1
a	Provinsi Sumatera Barat								Inspektur V Aditya, S.E., M.Ak. Hizkia Aldo Amanta Saragih, S.E. Viera Aranda Ari Sembiana, S.T. Ridiah Mayrini, S.E.	Daltu Daltis Ketua Anggota Anggota	0	1
B	BIMTEK, ASISTENSI, PENDAMPINGAN, DAN KONSULTASI										55,864	1
1	Pengawasan Lainnya (Pendampingan Lainnya, Narasumber Pengawasan Lainnya (Pendampingan Lainnya, Narasumber Bidang Pengendalian dan Pengawasan, dll)	P1 / P8		II / b	N29	2	Januari	Desember	Inspektur V Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc., CRMP, CRGP To be named To be named To be named	Daltu Daltis Ketim Anggota Anggota	55,864	1
a											55,864	1
VI	PENGAWASAN WAJIB KEMENTERIAN										198,126	12
A	REVIU PIPK KEMENTERIAN										0	1
1	Reviu PIPK Kementerian	P2		II / b	M1	8	Ke-2 Januari	Ke-2 Januari	Inspektur V Satriadarma Elliska, S.E., M.M., CIA, CPFA, CRMO Putri Score Sinaga, S.E. Naili Affah, S.T., M.T., CRMO, CGAA Yolanis Sari, S.E., M.E. Hizkia Aldo Amanta Saragih, S.E. Marta Muhammad Thohir, S.E.	Daltu Daltis Ketua Tim Anggota Anggota Anggota	0	1
a	Reviu PIPK Kementerian										0	1
B	REVIU LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN										70,319	5
1	Reviu Laporan Keuangan Kementerian TA 2024	P2		II / b	M4	7	Ke-4 Januari	Ke-1 Februari	Inspektur V Satriadarma Elliska, S.E., M.M., CIA, CPFA, CRMO	Daltu Daltis	0	2
a	Reviu Laporan Keuangan Kementerian TA 2024										0	2

No	Obyek Pengawasan	Prioritas Pengawasan	Risiko	Kode Fokus/Tema	Kode Pengawasan	Jumlah Hari	Minggu		Nama	Jabatan	Biaya (Rp1.000)	Jml. LHP
							8	9				
2	Reviu Laporan Keuangan Kementerian Semester I TA 2025 Reviu Laporan Keuangan Kementerian Semester I TA 2025	P2		II / b	M6	7	Ke-4 Juli	Ke-4 Juli	Widhie Arzy Restuanti, S.E., Ak. M.T. Rosdiyanti, S.E. Rakhmadina Dalicia Ashfarah, S.E., Ak. Dewy Herdayani, S.E., M.Sc. Cavuli Alwiana Azmi, S.E., M.Ak. Yolania Sari, S.E., M.E. Erin Y Sinaga, S.E. Algadita Fatmala Ramaniha Sari, S.H. Marta Muhammad Thohir, S.E. Edi Yasmeru, S.E. Eka Nurpa Hijria, S.ST. Inspektur V Sacriedarmo Elliska, S.E., M.M., OJA, CPtA, CRMO Widhie Arzy Restuanti, S.E., Ak. M.T. Novina Harvanti, S.E., M.T. Dian Rinda Lubis, S.E., M.Ak. Prieta Ika Thaurisab, S.E., Ak. Yolania Sari, S.E., M.E.	Ketua Tim Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Daltu Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota Anggota Anggota	70,319 70,319	3 3

Lampiran III Bukti Dukung Capaian Kinerja



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7251539, Surel: ijen@pu.go.id


**NOTA DINAS
NOMOR: 256/ND/le/2025**

Yth. : Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
 Dari : Inspektur V
 Hal : Laporan Hasil Penelaahan atas Pengaduan Masyarakat yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* (WBS) sehubungan dengan adanya kesalahan Kelompok Kerja 26 BP2JK Wilayah Sulawesi Barat dalam Evaluasi Administrasi terkait Jaminan Penawaran
 Tanggal : 5 Desember 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Inspektur VI Nomor 355/ND/II/2025 Tanggal 26 November 2025 Hal Penerusan Pengaduan WisPU-2025/0283 untuk melakukan penelaahan atas Laporan Pengaduan Masyarakat yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* Kementerian PU (WBS) Nomor WisPU-2025/0283 Tanggal 14 November 2025, bersama ini disampaikan dengan hormat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Penelaahan atas Pengaduan Masyarakat yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* (WBS) sehubungan dengan adanya kesalahan Kelompok Kerja 26 BP2JK Wilayah Sulawesi Barat dalam Evaluasi Administrasi terkait Jaminan Penawaran.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Penelaahan disampaikan sebagai berikut:
 - a. Dasar Penelaahan
 - 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui *Whistleblowing System* di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 2) Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern;
 - 3) Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 29/KPTS/II/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan *Whistleblowing System* di Kementerian Pekerjaan Umum;
 - 4) Laporan Pengaduan Masyarakat yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* Kementerian PU (WBS) Nomor WisPU-2025/0283 Tanggal 14 November 2025;
 - 5) Nota Dinas Inspektur VI kepada Inspektur V Nomor 355/ND/II/2025 Tanggal 26 November 2025 Hal Penerusan Pengaduan WisPU-2025/0283;
 - 6) Surat Tugas Inspektur V Nomor 7/SPT/le/2025 Tanggal 26 November 2025 dalam rangka Penelaahan Laporan Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Melalui *Whistleblowing System* (WBS) Nomor Wispu-2025/0283 terkait dengan Indikasi Kesalahan Kelompok Kerja 26 BP2JK Wilayah Sulawesi Barat dalam Evaluasi Penawaran.
 - b. Kesimpulan

No.	Hasil Penelitian Awal	Kesimpulan	
		Ya	Tidak
1.	Relevansi dan Kelengkapan Pengaduan		
	a. Relevan	√	-
	b. Lengkap	√	-
2.	Indikasi Penyimpangan	-	√
 - c. Berdasarkan...



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7392661, Surel: ijen@pu.go.id

Nomor : PW01 03 - 15 / 757
 Sifat : **Rahasia**
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Laporan Hasil Audit Kinerja Berbasis Risiko atas Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan
 Jakarta, 4 Agustus 2025

Yth. Direktur Jenderal Bina Konstruksi
 di
 Jakarta

Bersama ini disampaikan dengan hormat ringkasan Laporan Hasil Audit Kinerja Berbasis Risiko atas Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan dengan garis besar sebagai berikut:

- I. Laporan Hasil Audit Kinerja Berbasis Risiko Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 1/5/112/2025/018 Tanggal 24 Juli 2025, pada Satuan Kerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan;
- II. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Kinerja Berbasis Risiko tersebut, secara garis besar dapat disampaikan hal sebagai berikut:
 - A. Dasar Penugasan

Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 450/SPT/II/2025 Tanggal 12 Juni 2025 untuk melakukan Audit Kinerja Berbasis Risiko atas Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan.
 - B. Tujuan Penugasan
 1. Mendapatkan keyakinan memadai atas tercapainya kinerja yang efisien, efektif dan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Memberikan masukan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern, Manajemen Risiko dan perbaikan pada area yang memerlukan peningkatan kinerja;
 3. Memberikan peringatan dini atas program/kegiatan yang diperkirakan tidak akan efektif.
 - C. Ruang Lingkup
 1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya;
 2. Indikator Kinerja Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya;
 3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan: Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa;
 4. Pemeriksaan atas aspek efisiensi, efektivitas, serta ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.
 - D. Metodologi...



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7392661, Surel: ijen@pu.go.id

Nomor : **PW 0201-Is/2025** Jakarta, 14 Januari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas CHV
Hal : Laporan Hasil Verifikasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 Nomor 5b/LHP/XVII/05/2022 Tanggal 27 Mei 2022 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Yth. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor PW 0201-Km/219 Tanggal 24 Desember 2024 Hal Permohonan Verifikasi Dokumen atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI No. 5b/LHP/XVII/05/2022, bersama ini disampaikan dengan hormat:

i. Catatan Hasil Verifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU Nomor 1/5/2/16/2025/013 Tanggal 8 Januari 2025 atas Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 Nomor 5b/LHP/XVII/05/2022 Tanggal 27 Mei 2022 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

ii. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi tersebut dapat disampaikan:

A. Dasar Verifikasi

1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern;
3. Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor PW 0202-Is/1230 Tanggal 14 Oktober 2021 Hal Tata Kelola Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRLHP) BPK RI;
4. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor PW 0201-Km/219 Tanggal 24 Desember 2024 Hal Permohonan Verifikasi Dokumen atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI No. 5b/LHP/XVII/05/2022;
5. Surat Kepala Pusat Pengembangan Talenta Nomor PW 0201-MIS/22 Tanggal 23 Desember 2024 Hal Penyampaian Hasil Validasi Bidang Kepatuhan Intern terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI Tahun 2021 pada Satuan Kerja Pusbangkom Manajemen;
6. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 7/SPT/ij/2025 Tanggal 3 Januari 2025 untuk melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu-Verifikasi Tindak Lanjut LHP BPK RI pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

B. Tujuan Verifikasi

Memberikan keyakinan memadai terhadap kesesuaian dokumen Tindak Lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 5b/LHP/XVII/05/2022 Tanggal 27 Mei 2022.

C. Ruang...



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7251539, Surel: ijen@pu.go.id

Nomor : **PW 0155-Is/HSP** Jakarta, 27 November 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2027

Yth. Inspektur Jenderal

di Jakarta

Menindaklanjuti Sekretaris Jenderal Nomor PS 0601-Sj/1419 Tanggal 28 Oktober 2025 Hal Penyampaian Hasil Penelitian dan Permohonan Reviu Atas Usulan Hasil Penelaahan RKBMN Kementerian PUPR TA 2027, bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk Tahun Anggaran 2027 Nomor 1/5/3/6/2025/414 Tanggal 21 November 2025, dengan hasil Reviu sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara; dan
5. Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 1212/SPT/ij/2025 Tanggal 5 November 2025 untuk melaksanakan Reviu atas Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tingkat Unit Organisasi Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2027.

B. Tujuan Reviu

Tujuan dari dilaksanakannya Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara adalah untuk mendapatkan keyakinan memadai, terbatas pada kelengkapan dokumen persyaratan atas usulan RKBMN TA 2027, serta kepatuhan terhadap penerapan kelentuan perencanaan kebutuhan BMN.

C. Ruang Lingkup Reviu

- Ruang lingkup Reviu atas Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027 antara lain:
1. Penelitian atas usulan RKBMN Pengadaan dan RKBMN Pemeliharaan Tahun Anggaran 2027; dan
 2. Inspektorat Jenderal tidak memintahkan tanggapan jawab Pengguna Barang terhadap kebijakan dalam penyusunan dan kebenaran RKBMN yang diusulkan.

D. Uraian ...



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7251530, Surel: ijen@pu.go.id

Nomor : PW 0204-1e/42 Jakarta, 9 Juli 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi (UPR T-1) Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat Jenderal

Yth. Inspektur Jenderal
di
Jakarta

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Jenderal pada Unit Pemilik Risiko (UPR) T-1 Inspektorat Jenderal Nomor 15/4/6/2024/010 Tanggal 11 Juni 2025. Berdasarkan laporan tersebut disampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Surat Inspektur Jenderal Nomor PW/0204-1j/1686 Tanggal 30 Desember 2022 Hal Penyampaian Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko;
2. Surat Tugas Nomor 373/SPT/1j/2025 Tanggal 22 Mei 2025 untuk melakukan Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi (UPR T-1) Tahun Anggaran 2024.

B. Tujuan Evaluasi

Menilai tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR T-1) Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024 dalam memahami dan mengelola risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Menghitung bobot komponen dan sub komponen serta perhitungan nilai berdasarkan hasil review dokumen dan survei persepsi penerapan Manajemen Risiko terhadap:

1. Infrastruktur Manajemen Risiko;
2. Proses Manajemen Risiko;
3. Hasil Penerapan Manajemen Risiko.

D. Struktur Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko

Struktur Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR T-1) Inspektorat Jenderal ditetapkan berdasarkan:

1. Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 6.1/KPTS/1j/2023 Tanggal 27 Januari 2023 Tentang Penetapan Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko Unit Pemilik Risiko Tingkat 1 (UPR T-1) Inspektorat Jenderal, dengan susunan keanggotaan UPR sebagai berikut:

No.	Jabatan	Kedudukan dalam UPR
1.	Inspektur Jenderal	Pemilik Risiko
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Pengelola Risiko

2. Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 48/KPTS/1j/2024 Tanggal 23 Desember 2024 Tentang Penetapan Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Organisasi (UPR T-1) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dengan susunan keanggotaan UPR sebagai berikut:

No.	Jabatan	Kedudukan dalam UPR
1.	Inspektur Jenderal	Pemilik Risiko
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Pengelola Risiko organisasi dan risiko program pembangunan nasional

E. Hasil...



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7392681, Surel: ijen@pu.go.id

Nomor : PW 0204-1j/629-2 Jakarta, 30 Juni 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Unit Organisasi TA 2024 pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Yth. Direktur Jenderal Bina Konstruksi
di
Jakarta

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, berdasarkan laporan tersebut disampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 02/SE/1j/2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
3. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 426/SPT/1j/2025 Tanggal 5 Juni 2025 untuk melakukan Evaluasi Penyelenggaraan AKIP Tingkat Unit Organisasi TA 2024 pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

B. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi adalah untuk:

1. Mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah;
2. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
4. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
5. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
6. Memantau Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/pemenuhannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

D. Uraian Hasil Evaluasi

1. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka implementasi atas AKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PU Tahun Anggaran 2024




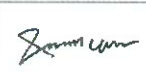


dapat...

Lampiran IV Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja

BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT V INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2024

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2024, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit kerja Inspektorat V sebagai berikut:








	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan/Komponen	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
SK 1.4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V					
IKK 1.4	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	%	87	97,00	111,49	Komposit dari komponen 1 s.d. 5
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V (25%)	Nilai	90	94,42	104,91	Nilai Telaah Sejawat setelah <i>Quality Assurance</i>
2	Persentase Pengawasan di Inspektorat V (25%)	%	90	100	111,11	Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan
3	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	%	95	98,55	103,74	Perbandingan jumlah pengaduan yang tuntas ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V (15%)	%	65	91,14	140,22	Berdasarkan data hasil konsolidasi dengan Bagian Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
5	Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi (10%)	%	92	96,22	104,59	
	a. Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Ijten terhadap Hasil Evaluasi BPKP) (40%)	%	92	95,48	100,50	Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Tingkat Kementerian
	b. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1 (30%)	Nilai	4	4	4	Berdasarkan hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR-T1 Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
	c. Persentase Penerapan Manajemen Resiko (30%)	%	85	100	117,65	Berdasarkan Ikhtisar Hasil Evaluasi UKI Unit Organisasi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Koorwas Binkon I dan Ijten	Koorwas Binkon II dan Setjen	Koorwas Binkon III dan BPSDM	Koorwas Binkon IV dan BPIW	Koorwas Binkon V dan Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian PUPR	Kasubbag Tata Usaha
					

- 2 -

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data Capaian Kinerja Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2024.

Jakarta, 16 Januari 2025

<p>Mengetahui, Inspektur V</p>  <p>Ir. Subaiha Kipli M.T.</p>					
<p>Koordinator Pengawasan Bidang Bina Konstruksi I (Wilayah Sumatera) dan Inspektorat Jenderal</p>  <p>Lasnita Yusmiati Dahlia, S.T., M.T.</p>	<p>Koordinator Pengawasan Bidang Bina Konstruksi II (Wilayah Jawa) dan Sekretariat Jenderal</p>  <p>Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc.</p>	<p>Koordinator Pengawasan Bidang Bina Konstruksi III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>  <p>Aditya, S.E., M.Ak.</p>	<p>Koordinator Pengawasan Bidang Bina Konstruksi IV (Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Maluku Utara) dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah</p>  <p>Mohamad Ikhsan, S.H.</p>	<p>Koordinator Pengawasan Bidang Bina Konstruksi V (Wilayah Papua) dan Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian PUPR</p>  <p>Satriadarma Elliska, S.E., M.M.</p>	<p>Kasubbag Tata Usaha</p>  <p>Dumaris BR Sinurat, S.E., M.Ak.</p>

Lampiran V Dokumentasi Kegiatan



Audit Kinerja pada Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura



Audit Kinerja pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK)
Kalimantan Barat



24 Jun 2025 at 01.23.31
Jalan Kapitan Patimurra
Ternate
North Maluku
Indonesia

Audit Kinerja pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK)
Maluku Utara



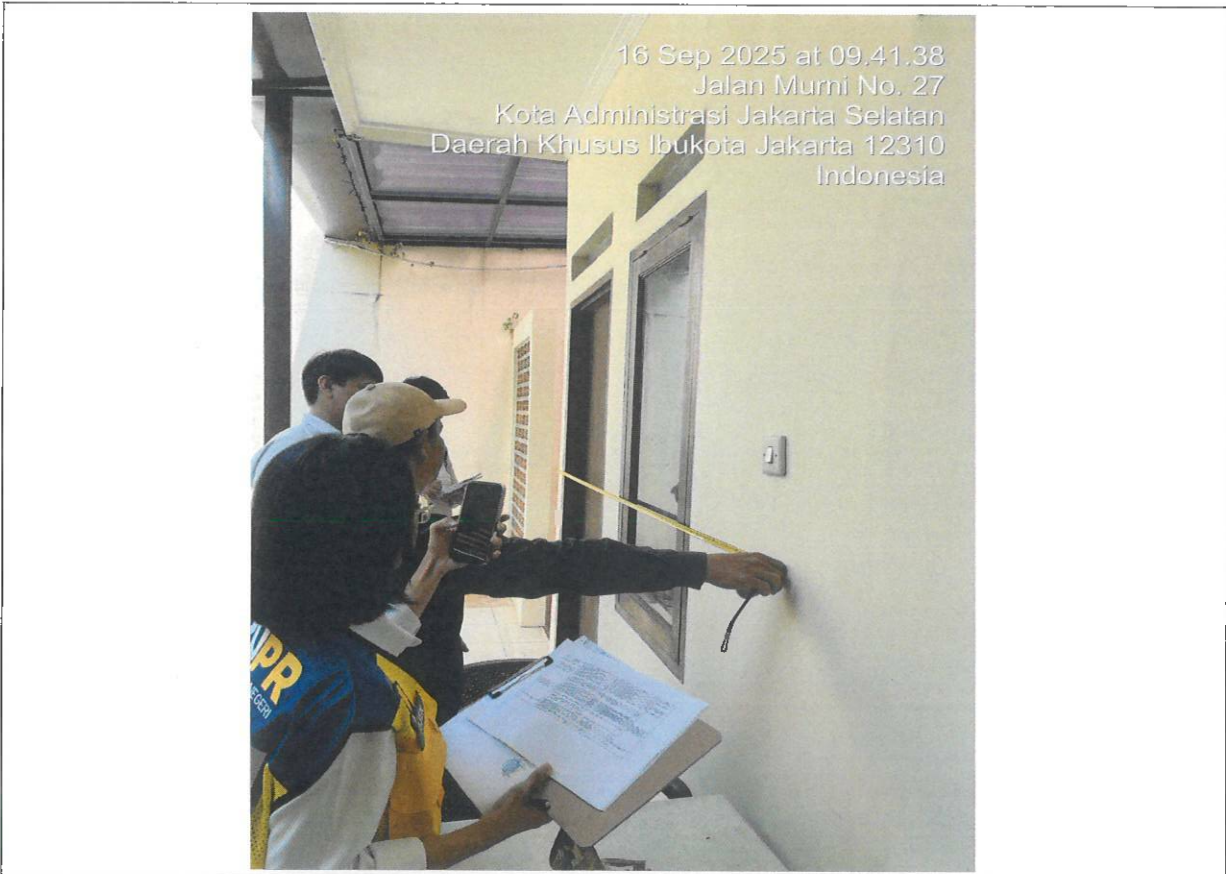
Audit Kinerja pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Nusa Tenggara
Barat



Audit Kinerja pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulawesi Selatan



Audit Kinerja pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sumatera Barat



16 Sep 2025 at 09.41.38
Jalan Murni No. 27
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310
Indonesia

Audit Pentak Pusat (Sekretariat BPSDM)



7 Jan 2026 09:25:29
6.23633107S 106.80035146E
253° W
Selong
Kecamatan Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Altitude:87.4msnm
Speed:0.0km/h

Audit Pentak Pusat (Sekretariat Bina Konstruksi)



Audit Pentak Pusat (PFID)



Audit Pentak Pusat (Sekretariat Itjen)



Audit Pemtak Pusat (Satuan Kerja LPJK)



Audit Pemtak Pusat (Puswilnas BPIW)



Audit Pentak Pusat (Sekretariat BPIW)



Audit Pentak Pusat (Pusbangkom Manajemen)



Audit Politeknik PU



Reviu atas Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Kementerian PUPR TA 2025



Evaluasi Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi (UPR T-1) Tahun Anggaran 2024



Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Unit Organisasi (UPR-T1) Tahun Anggaran 2024



Pemantauan MR 2024 dan Sosialisasi MR 2025



Reviu Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027 pada Unit Organisasi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Reviu Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tingkat Kementerian
TA 2026

Lampiran VI *Cascading Rincian Output*

No.	Jenjang JF Auditor	Jabatan	Jumlah Target Laporan				
			Audit	Reviu	Evaluasi	Pemantauan	Pengawasan Lainnya
1	Ir. Subaiha Kipli M.T.	Inspektur V	43	66	15	10	46
2	Lasnita Yusmiati Dahlia, S.T., M.T.	Auditor Ahli Madya	7	7	5	2	10
3	Liona Pramestiani, S.I. Kom.	Auditor Ahli Muda	2	6	4	1	7
4	Gayuh Alviana Azmi, S.E., M.Ak.	Auditor Ahli Muda	3	13	4	2	6
5	Rifka Mindo Asih Sihombing, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	5	15	3	1	10
6	Yohana Tri Januarumsari, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	4	6	2	1	7
7	Fitriana Sianipar, A.Md.Ak.	Karyasiswa Diploma dan Sarjana	0	0	0	0	0
8	Dimas Hendra Cipta, S.E., M.S.E., M.Sc.	Auditor Ahli Madya	13	21	2	2	9
9	Tomy, S.T.	Auditor Ahli Muda	6	10	2	0	6
10	Dhiny Diyah Pradipta, S.E., Ak.	Karyasiswa Master dan Doktoral	0	0	0	0	0
11	Christina Eka Widiastuti, S.E.	Auditor Ahli Pertama	8	16	2	2	5
12	Eka Nurpa Hijria, S.ST.	Auditor Ahli Pertama	10	17	2	1	9
13	Fanisya Alya Puteri, S.E., M.S.M.	Auditor Ahli Pertama	3	16	3	1	7
14	Vita Bakti Rafadilla, S.Tr.Ak.	Auditor Ahli Pertama	5	7	1	0	11
15	Aditya, S.E., M.Ak.	Auditor Ahli Madya	14	12	3	4	16
16	Desy Handayani, S.E., M.Sc.	Auditor Ahli Muda	8	12	2	5	5
17	Hizkia Aldo Amanta Saragih, S.E.	Auditor Ahli Muda	14	9	1	3	12
18	Rifdah Mayrani, S.E.	Auditor Ahli Pertama	15	14	3	4	8
19	Muslih Abdul Aziz Aliza, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	13	9	2	4	10
20	Mohamad Ikhsan, S.H.	Auditor Ahli Muda	7	11	2	2	9

No.	Jenjang JF Auditor	Jabatan	Jumlah Target Laporan				
			Audit	Reviu	Evaluasi	Pemantauan	Pengawasan Lainnya
21	Mularia Cornelia Josefina Sirait, S.E., M.Ak.	Auditor Ahli Madya	4	7	3	1	3
22	Dian Rindu Lubis, S.E., M.Ak.	Auditor Ahli Muda	7	14	1	1	6
23	Sofiana Dewi, S.Tr.Ak.	Auditor Ahli Pertama	4	8	3	2	0
24	Satriadarma Elliska, S.E., M.M.	Auditor Ahli Madya	6	22	8	0	11
25	Nailil Afifah, S.T., M.T.	Auditor Ahli Muda	2	18	8	1	4
26	Indah Triana Ristani, S.E., Ak.	Auditor Ahli Muda	5	11	4	3	6
27	Yolania Sari, S.E., M.E.	Auditor Ahli Muda	7	16	3	1	10
28	Putri Scere Sinaga, S.E.	Auditor Ahli Muda	3	18	6	2	4
29	Anggi Mirawati, S.T.	Auditor Ahli Pertama	4	6	6	1	7
30	Marta Muhammad Thohir, S.E.	Auditor Ahli Pertama	5	20	3	1	8
31	Viena Ananda Ari Sembiena, S.T.	Auditor Ahli Pertama	3	1	0	0	9
32	Harfi Yanes Fira, S.T.	Auditor Ahli Pertama	2	1	0	0	6
33	Sun'Naidah, S.T.	Auditor Ahli Pertama	3	1	0	0	7